

INDONESIA
ECONOMIC
QUARTERLY

Juni 2018

Pendidikan untuk pertumbuhan



Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Pendidikan untuk pertumbuhan

Juni 2018

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly, IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo A. Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomics, Trade and Investment (MTI) Global Practice*, dibawah bimbingan Ndiame Diop (*Practice Manager*) dan Frederico Gil Sander (*Lead Economist*). Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, *Senior Economist* dan *lead author*, tim inti terdiri dari Abigail, Arsianti, Yus Medina, Alief Aulia Rezza, Jaffar Al-Rikabi dan Dhruv Sharma. Dukungan administrasi diberikan oleh Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Nugroho Sunjoyo, Jerry Kurniawan, dan GB Surya Ningnagara atas bimbingan Lestari Boediono Qureshi.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Dhruv Sharma (Bagian A.1 dan A.5), Alief Aulia Rezza (Bagian A.2, A.3, dan A.4), Jaffar Al-Rikabi dan Yus Medina (Bagian A.6), Derek H.C. Chen (Bagian A.7), Dhruv Sharma, Frederico Gil Sander dan Pui Shen Yoong (Kotak A.1), Javier Luque dan Rythia Afkar dengan masukan dari Noah Yarrow, Rosfita Roesli, Susiana Iskandar, Ratna Kesuma, Petra Wiyakti Bodrogini, Sheldon Shaeffer, Raja Bentaouet Kattan, Amer Hasan, Harry Patrinos, Camilla Holmemo dan Frederico Gil Sander (Bagian B), dan Abigail (Lampiran). Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Ekaterina T. Vashakmadze (*Senior Economist*, DECPG, World Bank), Ha Nguyen (*Economist*, DECMG, World Bank), dan Andy D. Mason (*Lead Economist*, EAPCE, World Bank).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Photo merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi snjotomihardjo@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi dchen2@worldbank.org.

Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BEC	Basic Education Capacity Development
BI	Bank Indonesia
BOP	Balance of Payments
BoP PAUD	Bantuan Operasional PAUD
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
CPO	Crude Palm Oil
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
ECED	Early Childhood Education and Development
EMCI	Emerging Market Currency Index
GDP	Gross domestic product
GoI	Government of Indonesia
HLO	Harmonized Learning Outcomes
ILEG	Indonesia Local Education Governance Index
IMF	International Monetary Fund
INAP	Indonesian National Assessment Program/AKSI
INPRES	Instruksi Presiden
LNG	Liquefied Natural Gas
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
MA	Madrasah Aliyah or equivalent with the senior secondary level
MELE	Measuring Early Learning Environment
MI	Madrasah Ibtidaiyah or equivalent with the primary level
MSSCD	Minimum Service Standards Capacity Development
MSS	Minimum Service Standards
MTS	Madrasah Tsanawiyah or equivalent with the junior secondary level
MenPAN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform
MOEC	Ministry of Education and Culture
MOF	Ministry of Finance
MOHA	Ministry of Home Affairs
MORA	Ministry of Religious Affairs
MORTHE	Ministry of Research, Technology, and Higher Education
MOV	Ministry of Village, Underdeveloped Regions and Transmigration
NPL	Non-Performing Loans
NTI	Net Trade Index
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PAI	Pembelajaran Agama Islam/Teaching Islamic Religion
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBI-JKN	Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional
PISA	Programme for International Student Assessment
PIP	Program Indonesia Pintar
PKB	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PKG	Penilaian Kinerja Guru or teacher performance appraisal
PKH	Program Keluarga Harapan
PKN	Pendidikan Kewarganegaraan

PLPG	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
PNS	Pegawai Negeri Sipil/Civil Servant
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PUSPENDIK	Pusat Penilaian Pendidikan/Center for Educational Assessment
qoq	Quarter-on-quarter
sa	Seasonally adjusted
SKK	Satuan Kerja Khusus
TAP	Tax Amnesty Program
TPG	Teacher Professional Allowances
TIMSS	Trends in International Mathematics and Science Study
ToT	Terms-of-trade
TPG	Teacher Professional Allowances
UKG	Uji Kompetensi Guru or teacher competency exam
UNESCO	the United Nations Educational, Scientific and Cultural organization
VAT	Value Added Tax
yoy	Year-on-year

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
SINGKATAN	II
DAFTAR ISI	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI.....	4
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun di Triwulan ke-1 tahun 2018	4
2. Harga komoditas terus meningkat di Triwulan ke-1	9
3. Defisit neraca transaksi berjalan menyusut karena impor barang modal yang lebih tinggi diimbangi oleh defisit perdagangan jasa yang lebih rendah.....	12
4. Inflasi IHK terus menurun.....	16
5. Imbal hasil obligasi meningkat di 5 bulan pertama tahun 2018 ketika Amerika Serikat terus menormalisasi kebijakan moneter.....	17
6. Peningkatan yang sangat tinggi dalam realisasi penerimaan dan pertumbuhan belanja yang terus berlanjut.....	21
7. Perkiraan (outlook) dan risiko pertumbuhan ekonomi	23
B. MENGHADIRKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAGI INDONESIA: MENGATASI TANTANGAN PASCA 15 TAHUN REFORMASI PENDIDIKAN	30
1. Potensi pertumbuhan dan kualitas hidup Indonesia sangat tergantung pada sumber daya manusianya	31
2. Selama 15 tahun terakhir ini, sistem pendidikan Indonesia telah mengalami transformasi besar yang memberikan hasil yang beragam	33
3. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari investasi sumber daya manusia, Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih baik dan pelaksanaan yang lebih baik	40
a. Sumber daya tambahan belum dapat meningkatkan kualitas pendidikan	40
b. Untuk meningkatkan hasil pendidikan, kapasitas semua pelaku serta koordinasi di antara mereka harus ditingkatkan.....	42
c. Tercatat adanya tantangan-tantangan utama dalam manajemen guru dan dalam pelaksanaan ujian nasional.	49
4. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.....	56
REFERENSI.....	63
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA.....	66

GAMBAR

Gambar A.1: Ekspor bersih menjadi penghambat pertumbuhan PDB di Triwulan ke-1.....	4
Gambar A.2: Lonjakan investasi di sektor permesinan dan peralatan serta kendaraan bermotor menyebabkan pembentukan modal tetap yang lebih tinggi	5
Gambar A.3: Indikator frekuensi tinggi untuk konsumsi swasta menunjuk ke gambar yang terbaaur	5
Gambar A.4: Belanja sosial mendorong naiknya nilai nominal konsumsi pemerintah	5
Gambar A.5: Pertumbuhan penjualan eceran tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan konsumsi swasta riil sejak tahun 2015.....	7
Gambar A.6: ... sebagian karena konsumsi telah bergeser sedikit dari barang ke jasa dalam beberapa tahun terakhir	7
Gambar A.7: Konsumsi mendekati tingkat rata-ratanya dalam 10 tahun ini.....	8
Gambar A.8: ... dan sama dengan laju pertumbuhan PDB Indonesia saat ini.....	8
Gambar A.9: Di antara sektor-sektor ekonomi utama, sektor manufaktur tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan di Triwulan ke-1.....	9
Gambar A.10: Terlepas dari harga minyak yang berlanjut peningkatannya, harga untuk komoditas utama lainnya di Indonesia sebagian besar stabil.....	10
Gambar A.11: Harga untuk komoditas utama Indonesia pada akhir bulan April 2018 umumnya lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia untuk tahun 2018.....	11
Gambar A.12: Volume ekspor komoditas utama Indonesia	11
Gambar A.13: Pertumbuhan ekspor melambat karena adanya efek dasar yang tinggi di Triwulan ke-1 tahun 2017 dan pertumbuhan ekspor minyak dan gas yang lebih rendah	13
Gambar A.14: Pertumbuhan impor tetap tinggi, didorong oleh impor barang modal yang tinggi.....	13
Gambar A.15: Secara triwulan-ke-triwulan yang disesuaikan secara musiman (seasonally adjusted quarter-on-quarter, sa qoq), pertumbuhan nilai ekspor barang meningkat di Triwulan ke-1 sejalan dengan harga komoditas yang lebih tinggi	14
Gambar A.16: Investasi asing langsung turun lebih rendah di Triwulan ke-1	15
Gambar A.17: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-1	16
Gambar A.18: Gejolak pasar keuangan melonjak semenjak bulan Februari.....	17
Gambar A.19: Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun di seluruh kawasan naik di tengah meningkatnya gejolak pasar keuangan	17
Gambar A.20: Rupiah terdepresiasi di Triwulan ke-1, tetapi menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan di pertengahan Triwulan ke-2.....	19
Gambar A.21: Meskipun mata uang regional juga telah secara riil terdepresiasi di tahun 2018, hanya Rupee India yang mengalami depresiasi yang lebih besar dari Rupiah	19
Gambar A.22: Siklus pelonggaran kebijakan moneter tetap bertahan	19
Gambar A.23: Sektor perbankan tetap sehat	20
Gambar A.24: Total penerimaan, tidak termasuk penerimaan dari AP, meningkat dengan laju tercepat dalam sepuluh tahun terakhir, didorong oleh pajak penghasilan non-Migas dan PPN	21
Gambar A.25: Belanja sosial dan subsidi BBM merupakan kontributor utama peningkatan belanja yang lebih tinggi	23
Gambar A.26: Tidak ada perubahan dalam pelaksanaan secara keseluruhan, tetapi pencairan belanja sosial dan subsidi bahan bakar lebih tinggi	23
Gambar A.27: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih - historis dan perkiraan hingga tahun 2019.....	25
Gambar A.28: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar di tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan melemah	26
Gambar A.29: Tekanan ke atas dari gejolak harga makanan telah menurun karena panen yang berhasil	26
Gambar A.30: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,1 persen dari PDB pada tahun 2018.....	27
Gambar B.1: Peningkatan lama bersekolah di Indonesia sangat mengesankan – menjadi dua kali lipat dalam 25 tahun terakhir.....	31
Gambar B.2: Kualitas pendidikan juga meningkat meskipun terjadi hambatan pada pergantian abad	31
Gambar B.3: Kebanyakan orang Indonesia buta huruf secara fungsional, sangat berbeda dengan Vietnam dan negara-negara OECD	32
Gambar B.4: Reformasi sumber daya manusia dan peningkatan hasil pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang	33
Gambar B.5: Partisipasi sekolah usia 16–18 tahun meningkat untuk semua tingkat penghasilan, tetapi pertumbuhan yang lebih cepat terdata di antara penduduk Indonesia yang lebih miskin	34
Gambar B.6: Nilai PISA Indonesia meningkat dalam konteks peningkatan pesat dalam partisipasi sekolah antara tahun 2003 dan 2015	38
Gambar B.7: Nilai matematika PISA meningkat untuk semua siswa antara tahun 2003 dan 2015, tetapi peningkatan untuk siswa yang lebih miskin lebih kecil	38

Gambar B.8: Menurut kepala sekolah, sekolah di Indonesia kekurangan banyak sumber daya yang penting	39
Gambar B.9: Sumber daya untuk pendidikan telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2001	40
Gambar B.10: Distribusi anggaran pendidikan (2018)	41
Gambar B.11: Indonesia adalah salah satu negara dengan belanja pendidikan terendah di antara peserta PISA	42
Gambar B.12: Kabupaten/kota yang lebih kecil cenderung memiliki kapasitas yang rendah untuk mengelola sistem pendidikan.....	46
Gambar B.13: Sebagian besar kabupaten/kota tidak memenuhi semua SPM, dengan kesenjangan yang lebih besar dalam SPM untuk fasilitas dan infrastruktur di tingkat sekolah, yang menandakan kondisi sekolah yang kurang baik	46
Gambar B.14: Ketika sekolah-sekolah baru bermunculan, rata-rata ukuran sekolah di kabupaten menurun.....	48
Gambar B.15: Sebagian besar guru memiliki gelar sarjana (S1)	49
Gambar B.16: Setengah dari guru pendidikan umum memiliki sertifikasi, dan sejumlah besar guru yang tidak memiliki sertifikasi juga memenuhi syarat untuk sertifikasi.....	49
Gambar B.17: Para guru muda cenderung adalah guru kontrak, yang direkrut melalui prosedur kontrak yang non-standar	50
Gambar B.18: Pengetahuan guru secara keseluruhan rendah, tetapi pengetahuan di antara guru kontrak di sekolah umum lebih rendah lagi.....	51
Gambar B.19: Struktur usia guru	51
Gambar B.20: Nilai dalam Ujian Nasional telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, karena perubahan peraturan dan peningkatan integritas	55
Gambar B.21: Mekanisme peningkatan integritas yang baru mempengaruhi sejumlah sekolah yang sebelumnya memiliki tingkat integritas yang lebih rendah.....	55

LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil	66
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB produksi.....	66
Lampiran Gambar 3: Penjualan mobil dan sepeda motor.....	66
Lampiran Gambar 4: Indikator konsumen.....	66
Lampiran Gambar 5: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI.....	66
Lampiran Gambar 6: Neraca pembayaran	66
Lampiran Gambar 7: Komponen neraca berjalan	67
Lampiran Gambar 8: Ekspor barang	67
Lampiran Gambar 9: Impor barang	67
Lampiran Gambar 10: Cadangan devisa dan arus modal	67
Lampiran Gambar 11: Inflasi	67
Lampiran Gambar 12: Rincian IHK bulanan	67
Lampiran Gambar 13: Perbandingan inflasi beberapa negara	68
Lampiran Gambar 14: Harga beras domestik dan internasional.....	68
Lampiran Gambar 15: Tingkat kemiskinan dan pengangguran	68
Lampiran Gambar 16: Indeks saham regional	68
Lampiran Gambar 17: Nilai tukar dollar AS.....	68
Lampiran Gambar 18: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal	68
Lampiran Gambar 19: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global	69
Lampiran Gambar 20: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito.....	69
Lampiran Gambar 21: Indikator sektor perbankan.....	69
Lampiran Gambar 22: Utang pemerintah	69
Lampiran Gambar 23: Utang luar negeri	69

TABEL

Tabel A.1: Neraca Pembayaran Indonesia (Balance of Payment, BOP).....	12
Tabel A.2: Indikator perekonomian utama	24
Tabel A.3: Bobot tahunan komoditas utama Indonesia dalam keranjang ekspor komoditas.....	25
Tabel A.4: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran lebih rendah daripada di APBN tahun 2018	29
Tabel B.1: Perubahan UUD menetapkan hak atas pendidikan untuk semua penduduk Indonesia	33
Tabel B.2: Karakteristik sekolah menurut kondisi sosial ekonomi	39
Tabel B.3: Pengeluaran Indonesia di sektor pendidikan masih di bawah negara-negara di Asia Timur.....	41
Tabel B.4: Perkiraan distribusi APBN menurut ukuran provinsi	44
Tabel B.5: Kelas, guru, dan siswa – Pendidikan dasar menurut ukuran sekolah	52

Tabel B.6: Ringkasan tindakan utama yang telah dilakukan baru-baru ini	57
--	----

LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah	70
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran.....	70
Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia	71
Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia	72

KOTAK

Kotak A.1: Pertumbuhan konsumsi swasta di Indonesia: menimbulkan kekhawatiran?	6
Kotak B.1: Penyelarasan reformasi kebijakan Indonesia dengan praktik-praktik terbaik internasional	36
Kotak B.2: KIAT Guru: Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Guru melalui Keterlibatan Masyarakat dan Tunjangan Berbasis Kinerja	53
Kotak B.3: Pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Tantangan yang Dihadapi	56

Ringkasan eksekutif

Perekonomi Indonesia terus tumbuh dengan cepat di triwulan pertama tahun 2018, terdorong oleh investasi yang tinggi. Pertumbuhan PDB riil menurun tipis menjadi 5,1 persen pada Triwulan ke-1 tahun 2018, sedikit lebih rendah dari 5,2 persen pada Triwulan ke-4 tahun 2017. Harga komoditas global yang lebih tinggi memacu investasi yang lebih tinggi, terutama investasi permesinan, peralatan, dan kendaraan bermotor. Akibatnya, pembentukan modal tetap bruto bertumbuh sebesar 7,9 persen, yang tercepat dalam lebih dari 5 tahun ini. Pertumbuhan yang lebih tinggi dalam investasi di permesinan juga menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam impor, yang tumbuh lebih dari dua kali laju pertumbuhan ekspor, dan bertindak sebagai penghambat pada pertumbuhan. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi swasta tetap mendatar sebesar 5,0 persen, meskipun terdapat tanda-tanda awal pemulihan penjualan ritel. Pertumbuhan di sisi produksi adalah pertumbuhan yang meluas, dan nilai tambah bruto pada harga produsen dipacu di triwulan ini.

Defisit neraca transaksi berjalan menurun di Triwulan ke-1, disebabkan oleh defisit perdagangan jasa yang menurun tajam. Defisit neraca transaksi berjalan menurun menjadi 2,1 persen dari PDB pada Triwulan ke-1, dari 2,3 persen dari PDB di Triwulan ke-4, sebagian oleh karena masuknya wisatawan asing yang lebih tinggi. Total impor bertumbuh hampir dua kali lebih cepat dibandingkan dengan ekspor tahun ke tahun (*year-on-year*), karena investasi yang padat impor (*import-intensive*) melonjak dan ekspor melambat.

Inflasi menurun di Triwulan ke-1 oleh karena adanya efek dasar (*base effect*). Inflasi IHK menurun menjadi rata-rata 3,3 persen tahun-ke-tahun (*yo*) di Triwulan ke-1 tahun 2018, dan menyentuh rata-rata triwulanan yang terendah sejak Triwulan ke-4 tahun 2016. Inflasi inti juga turun dari rata-rata di Triwulan ke-4 sebesar 3,0 persen menjadi 2,7 persen di Triwulan ke-1. Inflasi IHK yang lebih rendah tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan yang lebih kecil dalam harga perumahan, listrik, gas, dan bahan bakar, oleh karena adanya efek dasar yang tinggi di Triwulan ke-1

tahun 2017 karena adanya kenaikan tarif listrik. Namun demikian, inflasi harga makanan telah mengalami peningkatan.

Belanja pemerintah kembali mengalami peningkatan, tetapi terutama karena adanya peningkatan subsidi bahan bakar dan belanja bantuan sosial. Dalam 4 bulan pertama tahun 2018, penerimaan pemerintah mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai nilai yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Belanja juga melonjak karena subsidi bahan bakar dan belanja bantuan sosial yang lebih tinggi, sementara belanja modal mengalami kontraksi.

Kondisi keuangan global yang lebih ketat dan meningkatnya volatilitas berkontribusi terhadap arus keluar modal dan depresiasi nilai Rupiah.

Dengan adanya normalisasi kebijakan moneter AS yang diproyeksikan akan lebih cepat dari yang diperkirakan, kondisi keuangan global telah mengalami pengetatan yang lebih cepat dari yang diperkirakan, mengakibatkan terjadinya volatilitas di antara negara-negara berkembang dalam beberapa bulan terakhir ini. Pengetatan kebijakan AS telah menyebabkan arus keluar portofolio yang besar, menyebabkan defisit neraca pembayaran sebesar 1,5 persen dari PDB di Triwulan ke-1, pertama kali dalam dua tahun terakhir ini. Karena paparan Indonesia yang relatif tinggi terhadap investor portofolio asing, yang memegang 40 persen dari utang dalam negeri pemerintah Indonesia, nilai imbal hasil obligasi dan nilai Rupiah mendapat tekanan: imbal hasil obligasi Indonesia naik sebesar 21 basis poin di Triwulan ke-1, sementara nilai Rupiah mencapai nilai yang terendah dalam 31 bulan terakhir ini terhadap Dolar Amerika Serikat. Perkiraan defisit transaksi berjalan yang lebih besar terkait dengan pertumbuhan investasi yang lebih cepat juga menekan nilai mata uang¹.

Kerangka kebijakan ekonomi makro yang sehat memberikan penyangga terhadap peningkatan volatilitas global. Kebijakan moneter telah berjalan dengan baik, menjaga suku bunga riil di wilayah positif dan mempertahankan ekspektasi inflasi. Belum lama ini, meskipun inflasi stabil, Bank Indonesia (BI) menaikkan

¹Terdapat tanda-tanda awal yang menunjukkan bahwa aksi jual aset Indonesia telah berkurang dan para investor kembali memasuki

pasar untuk mengambil keuntungan dari harga yang menurun. Lihat Bloomberg (17 April 2018) dan Bloomberg (13 April 2018).

suku bunga sebanyak dua kali, sebesar 25 bps setiap kalinya, untuk memberi signal bagi komitmennya terhadap stabilitas. Cadangan, yang mencapai tingkat tertinggi (*record-level*), dan perjanjian pertukaran bilateral, memungkinkan BI untuk mempertahankan nilai Rupiah, walaupun BI telah menjalankan kebijakan yang selayaknya dengan tidak menargetkan tingkat tertentu untuk nilai mata uang. Selain itu, nilai Rupiah secara efektif tetap 5,3 persen lebih kuat dari pada nilai di bulan Januari 2014, menyusul akibat yang berkepanjangan dari apresiasi riil yang terjadi pasca *Taper Tantrum* (*Taper Tantrum* adalah istilah yang dipakai untuk merujuk lonjakan imbal hasil Obligasi Negara AS di tahun 2013, yang disebabkan oleh pengurangan jumlah uang yang masuk ke dalam sistem ekonomi secara bertahap oleh Bank Sentral AS). Langkah-langkah makroprudensial, terutama yang terkait dengan lindung nilai (*hedging*) terhadap eksposur mata uang asing oleh korporasi, berkontribusi terhadap ketahanan. Meskipun defisit fiskal telah terkendali dengan baik, target konsolidasi fiskal untuk tahun 2019, tahun pemilihan umum, telah ditetapkan sebagai tanda lebih lanjut dari komitmen terhadap stabilitas. Empat peningkatan peringkat kredit dalam dua belas bulan terakhir menguatkan peningkatan lingkungan ekonomi negara, manajemen fiskal, dan kelayakan kredit secara keseluruhan.

Perkiraan perekonomian (*outlook*) tetap positif, tetapi risiko meningkat. Seiring dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian global yang melambat dan arus perdagangan menurun dari level tertingginya² baru-baru ini, pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan mencapai 5,2 persen pada tahun 2018 (Tabel 1). Konsumsi swasta diperkirakan akan sedikit meningkat, sementara pertumbuhan investasi diproyeksikan tetap tinggi, mengingat tingginya harga komoditas yang terus berlanjut. Namun, mengingat sifat investasi yang sarat impor, ekspor bersih akan terus membebani pertumbuhan ekonomi oleh karena pertumbuhan ekspor melambat sejalan dengan menurunnya perdagangan global. Risiko terhadap perkiraan perekonomian cenderung menurun di tengah kondisi moneter yang terus mengetat dan timbulnya volatilitas keuangan yang berpusat di negara-negara berkembang yang lebih rentan, seperti Argentina dan Turki.

Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2018

		2017	2018p
PDB riil	(Perubahan persentase tahunan)	5,1	5,2
Indeks Harga Konsumen	(Perubahan persentase tahunan)	3,8	3,5
Neraca transaksi berjalan	(persen PDB)	-1,7	-2,0
Neraca anggaran Pemerintah	(persen PDB)	-2,5	-2,1

Sumber: BI; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: 2017 hasil aktual; p singkatan dari perkiraan Bank Dunia

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar dengan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi, kondisi perdagangan yang lebih lemah dan pertumbuhan global yang lebih lambat.

Sejalan dengan proyeksi menurunnya harga komoditas menjelang paruh kedua tahun ini dan berlanjutnya peningkatan permintaan dalam negeri, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan melebar. Ekspor diperkirakan akan terus melemah karena pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global diperkirakan akan melambat. Inflasi IHK (*headline inflation*) diperkirakan akan tetap rendah tahun ini dan meningkat di tahun 2019 oleh karena biaya impor yang lebih tinggi terkait dengan harga minyak mentah yang lebih tinggi dan mata uang yang lebih lemah. Penerimaan pemerintah diperkirakan akan meningkat secara bertahap, oleh karena reformasi peningkatan penerimaan, meningkatkan total penerimaan keseluruhan dan meningkatkan ruang fiskal untuk pengeluaran tambahan.

Risiko penurunan (*downside risks*) terhadap perkiraan perekonomian bersifat substansial dan sebagian besar berasal dari sector eksternal, termasuk volatilitas yang terus berlanjut di pasar keuangan dan modal, dan perdagangan global yang lebih lambat. Sementara normalisasi lanjutan kebijakan moneter AS hingga saat ini telah berjalan secara tertib, masih ada risiko signifikan dari volatilitas lebih lanjut di pasar keuangan dan pasar modal global. Kenaikan yang cepat dalam imbal hasil AS telah memicu kesulitan keuangan di Argentina dan Turki. Volatilitas lanjutan seperti itu dapat mengakibatkan biaya pembiayaan meningkat lebih tajam bagi negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, dengan meningkatnya proteksionisme perdagangan, terdapat risiko riil bahwa percepatan perdagangan global baru-

² Bank Dunia/*World Bank* (2018b).

baru ini dapat terhenti, dan membebani ekspor Indonesia dan dengan demikian menghambat pertumbuhan. Peningkatan lebih lanjut dalam langkah-langkah dan sentimen proteksionis dapat mengakibatkan hambatan yang lebih besar dari sektor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Edisi kali ini mencakup topik fokus yang membahas bagaimana 15 tahun reformasi di bidang pendidikan telah membantu meningkatkan hasil pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia, dan juga tantangan-tantangan yang tetap ada.

15 tahun reformasi pendidikan memberikan hasil yang beragam, dimana perluasan akses pendidikan telah signifikan, tetapi kualitas pendidikan masih rendah. Pada tahun 2002, Indonesia memulai serangkaian reformasi kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kedua hal tersebut adalah penentu utama pengembangan sumber daya manusia. Namun demikian, setelah 15 tahun berlangsung, hasil reformasi menjadi beragam. Jumlah siswa yang bersekolah telah tumbuh secara signifikan, tetapi kualitas pembelajaran siswa tetap berada di bawah tingkat negara-negara lain di kawasan. Misalnya, 55 persen anak usia 15 tahun secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10 persen di Vietnam.

Reformasi pendidikan mencakup bidang-bidang yang tepat, tetapi tantangan pelaksanaannya menyebabkan hasil yang tidak merata. Sebagian

besar elemen reformasi tersebut diselaraskan dengan praktik-praktik terbaik internasional dan memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan hasil pendidikan di Indonesia. Reformasi pendidikan mencakup peningkatan pembiayaan untuk pendidikan, peningkatan partisipasi para pelaku lokal dalam tata kelola sektor, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas guru, dan pemastian kesiapan siswa ketika mereka memasuki sekolah. Tantangan-tantangan pelaksanaan yang signifikan menghambat reformasi kebijakan untuk mencapai potensi penuhnya.

Sementara langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, tindakan lebih lanjut sangat diperlukan. Secara khusus, langkah-langkah harus diambil untuk menghentikan ketimpangan dalam hasil belajar siswa, dan untuk mengambil manfaat dari adanya peluang yang disebabkan oleh pensiunnya sejumlah besar guru dalam dekade berikutnya. Rekomendasi utama meliputi: menetapkan dan menegakkan kriteria kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap guru yang mengajar, melengkapi mekanisme pembiayaan yang ada untuk pendidikan dengan transfer yang targetnya ditetapkan dengan baik dan berbasis kinerja untuk sekolah dan kabupaten yang tertinggal, dan meluncurkan kampanye kualitas pendidikan nasional untuk menciptakan kesadaran publik dan tekanan untuk melakukan tindakan yang efektif untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar.

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



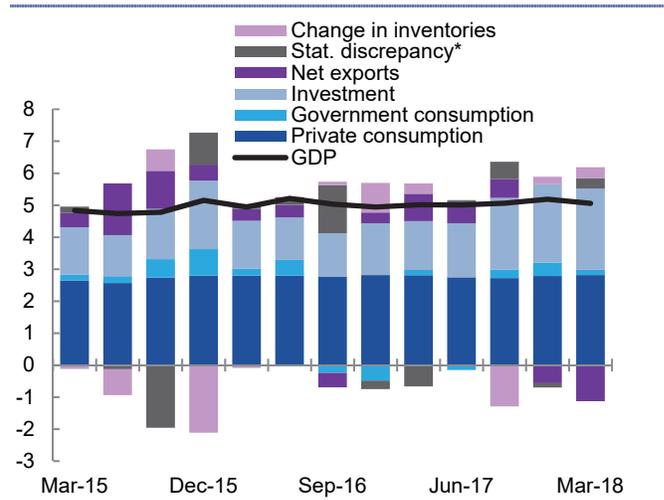
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun di Triwulan ke-1 tahun 2018

Pertumbuhan PDB riil adalah sebesar 5,1 persen di Triwulan ke-1 tahun 2018, sedikit lebih rendah dari 5,2 persen yang tercatat di Triwulan ke-4

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 persen tahun-ke-tahun (yoy) di Triwulan ke-1 tahun 2018. Angka ini lebih lambat dari 5,2 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017, dan juga di bawah perkiraan konsensus sebesar 5,2 persen. Penurunan marjinal dalam pertumbuhan PDB sebagian karena impor tumbuh lebih cepat dari ekspor, serta menurunnya pertumbuhan konsumsi pemerintah (Gambar A.1). Pertumbuhan impor, lebih dari dua kali lipat ekspor, sebagian mencerminkan percepatan pertumbuhan investasi yang paling cepat sejak Triwulan ke-4 tahun 2012. Pertumbuhan konsumsi swasta stabil, sementara pertumbuhan konsumsi

pemerintah menurun dari pertumbuhannya yang lebih tinggi di Triwulan ke-4, yang sebagian disebabkan oleh adanya efek dasar (base effect, pengaruh perubahan harga konsumen dari bulan yang sama tahun sebelumnya pada perubahan dalam inflasi tahunan pada bulan yang sama tahun ini – pent.). Di sisi produksi, sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan (1,0 pp di Triwulan ke-1) seperti yang terjadi di Triwulan ke-4 2018. Namun

Gambar A.1: Ekspor bersih menjadi penghambat pertumbuhan PDB di Triwulan ke-1
(kontribusi bagi pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

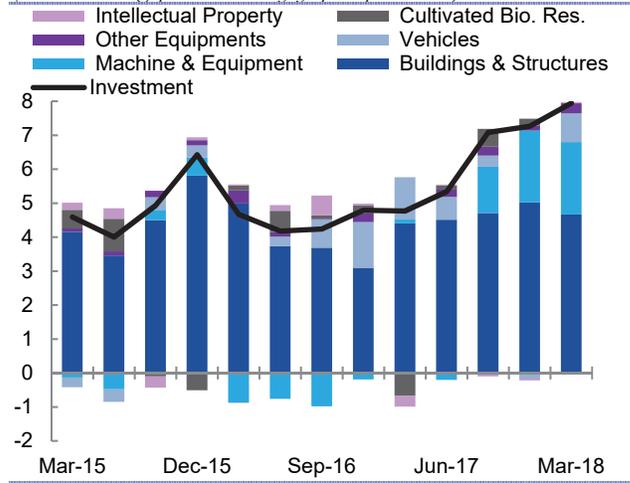
demikian, sektor konstruksi dan transportasi serta komunikasi mengalami pertumbuhan yang paling tinggi.

Secara keseluruhan, pencapaian di Triwulan ke-1 secara umum sama dengan pola yang terlihat di triwulan sebelumnya di mana investasi yang tinggi mendukung pertumbuhan keluaran secara keseluruhan, tetapi juga menyebabkan pertumbuhan impor yang tinggi, sehingga sektor eksternal tersebut memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan.

Pertumbuhan investasi tetap kembali dipacu, yang semakin mendukung pertumbuhan PDB

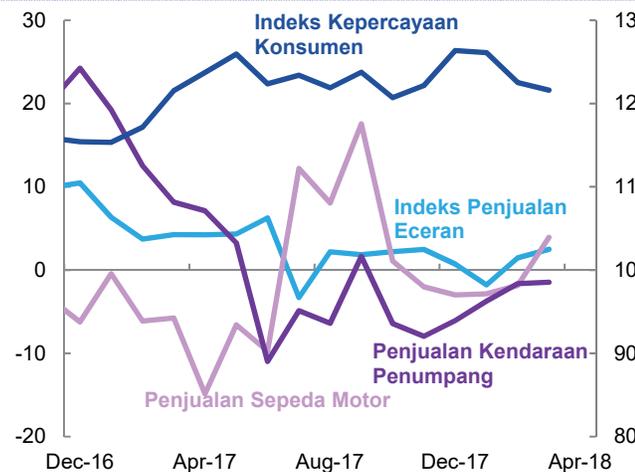
Pembentukan modal tetap bruto sekali lagi adalah merupakan sisi yang positif dari perekonomian, bertumbuh sebesar 7,9 persen yoy di Triwulan ke-1, naik dari 7,3 persen di Triwulan ke-4, sebagian karena tingginya harga komoditas dan aktivitas manufaktur (Gambar A.2). Investasi permesinan dan peralatan mengalami pertumbuhan yang tercepat, naik dari 22,3 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017 menjadi 23,7 persen, sebagian didorong oleh pertumbuhan nominal impor barang modal yang rata-rata sebesar 27 persen di Triwulan ke-1 tahun 2018. Investasi dalam kendaraan kembali mengalami peningkatan dari kontraksi di Triwulan ke-4 tahun 2017, mengalami lonjakan sebesar 14,4 persen di Triwulan ke-1. Sementara pertumbuhan investasi di sektor konstruksi dan struktur yang menurun dari 6,7 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017 menjadi 6,2 persen di Triwulan ke-1 tahun 2018, tetap menjadi komponen investasi yang terbesar (75 persen).

Gambar A.2: Lonjakan investasi di sektor permesinan dan peralatan serta kendaraan bermotor menyebabkan pembentukan modal tetap yang lebih tinggi
(kontribusi bagi pertumbuhan yoy, poin persentase)



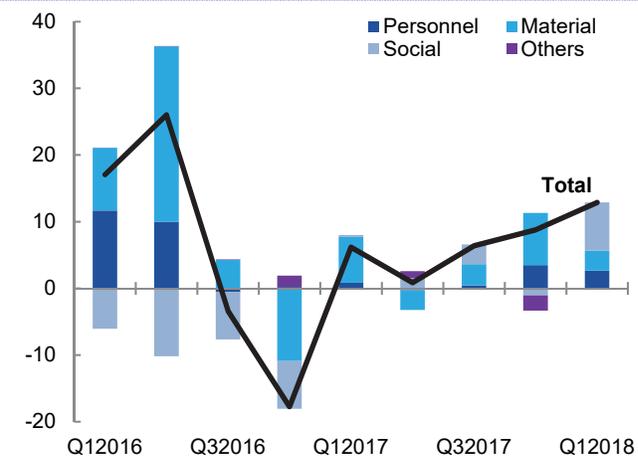
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.3: Indikator frekuensi tinggi untuk konsumsi swasta menunjuk ke gambar yang terbauir
(persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.4: Belanja sosial mendorong naiknya nilai nominal konsumsi pemerintah
(persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Pertumbuhan konsumsi swasta stabil di Triwulan ke-1 sebesar 5,0 persen

Pertumbuhan konsumsi swasta tetap sebesar 5,0 persen, tidak berubah dari Triwulan ke-4. Dalam konsumsi swasta gabungan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga menurun secara marjinal menjadi 4,9 persen dari 5,0 di Triwulan ke-4 tahun 2017. Konsumsi oleh lembaga nirlaba melonjak 8,1 persen di Triwulan ke-1, tetapi tetap hanya sebagian kecil (hanya di bawah 2 persen) dari total konsumsi swasta. Dalam konsumsi rumah tangga, konsumsi makanan dan minuman sekali lagi merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan konsumsi swasta dengan 1,8 pp, tetapi sektor perhotelan dan restoran tumbuh paling tinggi, sebesar 5,6 persen. Tren pertumbuhan konsumsi jasa melampaui pertumbuhan konsumsi barang terus berlanjut di Triwulan ke-1, tetapi marjin di antara tingkat pertumbuhan tersebut telah menyempit menjadi hanya 0,2 poin persentase (dibandingkan dengan rata-rata 0,4 poin persentase selama 3 tahun terakhir).

Sepanjang tahun lalu, keterputusan antara indikator dengan frekuensi yang lebih tinggi, yang biasanya disebut sebagai tolok ukur untuk konsumsi secara keseluruhan dan konsumsi dalam neraca nasional telah menjadi jelas (Kotak A.1). Putusnya hubungan antara indikator konsumsi dengan frekuensi yang lebih tinggi ini berlanjut di Triwulan ke-1. Indikator frekuensi tinggi menunjukkan gambaran yang beragam di Triwulan ke-1 dengan pertumbuhan penjualan sepeda motor dan penjualan eceran yang sedikit meningkat, tetapi kepercayaan konsumen dan pertumbuhan penjualan mobil penumpang sedikit menurun (Gambar A.3). Secara bulanan, tren penurunan dalam penjualan eceran tampaknya telah mencapai titik yang terendah dengan pertumbuhan *yoy* secara konsisten meningkat sejak Januari 2018, mencapai 3,4 persen di bulan April, yang tertinggi dalam 10 bulan. Sub-komponen dari indeks penjualan eceran menunjukkan penguatan berbasis luas, dengan suku cadang kendaraan bermotor dan barang lainnya mencapai pertumbuhan sebesar dua digit dalam beberapa bulan terakhir ini. Singkatnya, pemulihan konsumsi swasta yang diantisipasi ini belum terwujud, dengan data Triwulan ke-1 masih mengisyaratkan beberapa pelemahan di dalam sektor dan perusahaan barang konsumsi, seperti Unilever, yang melaporkan mengalami kerugian³.

Pertumbuhan konsumsi riil pemerintah melambat di Triwulan ke-1, sebagian karena adanya efek dasar yang tinggi di Triwulan ke-4

Pertumbuhan konsumsi riil pemerintah menurun menjadi 2,7 persen *yoy* dari 3,8 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017. Pertumbuhan yang lebih lambat ini sebagian disebabkan oleh pertumbuhan lebih tinggi yang tidak terulang lagi di triwulan sebelumnya, yang dihasilkan dari efek dasar yang terkait dengan pemotongan belanja pemerintah di Triwulan ke-4 tahun 2016. Sebaliknya, nominal konsumsi pemerintah meningkat 12,9 persen di Triwulan ke-1, dibandingkan dengan 8,8 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017. Ini adalah peningkatan triwulanan berturut-turut yang keempat dan laju pertumbuhan nominal yang tercepat sejak Triwulan ke-2 tahun 2016 (Gambar A.4). Peningkatan ini didorong oleh melonjaknya nominal belanja sosial karena pemerintah memutuskan untuk melakukan pembayaran uang muka untuk program asuransi sosial bersubsidi (PBI), serta untuk meningkatkan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH)⁴. Ini adalah peningkatan nominal belanja sosial yang terbesar sejak Triwulan ke-1 tahun 2014.

Kotak A.1: Pertumbuhan konsumsi swasta di Indonesia: menimbulkan kekhawatiran?

Tajuk di berbagai media telah mengeluhkan lemahnya konsumsi swasta, dan menyarankan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkannya. Namun demikian, konsumsi swasta tidaklah melambat, dengan membukukan pertumbuhan yang stabil sebesar sekitar 5,0 persen *yoy* selama 11 triwulan terakhir, dan tetap dekat dengan rata-rata jangka panjangnya dan terus membuntuti pertumbuhan PDB. Akselerasi berkelanjutan dalam konsumsi swasta mensyaratkan untuk dapat mengatasi hambatan struktural di sisi penawaran, yang akan memungkinkan untuk memacu pertumbuhan secara keseluruhan dan dengan demikian konsumsi swasta akan mengikutinya. Upaya untuk memacu konsumsi secara artifisial melalui kebijakan fiskal dan moneter yang

³ <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/unilever-indonesia-reports-declining-sales-and-profit-in-q1-2018/item8753?>

⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/media/9955/apbn-kita-edisi-mei-2018.pdf>

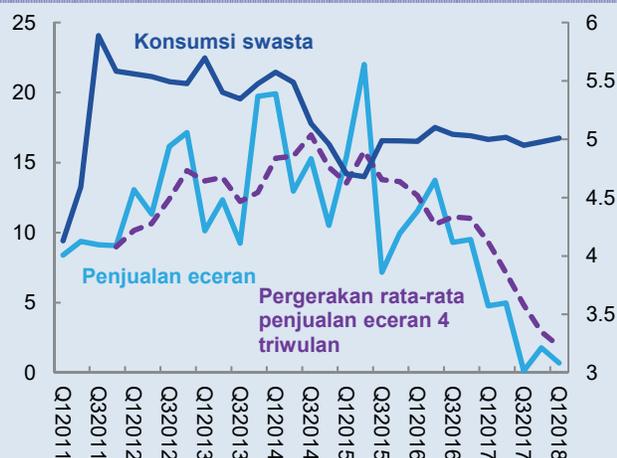
longgar dengan bijak dihindari oleh Pemerintah, karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi makro yang akan merusak pertumbuhan jangka panjang.

1. Persepsi telah diwarnai oleh penjualan eceran yang lemah, yang hanya memberikan pandangan parsial dari konsumsi secara keseluruhan

Persepsi bahwa konsumsi swasta telah melambat dipengaruhi oleh anjloknya pertumbuhan indeks penjualan eceran. Penjualan eceran riil sebelumnya secara konsisten membukukan pertumbuhan sebesar dua digit selama 5 tahun (2012-2016), sebelum tiba-tiba merosot ke rata-rata 2,9 persen pada tahun 2017, dan sejak itu tetap lemah pada 1,4 persen *yoY* di Triwulan ke-1 tahun 2018. Secara historis, penjualan eceran dan konsumsi swasta telah memiliki korelasi (bahkan mungkin berkorelasi kuat). Selama tiga tahun terakhir ini, korelasi di antara keduanya telah jatuh ke titik di mana tampaknya telah terjadi pemisahan total antara pertumbuhan penjualan eceran dengan pertumbuhan konsumsi swasta di dalam neraca nasional (Gambar A.5)

Gambar A.5: Pertumbuhan penjualan eceran tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan konsumsi swasta riil sejak tahun 2015...

(pertumbuhan penjualan eceran, *yoY*, Seb. Kiri; pertumbuhan konsumsi swasta, *yoY*, Seb. Kanan)



Sumber: BPS, Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.6: ... sebagian karena konsumsi telah bergeser sedikit dari barang ke jasa dalam beberapa tahun terakhir

(persen konsumsi)



Sumber: CEIC, BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Ada dua hipotesis tentang mengapa pemisahan tersebut mungkin terjadi. Yang pertama, sebagaimana dicatat di dalam Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia edisi Desember 2017, indeks penjualan eceran hanya mendata konsumsi beberapa barang² dan tidak mendata konsumsi jasa. Sebaliknya, data survei rumah tangga¹, yang menyediakan ukuran konsumsi rumah tangga yang lebih komprehensif, menunjukkan bahwa pangsa dari jasa terhadap pengeluaran rumah tangga telah meningkat sementara pangsa dari barang telah mengalami kontraksi selama 2010-2016 (Gambar A.6). Kedua, indeks penjualan eceran mungkin didorong oleh kinerja beberapa jenis pengecer (yang memberikan data ke BI) yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Meskipun penjualan e-dagang (*e-commerce*), yang tidak dimasukkan oleh BI, masih relatif kecil, dan penjualan e-dagang tersebut bertumbuh dengan pesat. Selain itu, pengecer kecil dan menengah, yang menurut bukti non-ilmiah (*anecdotal evidence*) menunjukkan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi, mungkin tidak cukup tercermin di dalam sampel BI.

Terlepas dari alasan bagi pemisahan tersebut, indeks penjualan eceran tidak mencerminkan gambaran lengkap dari konsumsi swasta riil yang diukur oleh neraca nasional, yang merupakan ukuran yang lebih luas dari kesejahteraan rumah tangga.

2. Pertumbuhan konsumsi swasta telah stabil pada tingkat yang sesuai dengan potensi pertumbuhan PDB Indonesia, sejalan dengan kerangka kebijakan ekonomi makro yang konsisten

Gambar A.7 menunjukkan bahwa konsumsi swasta riil bertumbuh sebesar 5,0 persen *yoY* di tahun 2017, hanya sedikit di bawah pertumbuhan rata-rata tahunan sepuluh tahun ini sebesar 5,1 persen dan jauh di atas rata-rata periode ledakan komoditas yang pertama sebesar 4,1 persen. Hal ini sebagian mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, yang juga berkisar sebesar 5,0 persen sejak tahun 2014. Gambar A.8 menunjukkan bahwa tren pertumbuhan konsumsi swasta telah mengikuti potensi keluaran dalam beberapa tahun terakhir ini.

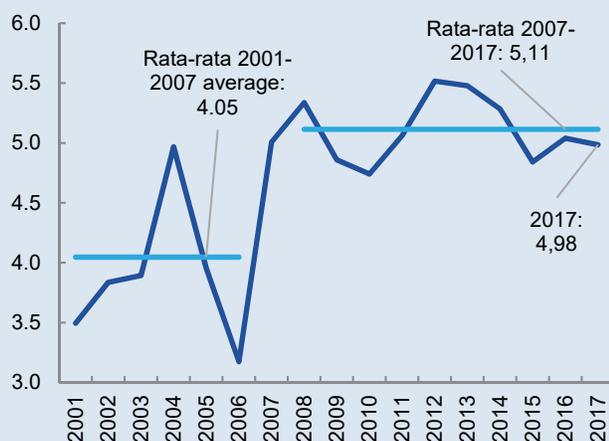
Pertumbuhan konsumsi mungkin dapat dipacu melalui kebijakan fiskal dan moneter yang mampu memberi rangsangan. Analisis *Vector-Auto Regression* (VAR) menegaskan bahwa secara rata-rata³, suku bunga yang lebih rendah, nilai Rupiah yang lebih kuat, dan

inflasi yang lebih rendah mengakibatkan pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi. Namun demikian, stimulus fiskal dan moneter dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi makro karena ekonomi harus memasok barang dan jasa yang diminta oleh konsumen melalui impor (yang menyebabkan defisit transaksi berjalan yang lebih besar), atau pada tingkat harga yang lebih tinggi karena permintaan yang lebih tinggi (yang mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi). Di masa lalu, yang tidak terlalu jauh, kinerja ekonomi Indonesia ditandai oleh ketidakseimbangan (misalnya, defisit transaksi berjalan yang terus-menerus besar) dan tingkat inflasi yang lebih tinggi – serta dengan pertumbuhan konsumsi yang sedikit lebih tinggi.

Sebaliknya, tahun-tahun belakangan ini dicirikan oleh lingkungan ekonomi makro yang baik⁴, yang didukung oleh manajemen ekonomi yang efektif oleh kelompok besar kebijakan ekonomi makro – kebijakan moneter dan fiskal. Bank Indonesia telah dengan cerdas mengelola alat kebijakan utamanya – tingkat suku Bunga kebijakan – sehingga, selama dua tahun terakhir ini, inflasi tetap terkendali di dalam kisaran targetnya, suku bunga riil telah secara konsisten positif, dan nilai Rupiah sangat tahan dalam menghadapi perkembangan ekonomi global utama. Pertumbuhan konsumsi telah dekat dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Gambar A.7: Konsumsi mendekati tingkat rata-ratanya dalam 10 tahun ini...

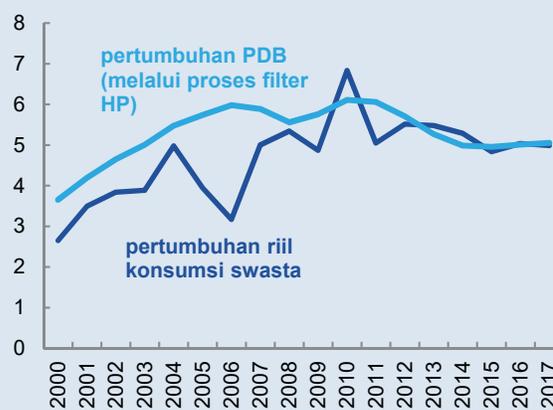
(*pertumbuhan konsumsi swasta riil, yoy, persen*)



Sumber: BPS, Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.8: ... dan sama dengan laju pertumbuhan PDB Indonesia saat ini

(*yoy, persen*)



Sumber: BPS, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Teknik statistik seperti filter HP digunakan untuk memperkirakan potensi tingkat pertumbuhan

3. Implikasi kebijakan: fokus pada hambatan struktural terhadap pertumbuhan dan tingkat konsumsi akan mengikuti

Ketika perekonomian berlangsung mendekati potensinya dan kebijakan ekonomi makro konsisten, yang mendorong pertumbuhan PDB bukanlah pertumbuhan konsumsi swasta. Sebaliknya, pertumbuhan PDB tergantung pada akumulasi sumber daya manusia dan fisik serta pertumbuhan produktivitas. Mengingat besarnya infrastruktur, kesenjangan sumber daya manusia dan produktivitas yang baru-baru ini mulai ditangani, Indonesia telah tumbuh dan mendekati potensi tingkat pertumbuhannya selama beberapa tahun terakhir ini, dan konsekuensi wajarnya adalah pertumbuhan konsumsi swasta (komponen PDB yang terbesar) telah mengikuti tren yang sama. Fokus kebijakan saat ini untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kerangka kerja kebijakan yang konsisten adalah tepat, dan pada kenyataannya dapat berkontribusi pada potensi pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dengan memantapkan reputasi Indonesia untuk manajemen ekonomi makro yang sehat.

Agar pertumbuhan konsumsi meningkat secara berkelanjutan dari pergerakannya yang mendarat saat ini tanpa menciptakan ketidakseimbangan yang berkaitan dengan kebijakan akan memerlukan reformasi di sisi penawaran yang akan meningkatkan potensi tingkat pertumbuhan ekonomi.

¹ Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

² Mulai tahun 2012, survei penjualan eceran Bank Indonesia meliputi: (i) suku cadang dan aksesoris, (ii) makanan, minuman dan tembakau, (iii) bahan bakar kendaraan bermotor, (iv) peralatan dan komunikasi di toko-toko; (v) peralatan rumah tangga lainnya; (vi) kerajinan tangan dan rekreasi dan (vii) barang lainnya.

³ World Bank (Forthcoming/akan terbit)

⁴ Dikutip oleh tiga lembaga pemeringkat kredit utama sebagai alasan utama untuk memberikan peningkatan peringkat Indonesia selama 12 bulan terakhir ini.

Ekspor bersih dikurangkan dari pertumbuhan di Triwulan ke-1

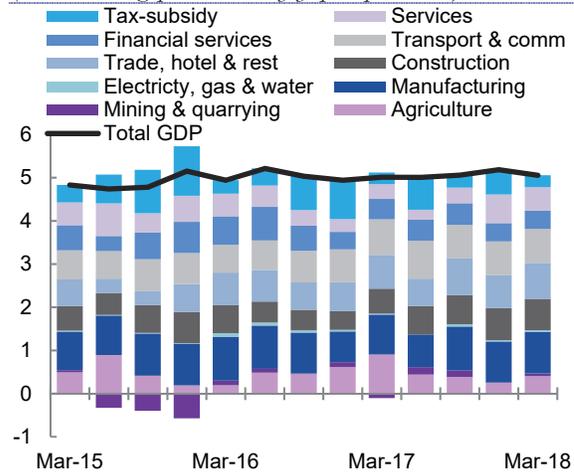
Di tengah peningkatan perdagangan barang global (dalam volume), ke laju pertumbuhannya yang tercepat sejak Triwulan ke-1 tahun 2011, ekspor bersih terus menjadi hambatan bagi pertumbuhan PDB secara keseluruhan di Indonesia karena pertumbuhan impor lebih dari dua kali lipat dari ekspor di Triwulan ke-1. Pertumbuhan impor meningkat menjadi 12,7 persen di Triwulan ke-1, dibandingkan dengan 11,8 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017, sebagian karena investasi yang sarat impor yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekspor menurun menjadi 6,2 persen di Triwulan ke-1 dari 8,5 persen di Triwulan ke-4. Penurunan dalam pertumbuhan ekspor ini terutama disebabkan oleh kontraksi dalam ekspor minyak dan gas, yang hanya diimbangi sebagian oleh peningkatan dalam ekspor jasa. Pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor sejalan dengan tren global yang mengalami pertumbuhan impor yang tinggi, tetapi menurunkan pertumbuhan ekspor.

Di sisi produksi, sektor konstruksi, transportasi dan sektor telekomunikasi mendorong pertumbuhan di Triwulan ke-1

Dalam hal nilai tambah bruto, pertumbuhan adalah sebesar 4,8 persen di Triwulan ke-1 dibandingkan dengan 5,0 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017 (Gambar A.9). Sementara sektor manufaktur memberikan kontribusi yang terbesar (1,0 persentase poin) bagi pertumbuhan di Triwulan ke-1, sektor konstruksi dan transportasi dan komunikasi adalah pendorong pertumbuhan yang utama. Pertumbuhan dalam dua sektor terakhir tersebut adalah sebesar masing-masing 7,4 persen dan 8,6 persen, sementara sektor manufaktur meningkat sebesar 4,5 persen. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya investasi di bidang permesinan dan peralatan, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, pertumbuhan di sektor pertanian berbalik dari arah lintasan ke bawah yang dialami di sepanjang tahun 2017 dan dipacu menjadi 3,2 persen di Triwulan ke-1. Sektor pertambangan dan galian sekali lagi memiliki kontribusi yang paling kecil terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan (0,06 pp) di Triwulan ke-1, dan tumbuh hanya sebesar 0,7 persen. Hasil ini sedikit membingungkan karena berkebalikan dengan lintasan harga komoditas. Namun demikian, secara nominal, kategori pertambangan dan galian berbalik dari tren penurunan yang dialami selama 4 triwulan terakhir. Di Triwulan ke-1, bertumbuh sebesar 5,0 persen dibandingkan dengan 2,9 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017.

Gambar A.9: Di antara sektor-sektor ekonomi utama, sektor manufaktur tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan di Triwulan ke-1

(kontribusi bagi pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

2. Harga komoditas terus meningkat di Triwulan ke-1

The price of Indonesia's commodity basket improved in Q1

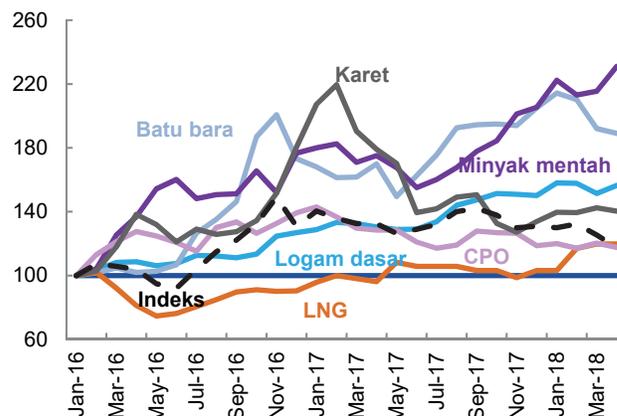
Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan harga komoditas yang dimulai dua tahun lalu, harga untuk sebagian besar komoditas ekspor utama Indonesia terus meningkat di Triwulan ke-1. Harga batu bara, minyak mentah, gas alam cair (LNG), dan logam dasar mencatat pertumbuhan rata-rata yoy sebesar 2,4 persen di Triwulan ke-1 tahun 2018, lebih tinggi hampir 15,0 persen dari pertumbuhan yoy rata-rata yang dialami di Triwulan ke-4 tahun 2017. Sebaliknya, harga karet maupun minyak kelapa sawit mentah (CPO) menurun lebih lanjut sebesar 22,2 persen, melanjutkan tren penurunannya yang dialami di Triwulan ke-4 oleh karena pasokan global yang cukup.

Harga batubara naik rata-rata 25,6 persen yoy di Triwulan ke-1, mencapai nilai tertingginya selama hampir enam tahun ini, jauh lebih tinggi dari peningkatan 5,9 persen yang terlihat di Triwulan ke-4 tahun 2017. Lonjakan harga ini didorong oleh permintaan yang tinggi karena cuaca dingin dan kendala produksi di Tiongkok, ditambah dengan langkanya persediaan dari bahan penggantinya⁵. Namun demikian, keputusan pemerintah Tiongkok untuk membatasi harga impor batubara sebesar sekitar USD 118/mt di bulan Februari⁶ akan membatasi lonjakan harga ke depan. Demikian pula, dengan konsumsi yang tinggi dan persediaan yang terbatas⁷, harga minyak mencapai nilainya yang tertinggi dalam 3,5 tahun ini di Triwulan ke-1, naik 22,0 persen di Triwulan ke-1 tahun 2018, melanjutkan pertumbuhan sebesar 19,6 persen yang terlihat di Triwulan ke-4 tahun 2017. Harga logam dasar meningkat sebesar 18,4 persen karena adanya peningkatan permintaan lebih lanjut, yang sebagian mencerminkan harapan dari permintaan kendaraan listrik yang melimpah dan risiko sanksi dari Rusia. Harga LNG juga naik rata-rata sebesar 18,4 persen di Triwulan ke-1 tahun 2018, karena konsumsi yang tinggi di musim dingin mengurangi tingkat cadangan di semua kawasan utama.

Sebaliknya, harga karet melanjutkan arah lintasannya ke bawah, turun sebesar 31,7 persen di Triwulan ke-1, menyusul penurunan sebesar 15,6 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017. Pasar karet masih kelebihan pasokan karena hasil keluaran tahun lalu yang besar⁸. Pemulihan harga karet mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini karena ekspor global kemungkinan akan meningkat dengan berakhirnya perjanjian antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia baru-baru ini untuk membatasi ekspor sebesar 350.000 metrik ton. Tiga negara ini menyumbang sekitar 70 persen dari produksi global. Bersama dengan minyak nabati lainnya, kelebihan pasokan di Indonesia dan Malaysia masih menekan harga CPO⁹.

Pada bulan April 2018, terlepas dari karet dan minyak kelapa sawit yang menunjukkan tren menurun, harga untuk komoditas lain melanjutkan peningkatannya. Di antara enam komoditas, harga minyak membukukan pertumbuhan tertinggi, naik sebesar 31,9 persen (Gambar A.10).

Gambar A.10: Terlepas dari harga minyak yang berlanjut peningkatannya, harga untuk komoditas utama lainnya di Indonesia sebagian besar stabil
(indeks Januari 2016 = 100)



Sumber: Pink Sheet Bank Dunia; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: LNG singkatan dari *Liquefied Natural Gas* dan CPO singkatan dari *Crude Palm Oil*

⁵ Ketersediaan tenaga listrik dari PLTA yang lemah dan kekurangan gas alam semakin mendorong konsumsi batubara untuk pemanasan dan pembangkit tenaga listrik

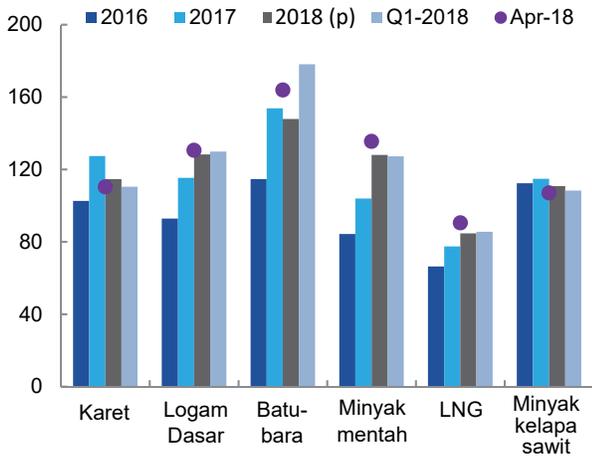
⁶ Pembatasan harga ini dimaksudkan untuk mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi impor batubara. Harga rata-rata batubara selama Triwulan ke-1 tahun 2018 adalah USD 102,4/mt

⁷ Meningkatnya ketegangan geopolitik juga mengancam ekspor minyak di beberapa bidang. Ini termasuk kemungkinan pengenaan kembali sanksi AS terhadap Iran, eskalasi militer di Suriah, dan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Pemotongan pasokan OPEC semakin besar dari yang diperkirakan, karena hilangnya produksi yang tidak direncanakan di Venezuela telah memangkas produksi negara tersebut sebanyak lebih dari setengah juta barel per hari dibandingkan dengan tahun lalu.

⁸ Produksi global mencapai 13,4 juta metrik ton (mmt) pada tahun 2017, naik 9 persen dari tahun 2016. Di sisi lain, konsumsi berada pada 13,1 mmt di akhir tahun 2017, menghasilkan kelebihan pasokan sebesar 0,3 mmt.

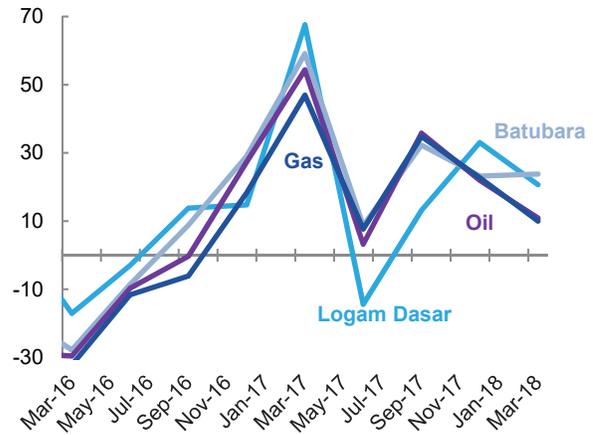
⁹ Perkiraan produksi minyak nabati untuk musim saat ini cukup menjanjikan meskipun ada tantangan dalam bentuk La Nina (Bank Dunia, 2018a)

Gambar A.11: Harga untuk komoditas utama Indonesia pada akhir bulan April 2018 umumnya lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia untuk tahun 2018 (indeks 2015=100)



Sumber: Bank Dunia (2018); perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: p singkatan dari perkiraan

Gambar A.12: Volume ekspor komoditas utama Indonesia (pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: CEIC; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Data untuk ekspor minyak kelapa sawit dan karet pasca 2017 tidak tersedia

Pertumbuhan ekspor komoditas tetap tinggi

Seiring dengan berlanjutnya pemulihan harga komoditas global, ekspor komoditas mentah Indonesia, minyak mentah, batubara, LNG, dan logam dasar, tetap tinggi di Triwulan ke-1, tumbuh rata-rata 20,4 persen, naik dari 15,4 persen di Triwulan ke-4. Hasil yang sangat baik ini dapat terus diraih meskipun efek dasar yang tinggi terjadi di Triwulan ke-1 2017. Semua yang lainnya sama, dan diharapkan pertumbuhan dapat menjadi lebih tinggi di triwulan berikutnya karena efek dasar yang rendah yang teramati di Triwulan ke-2 2017 (Gambar A.12).

Harga komoditas utama Indonesia diperkirakan menurun di tahun 2018

Harga minyak mentah, LNG, dan logam dasar diproyeksikan akan meningkat di tahun 2018 sementara harga batubara, karet, dan minyak kelapa sawit diperkirakan akan menurun (Bank Dunia, 2018a). Harga minyak diperkirakan akan naik ke rata-rata USD 65/bbl di tahun 2018 dari USD 53/bbl di tahun 2017, karena adanya permintaan yang tinggi dan produksi negara-negara OPEC dan non-OPEC terus terhambat, meskipun terjadi peningkatan dalam produksi minyak serpih (*shale oil*) di AS.¹⁰ Harga minyak yang lebih tinggi diharapkan pada akhirnya berakibat pada harga gas alam yang lebih tinggi. Harga batubara diperkirakan turun ke USD 85/mt pada tahun 2018 dari USD 88/mt pada tahun 2017 menyusul kenaikan sebesar hampir 30 persen di tahun 2017. Lemahnya harga batubara sejalan dengan perkiraan permintaan yang melambat, terutama di Tiongkok, di mana inisiatif ramah lingkungan sedang dilakukan untuk

¹⁰ Dalam jangka panjang, harga minyak akan tergantung pada keseimbangan antara naiknya produksi di AS dan kemampuan OPEC untuk terus mengurangi pasokan. Bersama beberapa negara non-OPEC, OPEC akan memutuskan kebijakan mereka selanjutnya pada pertemuan di bulan Juni mendatang. Beberapa negara anggota telah mengusulkan diperpanjangnya pembatasan produksi. Peliknya, harga yang tinggi akan menguntungkan produsen minyak serpih di AS dan mungkin akan berdampak pada makin cepatnya pertumbuhan produksi mereka. Ketegangan politik juga akan mempengaruhi harga minyak. Sanksi terhadap Iran akan menurunkan pasokan minyak dunia sebesar kurang lebih 1 juta barrel per hari. Demikian pula ketegangan perdagangan dunia akan mungkin berdampak terhadap permintaan terhadap minyak diesel (yang merupakan bahan bakar kapal tanker).

mengurangi konsumsi batubara^{11,12}. Harga logam diproyeksikan meningkat sebesar 9 persen di tahun 2018¹³ (Gambar A.11).

3. Defisit neraca transaksi berjalan menyusut karena impor barang modal yang lebih tinggi diimbangi oleh defisit perdagangan jasa yang lebih rendah

Defisit neraca transaksi berjalan sedikit menyusut di Triwulan ke-1

Defisit neraca transaksi berjalan sedikit menyusut menjadi 2,1 persen dari PDB di Triwulan ke-1, dari 2,3 persen PDB di Triwulan ke-4 tahun 2018, didukung oleh defisit perdagangan jasa yang lebih kecil dan defisit neraca penerimaan, yang hanya diimbangi sebagian oleh surplus perdagangan barang yang lebih kecil (Tabel A.1). Dalam hal perdagangan secara total, impor meningkat hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Total ekspor tumbuh sebesar 10,2 persen yoy di Triwulan ke-1, lebih lambat dari peningkatan sebesar 12,1 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017, sebagian karena adanya efek dasar yang tinggi, karena ekspor telah tumbuh sebesar 23,4 persen di Triwulan ke-1 tahun 2017. Sebaliknya, pertumbuhan total impor meningkat menjadi 19,5 persen di Triwulan ke-1 dari 18,9 persen di triwulan sebelumnya.

Pada perdagangan barang, sementara pertumbuhan impor dan ekspor melambat di Triwulan ke-1, pertumbuhan impor jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekspor. Sebaliknya, baik ekspor maupun impor jasa melonjak di Triwulan ke-1; ekspor jasa tumbuh sebesar 18,8 persen dan impor jasa meningkat sebesar 18,3 persen. Ekspor jasa yang lebih tinggi sebagian karena meningkatnya kedatangan wisatawan asing, sementara pertumbuhan impor jasa didorong oleh lonjakan dalam jasa terkait transportasi. Perbaikan pada defisit neraca penerimaan didorong oleh pengiriman uang dari luar negeri yang lebih tinggi menjelang bulan puasa dan Lebaran.

Tabel A.1: Neraca Pembayaran Indonesia (Balance of Payment, BOP)

(USD milyar kecuali dinyatakan lain)

	Q1-2017	Q2-2017	Q3-2017	Q4-2017	Q1-2018
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	4,5	0,7	5,4	1,0	(3,9)
Nominal PDB	241,8	252,9	262,9	257,9	258,2
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	1,9	0,3	2,0	0,4	(1,5)
Transaksi Berjalan	(2,2)	(4,7)	(4,6)	(6,0)	(5,5)
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	(0,9)	(1,9)	(1,8)	(2,3)	(2,1)
Neraca perdagangan barang	5,6	4,8	5,3	3,1	2,4
Neraca perdagangan jasa	(1,2)	(2,2)	(2,1)	(2,3)	(1,4)
Penerimaan	(6,6)	(7,3)	(7,8)	(6,8)	(6,5)
Transaksi Modal dan Finansial	6,9	5,5	10,2	6,8	1,9
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	2,9	2,2	3,9	2,7	0,7
Investasi Langsung	2,8	4,5	7,6	4,3	3,1
Investasi Portofolio	6,5	8,1	4,0	2,0	(1,2)
Investasi Lainnya	(2,4)	(7,1)	(1,4)	0,7	(0,2)

Sumber: BI; perkiraan staf Bank Dunia

¹¹Konsumsi batubara menghadapi penurunan struktural jangka panjang di beberapa wilayah konsumsi baik karena alasan ekonomi maupun kebijakan. Di Amerika Serikat, gas alam berharga rendah telah mengurangi penggunaan batubara di pembangkit listrik, dan menyebabkan terjadinya penurunan investasi dalam pasokan batubara. Tiongkok berinvestasi pada sumber energi yang lebih bersih, mereformasi sektor kelistrikan untuk mengurangi produksi yang tidak efisien, dan mengurangi intensitas energi dari perekonomiannya — semuanya dengan mengorbankan batubara. Beberapa negara Eropa berencana untuk mengakhiri konsumsi batubara selama dekade berikutnya, dan India berusaha untuk mencapai konsumsi batubara puncaknya selama periode yang sama

¹²Risiko yang menguntungkan dan merugikan dibahas lebih lanjut secara rinci dan dapat ditemukan di Perkiraan Pasar Komoditas Bank Dunia yang terbaru, yang tersedia di <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>. Para pembaca juga dapat mengacu pada the 2017 Outlook World Energy (IEA, 2017) untuk skenario permintaan dan pasokan energi di masa depan.

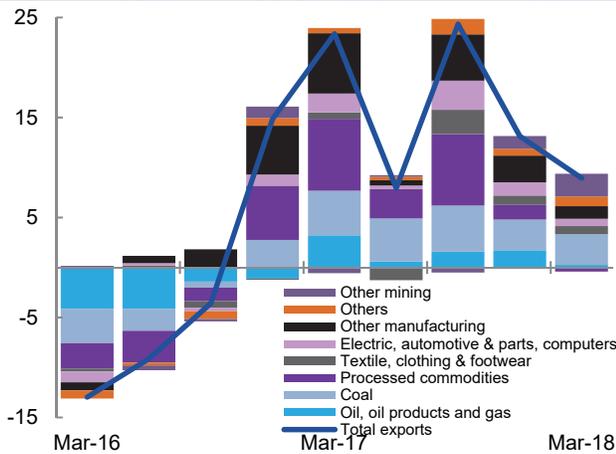
¹³Risiko yang menguntungkan terhadap perkiraan harga termasuk permintaan global yang lebih tinggi, serta turunnya produksi. Pasokan dapat dibatasi oleh peningkatan kapasitas baru yang lebih lambat, kendala lingkungan yang lebih ketat, sanksi terhadap produsen komoditas, meningkatnya biaya, dan langkah kebijakan yang membatasi produksi dan ekspor, terutama di Tiongkok. Risiko yang merugikan termasuk pertumbuhan yang lebih lambat di Tiongkok, risiko produksi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan — termasuk mulai berproduksinya kembali kapasitas yang tidak aktif — serta mengurangi kebijakan pembatasan produksi di Tiongkok, dan eskalasi ketegangan perdagangan.

Surplus perdagangan barang menyusut di Triwulan ke-1

Neraca perdagangan barang menyusut menjadi 0,9 persen dari PDB di Triwulan ke-1, dari 1,2 persen dari PDB di Triwulan ke-4. Pertumbuhan impor barang sedikit melemah menjadi 19,7 persen di Triwulan ke-1, dari 20,8 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017. Sementara itu, pertumbuhan ekspor barang menurun secara substansial menjadi 8,9 persen di Triwulan ke-1, dari 13,1 persen di Triwulan ke-4 2017. Penurunan dalam pertumbuhan ekspor barang ini sebagian disebabkan karena tingginya efek dasar yang teramati di Triwulan ke-1 tahun 2017, dan kontraksi ekspor komoditas utama seperti minyak dan produk-produk minyak¹⁴, minyak kelapa sawit, dan karet olahan.

Gambar A.13: Pertumbuhan ekspor melambat karena adanya efek dasar yang tinggi di Triwulan ke-1 tahun 2017 dan pertumbuhan ekspor minyak dan gas yang lebih rendah

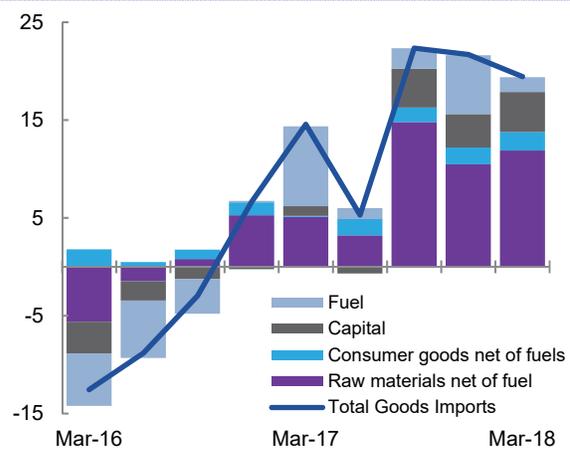
(kontribusi bagi pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Kategori 'manufaktur lainnya' termasuk kertas, bahan kertas, furnitur, plastik, makanan olahan, bahan kimia, dan barang 'lainnya'

Gambar A.14: Pertumbuhan impor tetap tinggi, didorong oleh impor barang modal yang tinggi

(kontribusi bagi pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia

Pelambatan pertumbuhan ekspor barang di Triwulan ke-1 merata

Dibandingkan dengan Triwulan ke-4 tahun 2017, pertumbuhan ekspor barang yoy di Triwulan ke-1 2018 melambat di hampir semua kategori kecuali untuk produk pertanian, kayu olahan dan logam, plastik, dan beberapa produk pertambangan. Ekspor batubara¹⁵, produk manufaktur lainnya (yang termasuk kertas dan produk kertas, serta makanan olahan), tekstil dan kendaraan bermotor, khususnya, mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi (Gambar A.13). Kontraksi ekspor minyak kelapa sawit dan karet olahan berkontribusi pada kontribusi negatif dari kategori komoditas olahan. Namun demikian, hal ini sudah diperkirakan, karena pasokan global yang cukup serta larangan oleh Uni Eropa terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia¹⁶. Kontraksi juga terjadi pada ekspor minyak dan produk-produk minyak. Meskipun ada efek dasar yang tinggi di Triwulan ke-1 tahun 2017, namun kontraksi tidak sejalan dengan harga minyak yang secara signifikan lebih tinggi, yang teramati dalam beberapa bulan terakhir dan *lifting* minyak (jumlah minyak yang dipompa ke permukaan – pent.) yang relatif tinggi¹⁷. Meskipun ekspor gas tumbuh lebih tinggi di Triwulan ke-1 dibandingkan dengan Triwulan ke-

¹⁴ Produk-produk minyak, kecuali minyak mentah, termasuk produk-produk yang berasal dari proses pengilangan.
¹⁵ Pengiriman batubara dilaporkan turun secara signifikan untuk India, Jepang dan Korea Selatan. Ketiga negara tersebut menyerap hampir separuh pasar ekspor batubara Indonesia. Namun demikian, sebagian ekspor ditujukan ke Tiongkok.
¹⁶ Lihat pembahasan di Bagian A.2 mengenai komoditas.
¹⁷ Satuan kerja khusus yang mengawasi kegiatan hulu minyak dan gas di Indonesia (SKK Migas) mengumumkan bahwa *lifting* minyak dan gas di Triwulan ke-1 telah mencapai 94 persen dari target yang ditetapkan di dalam APBN. Di sisi lain, Bank Indonesia (2018) menjelaskan bahwa angka *lifting* minyak tersebut telah terganggu oleh cuaca buruk yang mengganggu transportasi minyak.

4, kategori ekspor minyak, produk minyak, dan gas pertumbuhannya masih yang paling kecil sejak setahun yang lalu. Terlepas dari ekspor yang ditujukan untuk Tiongkok¹⁸, Jepang¹⁹, Singapura²⁰, dan Thailand²¹, ekspor ke sisa dari sepuluh negara tujuan utama mencatat pertumbuhan lebih lambat dibandingkan dengan di Triwulan ke-4 tahun 2017. Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Thailand, di samping Amerika Serikat, India, Korea Selatan, Belanda, Filipina, dan Malaysia menyumbang hampir 70 persen dari ekspor Indonesia pada tahun 2017, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016.

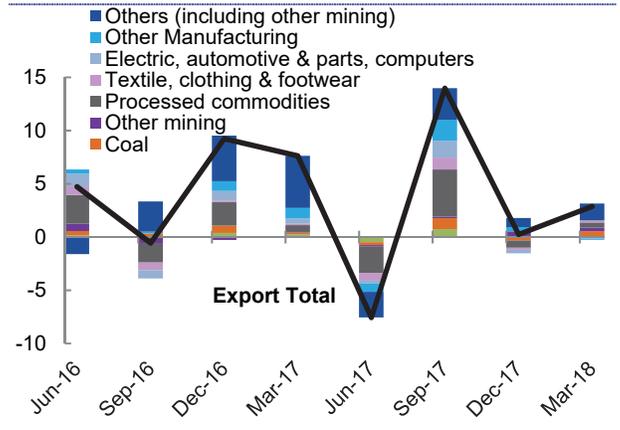
Secara triwulan-ke-triwulan yang disesuaikan secara musiman (*seasonally adjusted quarter-on-quarter, sa qoq*), pertumbuhan nilai ekspor barang menguat di Triwulan ke-1, sejalan dengan harga komoditas yang lebih tinggi

Secara triwulan-ke-triwulan (*quarter-on-quarter, qoq*) yang disesuaikan secara musiman, yang meniadakan efek dasar yang tinggi dari ekspor barang di Triwulan ke-1 2017, pertumbuhan nilai ekspor barang menguat di Triwulan ke-1 (Gambar A.15). Pertumbuhan ekspor barang menguat menjadi sebesar 2,9 persen *sa qoq* di Triwulan ke-1 dari pertumbuhan yang sangat kecil sebesar 0,2 persen di Triwulan ke-4. Sejalan dengan harga komoditas global yang lebih tinggi, kontribusi terhadap pertumbuhan *qoq* didorong oleh ekspor komoditas yang tinggi; yaitu batubara dan komoditas olahan dan lainnya, yang meliputi produk-produk pertambangan lainnya. Sebaliknya, ekspor barang-barang manufaktur relatif menurun di sepanjang triwulan tersebut.

Pelambatan pertumbuhan impor barang terkonsentrasi pada barang konsumsi dan bahan bakar minyak

Pertumbuhan impor barang secara *yoq* sedikit menurun sebagian disebabkan karena pertumbuhan impor bahan bakar minyak dan barang konsumsi yang menurun (Gambar A.14). Menurunnya impor bahan bakar minyak, meskipun tidak lazim mengingat harga minyak yang tinggi, sebagian disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak dan produk minyak²². Pertumbuhan impor barang konsumsi menurun jauh dibandingkan dengan Triwulan ke-4 tahun 2017, dengan impor beras, senjata, dan amunisi serta kosmetik menjadi yang paling signifikan. Sebaliknya, impor barang modal tetap tinggi, melonjak ke 26,8 persen di Triwulan ke-1 tahun 2018 dari 19,8 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017, didorong oleh impor untuk mesin pengolahan data dan suku cadang untuk perangkat telepon seluler. Berlanjutnya impor barang modal yang tinggi ini sejalan dengan pertumbuhan investasi yang tinggi yang dibahas di Bagian A.1.

Gambar A.15: Secara triwulan-ke-triwulan yang disesuaikan secara musiman (*seasonally adjusted quarter-on-quarter, sa qoq*), pertumbuhan nilai ekspor barang meningkat di Triwulan ke-1 sejalan dengan harga komoditas yang lebih tinggi
(kontribusi bagi pertumbuhan *sa qoq*, persen)



Sumber: CEIC, perhitungan staf Bank Dunia

¹⁸ Terutama didorong oleh ekspor batubara dan logam mulia.

¹⁹ Didorong oleh ekspor peralatan listrik dan tembaga mentah.

²⁰ Pendorong utamanya adalah ekspor produk kimia dan makanan olahan.

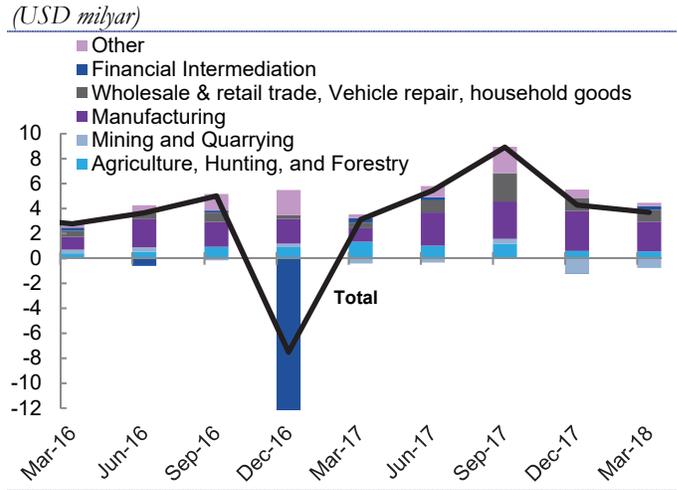
²¹ Ekspor batubara, suku cadang kendaraan bermotor, dan logam olahan (non-mulia) mendorong pertumbuhan.

²² Sebagai suatu hal yang umum bahwa dalam proses produksi, barang masukan dan barang keluaran berada dalam kategori yang sama. Untuk alasan inilah negara-negara cenderung mengimpor barang-barang dari kategori yang sama dengan barang-barang yang diekspor, di mana impor dipergunakan sebagai masukan untuk menghasilkan barang yang diekspor.

Surplus neraca keuangan menyusut di Triwulan ke-1

Di tengah berlanjutnya pengetatan moneter dan gejolak keuangan di antara beberapa negara berkembang, surplus transaksi modal dan finansial turun menjadi 0,7 persen dari PDB (USD 1,9 miliar) dari 2,7 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017. Investasi langsung menurun dan investasi portofolio mencatat arus keluar bersih asing sebesar USD 1,2 miliar—setara dengan hampir 60 persen dari arus masuk bersih di Triwulan ke-4 2017. Arus investasi portofolio bersih di Triwulan ke-1 didorong oleh penurunan arus masuk asing bersih yang signifikan (yang terendah sejak Triwulan ke-4 tahun 2016) pada obligasi berdenominasi Rupiah, investor asing yang menjual kepemilikan mereka atas ekuitas Indonesia, dan berlanjutnya peningkatan pembelian aset luar negeri oleh penduduk Indonesia sejak tahun lalu.

Gambar A.16: Investasi asing langsung turun lebih rendah di Triwulan ke-1



Sumber: CEIC; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Data untuk ekspor minyak kelapa sawit dan karet pasca 2017 tidak tersedia. Logam dasar tidak dimasukkan karena sifat dari ekspor logam dasar ini mudah berubah yang disebabkan oleh perubahan peraturan sektor

Dominasi arus keluar portofolio di Triwulan ke-1 menyebabkan Neraca Pembayaran (BOP) mengalami defisit yang pertama sejak Triwulan ke-1 tahun 2016

Investasi asing langsung bersih (*foreign direct investment*, FDI) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang tercatat di Triwulan ke-4 tahun 2017. Sektor manufaktur, perdagangan grosir dan eceran, pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor intermediasi keuangan adalah penerima utama investasi langsung di Triwulan ke-1 (Gambar A.16). Dalam hal aliran modal bersih, aliran modal bersih di Triwulan ke-1 adalah yang terkecil, sebesar USD 1,8 miliar, setidaknya dalam 4 tahun terakhir ini. Ini adalah triwulan kedua berturut-turut di mana aliran modal bersih menurun dari triwulan sebelumnya yang mencerminkan sentimen investor yang disebabkan oleh berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS. Dengan defisit transaksi berjalan yang sedikit lebih kecil yang kemudian diimbangi oleh surplus transaksi modal dan finansial yang jauh lebih kecil, neraca pembayaran Indonesia mencatat defisit sebesar 1,5 persen dari PDB di Triwulan ke-1 tahun 2018, dibandingkan dengan surplus sebesar 0,4 persen dari PDB di Triwulan ke-4 2017. Ini adalah defisit Neraca Pembayaran (BOP) yang pertama setelah periode surplus selama tujuh triwulan berturut-turut. Cadangan internasional turun menjadi 126,0 miliar dolar AS di akhir Triwulan ke-1, lebih rendah dari cadangan yang ada di Triwulan ke-3 dan Triwulan ke-4 tahun 2017, namun masih berada di atas level terendahnya, sehingga secara signifikan telah meningkatkan kemampuan BI untuk mendukung nilai Rupiah jika diperlukan. Cadangan ini cukup untuk membiayai pembayaran utang luar negeri pemerintah dan impor selama 7,7 bulan.

4. Inflasi IHK terus menurun

Tekanan inflasi menurun lebih lanjut di Triwulan ke-1 sebagian besar didukung oleh harga rumah dan utilitas yang lebih rendah

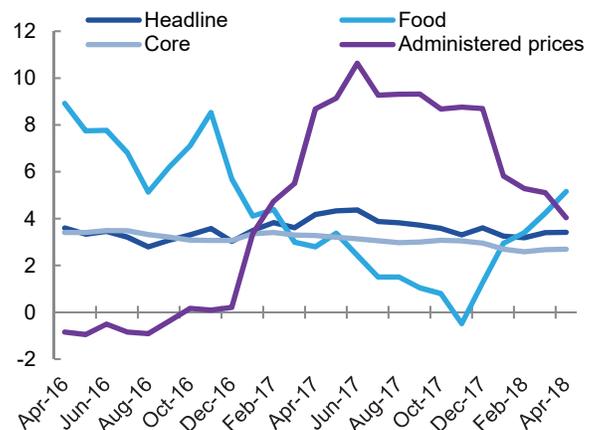
Inflasi IHK menurun menjadi rata-rata 3,3 persen yoy di Triwulan ke-1 tahun 2018, yang terendah sejak Triwulan ke-4 tahun 2016, dari rata-rata 3,5 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017 (Gambar A.17). Inflasi IHK yang lebih rendah sebagian besar disebabkan oleh peningkatan yang jauh lebih kecil pada harga rumah, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 3,8 persen di Triwulan ke-1, dari 5,2 persen di Triwulan ke-4, yang disebabkan oleh adanya efek dasar, yang disebabkan oleh kenaikan tarif listrik di paruh pertama tahun 2017. Inflasi untuk transportasi, komunikasi, dan keuangan juga secara signifikan menurun menjadi 1,6 persen di Triwulan ke-1 dari 4,5 persen pada Triwulan ke-4 2017^{23,24}. Penurunan lebih lanjut dari inflasi IHK di Triwulan ke-1 sebagian diimbangi oleh harga beras yang lebih tinggi, karena kurangnya pasokan²⁵ dan kekhawatiran mengenai apakah jumlah impor akan cukup dan tepat waktu untuk mencegah harga yang lebih tinggi. Namun demikian, tekanan naik lebih lanjut pada harga makanan kemudian mereda karena datangnya beras impor dan musim panen yang dimulai di bulan Maret dan April.

Secara bulanan, inflasi IHK di bulan April tidak berubah dibandingkan dengan bulan Maret, sebesar 3,4 persen yoy, masih dalam kisaran target BI sebesar 2,5 persen sampai dengan 4,5 persen. Inflasi stabil meskipun terjadi penyesuaian naik harga bensin oleh Pertamina di akhir bulan Februari (untuk RON 92 dan RON 95) dan di akhir Maret (untuk RON 90)^{26,27}.

Inflasi inti juga menurun

Dalam hal komponen utama inflasi IHK, inflasi inti, yang tidak termasuk komponen harga barang bergejolak dan yang diatur pemerintah, menurun lebih lanjut menjadi 2,7 persen yoy di Triwulan ke-1 dari rata-rata Triwulan ke-4 sebesar 3,0 persen. Angka tersebut merupakan rata-rata triwulanan yang terendah dalam catatan, karena ekonomi berjalan sedikit di bawah potensinya. Secara bulanan, inflasi inti telah meningkat dari 2,6 persen di bulan Februari menjadi 2,7 persen di bulan Maret dan April.

Gambar A.17: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-1
(perubahan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Harga makanan adalah rata-rata tertimbang dari komponen harga bahan makanan dan makanan olahan dari IHK

²³ Harga minyak yang lebih tinggi yang terus berlanjut akan memberikan tekanan ke atas terhadap inflasi IHK secara keseluruhan, terlepas dari adanya pengumuman yang terbaru oleh pemerintah untuk menjaga harga bahan bakar tidak berubah yang akan mengurangi sebagian dari dampak tersebut.

²⁴ Inflasi yang lebih rendah untuk transportasi dan komunikasi sebagian karena adanya efek dasar: biaya administrasi yang lebih tinggi untuk pendaftaran kendaraan bermotor yang dipungut sejak Januari 2017 mengakibatkan biaya transportasi yang lebih tinggi. Diperkirakan tidak ada penyesuaian biaya administratif di tahun 2018.

²⁵ Musim panen datang satu bulan lebih lambat dari biasanya di Triwulan ke-1 karena masalah hama dan banjir di beberapa provinsi utama penghasil beras.

²⁶ Dampak naiknya inflasi dari penyesuaian harga bahan bakar minyak biasanya dirasakan dalam 7-21 hari. Lihat: Liputan 6 (2 April 2018).

²⁷ Pemerintah mengumumkan bahwa semua distributor bensin di negeri itu, termasuk raksasa energi milik negara, Pertamina, Royal Dutch Shell yang berbasis di Belanda, dan Total SA Prancis, akan memerlukan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum menaikkan harga bensin. Lihat Bloomberg (09 April 2018).

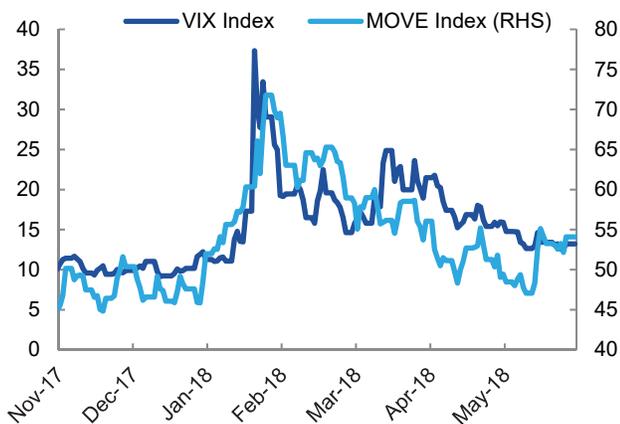
Sebagian besar karena inflasi harga makanan yang tinggi, inflasi barang-barang yang bergejolak rata-rata sebesar 3,3 persen di Triwulan ke-1 2017, peningkatan yang cukup besar dari rekor terendah sebesar 0,9 persen di Triwulan ke-4 tahun 2017. Di sisi lain, setelah naik rata-rata 8,7 persen di Triwulan ke-4, inflasi harga barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*) jatuh ke rata-rata triwulanan sebesar 5,4 persen di Triwulan ke-1 tahun 2017, terendah dalam setahun, karena adanya efek dasar kenaikan harga listrik di paruh pertama tahun 2017.

5. Imbal hasil obligasi meningkat di 5 bulan pertama tahun 2018 ketika Amerika Serikat terus menormalisasi kebijakan moneternya

Gejolak pasar keuangan global melonjak di bulan Februari oleh karena berita pasar tenaga kerja AS yang kuat

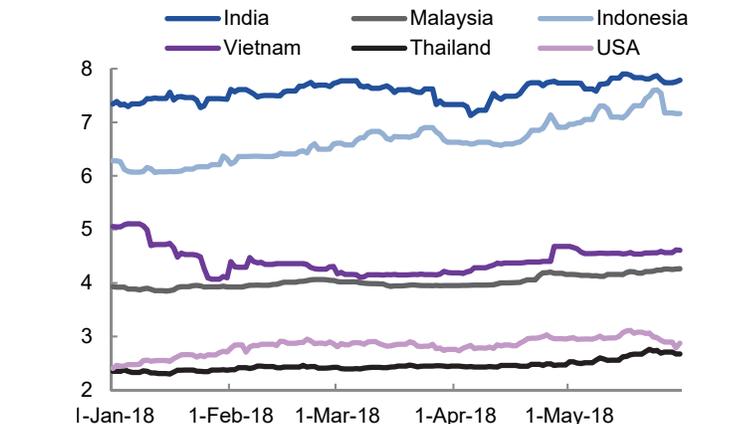
Gejolak pasar keuangan telah melonjak semenjak bulan Februari karena pasar tenaga kerja AS bertambah sebanyak 200.000 pekerjaan dan upah kerja naik pada laju tercepatnya dalam lebih dari 8 tahun ini (Gambar A.18)²⁸. Berita mengenai pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan ini mendorong kekhawatiran investor akan inflasi yang lebih tinggi, dan berakibat pada laju normalisasi kebijakan moneter AS yang lebih cepat dari perkiraan. Meningkatnya gejolak ini, bersama dengan perkiraan imbal hasil obligasi AS yang lebih tinggi dan nilai dolar AS yang lebih kuat yang terkait dengan normalisasi itu, telah mendorong investor keluar dari pasar negara-negara sedang berkembang dan dialihkan ke aset *safe haven* (aset yang digunakan sebagai pelarian di saat kondisi ekonomi global dianggap sedang tidak aman, mis. emas, dan tanah – pent.) tradisional. Baru-baru ini, kesulitan keuangan di antara negara-negara pasar berkembang yang lebih rentan seperti Argentina dan Turki, juga membebani sentimen investor untuk aset negara-negara sedang berkembang.

Gambar A.18: Gejolak pasar keuangan melonjak semenjak bulan Februari
(persen)



Sumber: Bloomberg
Catatan: Indeks VIX mengukur gejolak di pasar ekuitas AS, sementara indeks MOVE mengukur gejolak di pasar obligasi AS

Gambar A.19: Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun di seluruh kawasan naik di tengah meningkatnya gejolak pasar keuangan
(persen)



Sumber: www.investing.com; perhitungan staf Bank Dunia

Berbeda dengan tahun 2017, imbal hasil obligasi sejauh ini cenderung meningkat di tahun 2018

Imbal hasil obligasi Indonesia, secara rata-rata dan di semua tenor, naik 21 basis poin di Triwulan ke-1, berkebalikan dengan penurunan rata-rata sebesar 16 basis poin di Triwulan ke-4 tahun 2017 (Gambar A.19). Imbal hasil pada obligasi Indonesia dengan tenor 10 tahun mengakhiri Triwulan ke-1 pada tingkat sebesar 6,9 persen, hanya sedikit lebih tinggi dari 6,6 persen di akhir Triwulan ke-4 tahun 2017. Kenaikan imbal hasil ini secara umum sejalan dengan negara-negara lain di kawasan, dan sebagian mencerminkan efek dari kebijakan normalisasi moneter AS yang dilakukan lebih cepat dari perkiraan dan terkait tren peningkatan imbal hasil obligasi AS dengan

²⁸ Barrons (2 Februari 2018).

tenor 10 tahun. Obligasi Indonesia terus menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

Imbal hasil obligasi sejauh ini terus meningkat di Triwulan ke-2, dengan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun mencapai puncaknya sebesar 7,6 persen pada tanggal 24 Mei, sebelum secara signifikan menurun dengan kebijakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan tanda-tanda awal lainnya yang menunjukkan bahwa investor kembali untuk mengambil keuntungan dari aset Indonesia dengan potongan harga²⁹.

Sebagai bukti lain bagi peningkatan kelayakan kreditnya, utang Pemerintah Indonesia mengalami peningkatan peringkat kredit lagi pada tanggal 12 April 2018. Moody meningkatkan peringkat utang Indonesia menjadi Baa2 dengan prospek yang stabil. Ini adalah peningkatan peringkat yang keempat bagi Indonesia oleh lembaga pemeringkat kredit utama selama 12 bulan terakhir³⁰, dan menempatkan Indonesia dalam kategori yang sama dengan penilaian Fitch dan pada tingkat yang sama dengan para pesaing regional seperti India dan Filipina. Peningkatan peringkat tersebut tidak memberi dampak yang besar dengan hanya sedikit menurunnya imbal hasil obligasi 10 tahun (dengan 3 basis poin) dan nilai Rupiah menguat 0,1 persen di awal hari perdagangan berikutnya³¹.

Rupiah terdepresiasi pada Triwulan ke-1 secara nominal dan riil, sejalan dengan mata uang negara-negara sedang berkembang lainnya

Ketika normalisasi kebijakan moneter AS diproyeksikan untuk dipercepat, kondisi keuangan global telah menegang lebih cepat dari yang diperkirakan, mengakibatkan gejolak di antara negara-negara pasar berkembang dalam beberapa bulan terakhir, karena investor mencari aset *safe-haven*. Selain itu, Indonesia memiliki paparan yang relatif tinggi terhadap investor asing dengan 40 persen utang dalam negeri Indonesia dipegang oleh pihak asing³². Kombinasi eksposur yang relatif tinggi terhadap investor asing dan gejolak pasar keuangan telah menyebabkan arus keluar investasi portofolio dan depresiasi Rupiah. Perkiraan defisit transaksi berjalan yang lebih besar terkait dengan pertumbuhan investasi yang lebih cepat juga menekan nilai mata uang³³.

Di Triwulan ke-1, dengan menggunakan nilai di akhir periode, mata uang terdepresiasi 1,4 persen terhadap Dollar AS, jauh lebih besar dari depresiasi sebesar 0,4 persen di Triwulan ke-4 2017. Sejauh ini, di Triwulan ke-2 Rupiah terdepresiasi sebesar 1,6 persen, yang menyebabkan depresiasi dari awal tahun hingga saat ini (*year-to-date-YTD*) menjadi sebesar sekitar 3,1 persen. Di pertengahan Mei, Rupiah menembus ambang batas 14.000 untuk pertama kalinya sejak Triwulan ke-4 tahun 2015³⁴, tetapi sejak saat itu menurun, sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan sebesar 25 bps di bulan Mei dan adanya tanda-tanda awal kembalinya kepercayaan investor.

Juga terkait dengan peningkatan tingkat kebijakan suku bunga Dana Federal AS, mata uang negara-negara pasar berkembang lainnya juga telah terdepresiasi, beberapa di antaranya lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Indeks Mata Uang Negara-negara Pasar Berkembang (*Emerging Market Currency Index, EMCI*) JP Morgan naik sebesar 0,7 persen di Triwulan ke-1 tetapi jatuh 6,1 persen di Triwulan ke-2, menyebabkan depresiasi YTD sebesar 5,4 persen. Karena EMCI telah terdepresiasi lebih tinggi dibandingkan dengan Rupiah, beberapa bulan

²⁹ Bloomberg (17 April 2018) dan Bloomberg (25 April 2018).

³⁰ Peningkatan yang pertama dilakukan oleh S&P di bulan Mei 2017 dan yang kedua oleh Fitch di bulan Desember 2017. Selanjutnya, *Rating and Investment Information, Inc. (R&I)* yang berbasis di Jepang meningkatkan peringkat kredit negara Indonesia di bulan Maret 2018.

³¹ Bloomberg (13 April 2018).

³² *The Wall Street Journal* (7 Mei 2018).

³³ Sangat berbeda dengan Krisis Keuangan Asia 1997-1998 ketika Indonesia memiliki nilai tukar tetap, Rupiah telah bertindak sebagai stabilisator secara otomatis, dengan perubahan nilainya yang memiliki kecenderungan untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam transaksi berjalan dan neraca pembayaran.

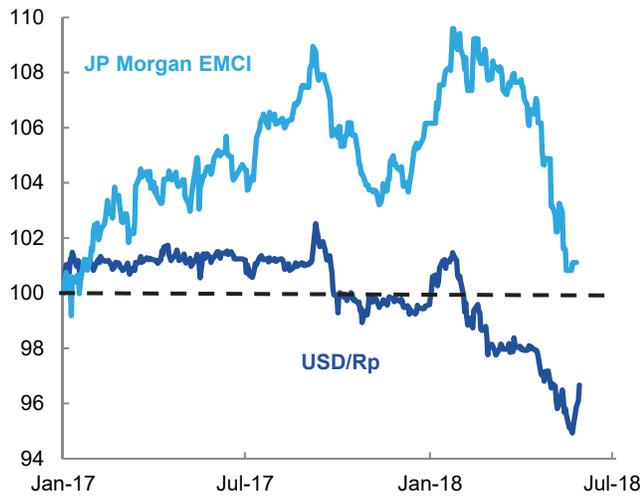
³⁴ Reuters (8 Mei 2018).

terakhir ini telah terjadi pemulihan kembali Rupiah dengan mata uang negara-negara pasar berkembang lainnya (Gambar A.20).

Rupiah juga telah terdepresiasi secara nilai efektif riil di tahun 2018 (Gambar A.21). Di Triwulan ke-1, mata uang terdepresiasi sebesar 4,0 persen, tetapi masih 5,2 persen lebih tinggi dibandingkan dengan awal tahun 2014, yang menunjukkan tren apresiasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Mata uang regional lainnya juga telah terdepresiasi nilainya secara riil, dan hanya Rupee India yang telah terdepresiasi lebih besar dibandingkan dengan Rupiah selama periode yang sama.

Gambar A.20: Rupiah terdepresiasi di Triwulan ke-1, tetapi menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan di pertengahan Triwulan ke-2

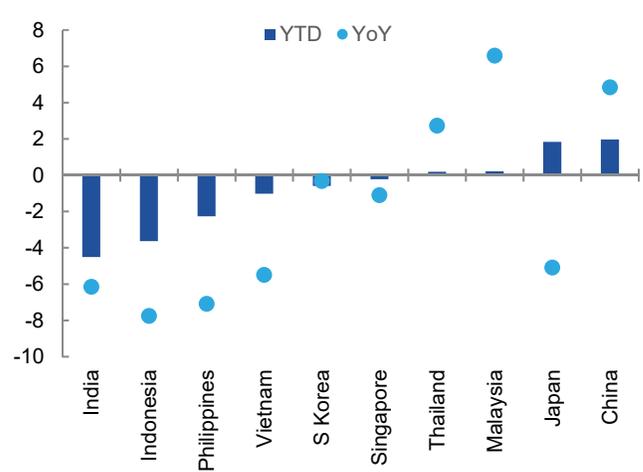
(indeks, Januari 1 = 2017, persen)



Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi

Gambar A.21: Meskipun mata uang regional juga telah secara riil terdepresiasi di tahun 2018, hanya Rupee India yang mengalami depresiasi yang lebih besar dari Rupiah

(perubahan persentase year-to-date dan year-on-year)



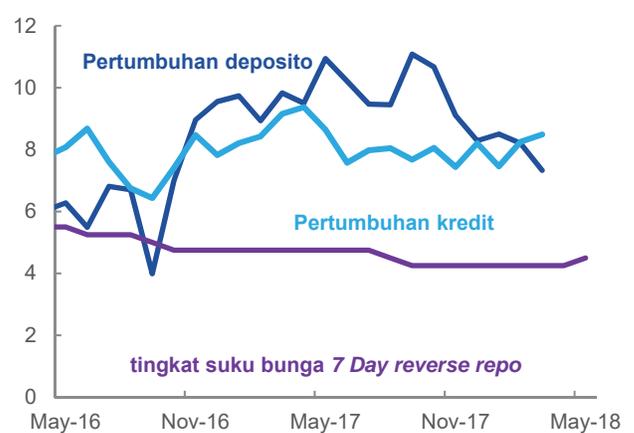
Sumber: JP Morgan Real Effective Exchange Rate, basis CPI (2010=100); perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi. Perubahan persentase tahun-ke-tahun dari April 2017 hingga April 2018

BI menaikkan tingkat suku bunga kebijakan sebanyak dua kali dan menggunakan cadangan untuk mengelola gejolak nilai tukar

Terutama karena adanya tekanan depresiasi baru-baru ini terhadap Rupiah, BI meningkatkan suku bunga acuan (*seven-day reverse repo*) 25 basis poin sebanyak dua kali menjadi 4,75 persen di bulan Mei³⁵, setelah mempertahankan suku bunga tetap selama tujuh bulan berturut-turut (Gambar A.22). Ini adalah siklus pengetatan yang pertama sejak tahun 2014. Intervensi terbaru BI ini juga mencerminkan penekanan pada stabilitas ekonomi makro. Ini juga merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas yang telah diambil Pemerintah, yang mencakup defisit fiskal yang konservatif pada

Gambar A.22: Siklus pelonggaran kebijakan moneter tetap bertahan

(persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

³⁵ Bank Indonesia (17 Mei 2018).

tahun 2019, mempertahankan suku bunga riil positif selama beberapa tahun terakhir dan membangun dana cadangan devisa yang mencapai catatan yang tertinggi pada bulan Januari 2018. Bersama dengan menaikkan suku bunga kebijakan, BI telah menggunakan cadangan tersebut untuk melakukan intervensi untuk mendukung Rupiah dan membatasi gejolak nilai tukar yang berlebihan³⁶. Cadangan, yang mencapai rekor sebesar 132 miliar dolar AS pada bulan Januari 2018, turun menjadi 126 miliar dolar AS pada bulan Maret, penurunan yang terbesar sejak Triwulan ke-3 tahun 2015, dan di bulan Februari tercatat adanya penurunan cadangan bulanan yang terbesar sejak pertengahan 2016.

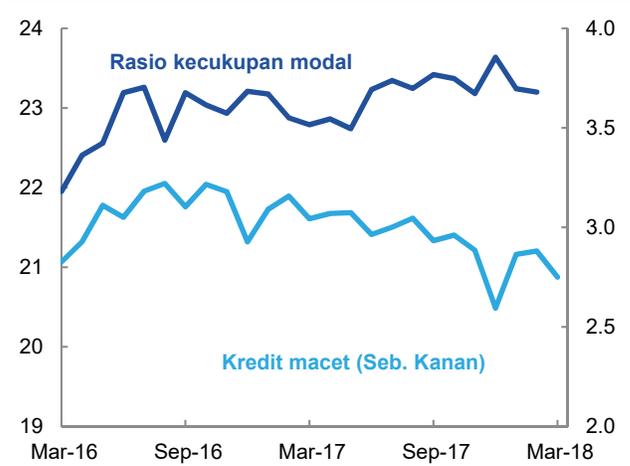
Mempertimbangkan adanya normalisasi kebijakan moneter AS yang terus berlanjut, akan semakin sedikit ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya ke depan, karena dengan semakin besarnya perbedaan imbal hasil akan meningkatkan kecenderungan arus keluar modal yang lebih banyak dan menyebabkan tekanan depresiasi lebih lanjut terhadap Rupiah.

Meskipun sebagian besar fokus kebijakan moneter tampaknya telah dipusatkan pada stabilisasi Rupiah, beberapa tujuan lainnya tetap tidak terpenuhi, dengan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan simpanan yang terus berkutat di tren yang tetap yang mengecewakan. Pertumbuhan kredit kini berkisar antara 7,5 hingga 8,5 persen sejak September 2017. Secara rata-rata triwulanan, Triwulan ke-1 2018 mengalami pertumbuhan kredit rata-rata sebesar 8,1 persen — rata-rata pertumbuhan triwulanan yang tertinggi sejak Triwulan ke-2 tahun 2017, tetapi masih jauh di bawah target BI sebesar 10 hingga 12 persen untuk tahun 2018. Pertumbuhan kredit yang lamban mengkhawatirkan karena dapat menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tidak dapat memperoleh pembiayaan yang cukup, yang dapat menghambat pertumbuhan lebih lanjut dalam investasi swasta. Sementara itu, pertumbuhan deposito hanya terjadi secara marjinal dalam kisaran 8,0 dan 8,5 persen sejak akhir tahun 2017.

Sektor perbankan tetap sehat, meskipun terjadi sedikit peningkatan NPL di bulan Januari

Setelah jatuh ke level terendah dalam dua tahun di Triwulan ke-4 tahun 2017, jumlah kredit macet (NPL) rata-rata sebesar sekitar 2,8 persen di Triwulan ke-1 (Gambar A.23) karena adanya peningkatan NPL dalam industri pengolahan, serta perdagangan grosir dan eceran. Menunjuk pada sistem perbankan yang bermodal besar, rasio kecukupan modal tetap sekitar 23 persen, seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Dalam hal tanda-tanda positif lainnya untuk sistem perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini melakukan uji tekanan (stress test) keuangan dan mengumumkan bahwa sistem keuangan Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk menahan tekanan substansial yang diukur dengan depresiasi Rupiah hingga ke level 20.000, rasio NPL yang memburuk, dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi³⁷.

Gambar A.23: Sektor perbankan tetap sehat
(persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

³⁶ BI mencatat bahwa depresiasi nilai Rupiah adalah alasan utama untuk menarik aset cadangannya. Lihat Reuters (24 April 2018).

³⁷ Reuters (30 April 2018).

6. Peningkatan yang sangat tinggi dalam realisasi penerimaan dan pertumbuhan belanja yang terus berlanjut

Peningkatan penerimaan dan belanja yang lebih tinggi, dan defisit yang lebih rendah dari tahun lalu

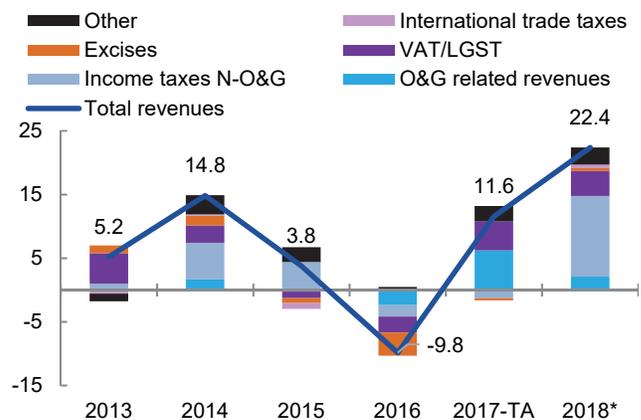
Penerimaan dan belanja Pemerintah Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam empat bulan pertama tahun 2018. Pertumbuhan yang tinggi dari total penerimaan terutama didorong oleh pemungutan pajak penghasilan non-migas dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sementara itu, total belanja Pemerintah mengalami pemulihan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama karena adanya peningkatan belanja sosial dan subsidi bahan bakar, meskipun belanja modal mengalami kontraksi. Dengan lebih dari separuh anggaran modal yang diperoleh tetapi belum digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, turunnya belanja modal diperkirakan hanya bersifat sementara³⁸. Secara keseluruhan, untuk 2018 defisit fiskal diproyeksikan sebesar 2,1 persen dari PDB, 0,4 poin persentase lebih rendah dari defisit di tahun 2017 yang terealisasi sebesar 2,5 persen dari PDB.

Total penerimaan meningkat dengan laju yang tercepat dalam sepuluh tahun terakhir

Total penerimaan³⁹ meningkat kuat sebesar 22,4 persen dari Januari – April 2018, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, tidak termasuk penerimaan dari Program Amnesti Pajak (AP)⁴⁰. Tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2018 adalah dua kali lipat dari tahun 2017⁴¹ (Gambar A.24). Total penerimaan pajak meningkat sebesar 22,3 persen *yoY* dan memberikan kontribusi sebesar 17,6 poin persentase terhadap pertumbuhan penerimaan total. Kinerja yang tinggi dari pemungutan pajak terutama didorong oleh penerimaan pajak penghasilan non-

Gambar A.24: Total penerimaan, tidak termasuk penerimaan dari AP, meningkat dengan laju tercepat dalam sepuluh tahun terakhir, didorong oleh pajak penghasilan non-Migas dan PPN

(kontribusi terhadap pertumbuhan, Januari – April, *yoY*, poin persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Migas adalah singkatan dari minyak dan gas; Non-Migas adalah singkatan dari non-minyak dan gas; PPnBM adalah singkatan dari pajak penjualan barang mewah; “Lainnya” termasuk: pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya; penerimaan bukan pajak non-minyak dan gas; penerimaan negara bukan pajak lainnya (laba perusahaan negara, penerimaan dari Badan Layanan Umum [BLU], dan penerimaan negara bukan pajak [PNBP]).
AP-2017 berarti bahwa total penerimaan mengecualikan biaya penebusan yang dipungut berdasarkan Program Amnesti Pajak. 2018 * adalah perbandingan *yoY* terhadap AP-2017

³⁸ Menurut Kementerian Keuangan, sejak bulan April 2018, kementerian-kementerian lini telah melakukan pengadaan sekitar Rp 116,8 triliun, setara dengan 57 persen anggaran belanja modal Pemerintah untuk tahun 2018. Hanya sebagian dari anggaran tersebut telah dicairkan hingga saat ini. (APBN Kita, Edisi Mei).

³⁹ Pemerintah telah mengumpulkan Rp 528 triliun, yang telah menjadi tingkat nominal tertinggi selama dua tahun terakhir (bahkan setelah memasukkan penerimaan dari AP).

⁴⁰ AP berjalan selama 9 bulan, dimulai di Triwulan ke-3 tahun 2016 dan berakhir di Triwulan ke-1 tahun 2017. Dengan demikian, bagian dari penerimaan tahun 2017 berasal dari biaya penebusan berdasarkan AP, yang dikeluarkan dari analisis tren triwulanan karena AP diperlakukan sebagai peristiwa yang hanya berlangsung satu kali saja.

⁴¹ Sementara pertumbuhan total penerimaan tahun 2017 sebagian disebabkan oleh karena rendahnya efek dasar di tahun 2016, hal yang sama tidak berlaku untuk pertumbuhan di tahun 2018.

migas⁴² dan PPN⁴³. Selain itu, pemungutan dari cukai selama Januari hingga April 2018 mengalami pemulihan setelah menurun selama periode yang sama di masing-masing dari tiga tahun terakhir ini. Hal ini menyusul adanya kenaikan tarif cukai tembakau sebesar 10,0 persen yoy secara rata-rata⁴⁴ mulai bulan Januari 2018.

Total belanja Pemerintah telah kembali pulih, disebabkan oleh peningkatan subsidi bahan bakar minyak dan gas, serta belanja sosial

Secara nominal, total belanja Pemerintah meningkat sebesar 8,3 persen yoy dari Januari – April tahun 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontraksi sebesar 1,2 persen yang terjadi pada periode yang sama tahun lalu (Gambar A.25). Peningkatan belanja ini terutama berasal dari peningkatan belanja bantuan sosial dan subsidi bahan bakar minyak dan gas, tidak termasuk pembayaran tunggakan, yang masing-masing meningkat lebih dari dua kali lipat dan lebih dari tiga kali lipat. Peningkatan belanja bantuan sosial yang tinggi tersebut mencerminkan berlanjutnya upaya untuk memperluas jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta dan pembayaran uang muka premi asuransi kesehatan bersubsidi (PBI-JKN). Tingginya peningkatan subsidi bahan bakar minyak dan gas tersebut sebagian disebabkan karena kebijakan saat ini yang mempertahankan harga minyak bersubsidi. Kebijakan ini juga mendorong pertumbuhan tajam kategori belanja ‘lainnya’, di mana pembayaran tunggakan yang berasal dari subsidi energi dilakukan di masa lalu⁴⁵. Sebaliknya, belanja modal mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen di bulan April 2018, dibandingkan dengan peningkatan sebesar 6,6 persen selama periode yang sama tahun 2017, oleh karena adanya masalah administrasi⁴⁶. Namun demikian, belanja modal diperkirakan akan meningkat pada triwulan-triwulan mendatang karena lebih dari separuh anggaran modal telah dikontraskan tetapi belum dibelanjakan untuk proyek-proyek infrastruktur.

Terjadi peningkatan tajam dalam pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak dan gas

Pemerintah mencairkan Rp 583 triliun di akhir April 2018, atau 26,3 persen dari APBN tahun 2018, kurang lebih setara dengan tingkat pencairan selama empat bulan pertama tahun 2016 dan 2017 (Gambar A.26). Pencairan belanja sosial sebesar 37,8 persen dari anggarannya hingga saat ini adalah positif dibandingkan dengan rata-rata 24,7 persen antara tahun 2014 dan 2017. Namun demikian, pencairan subsidi BBM dan gas sebesar 29,3 persen dari anggarannya hingga saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 19,4 persen antara tahun 2014 dan 2017. Selain itu, pencairan untuk kategori belanja ‘lain-lain’⁴⁷ sebesar 23,5 persen adalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017, yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembayaran tunggakan dari subsidi energi dari periode sebelumnya.

⁴² Penerimaan pajak penghasilan non-migas meningkat sebagian besar karena pajak perusahaan yang lebih tinggi, yang sebagian disebabkan oleh karena harga komoditas yang lebih tinggi. Pajak penghasilan perusahaan (dari artikel pajak penghasilan 25/29) meningkat sebesar 24 persen dibandingkan dengan tahun 2017 (APBN Kita, Mei 2018).

⁴³ Khususnya, PPN impor yang lebih tinggi, yang memiliki korelasi positif dengan harga minyak yang lebih tinggi. Lihat Kotak 2, Bank Dunia (2017).

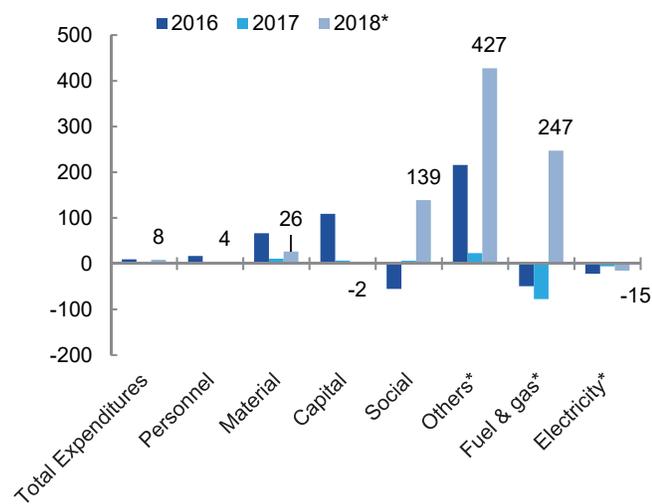
⁴⁴ Cukai tembakau Indonesia adalah cukai berjenjang; kenaikan tarif rata-rata tertimbang disediakan oleh Kementerian Keuangan, lihat CNN (27 Oktober 2017). Pajak atas rokok mendominasi pertumbuhan penerimaan cukai karena kenaikan tarif dan produksi seperti yang dilaporkan di dalam APBN Kita Mei 2018.

⁴⁵ Di dalam laporan Pemerintah mengenai pencairan belanja terakhir, pembayaran tunggakan aktual subsidi energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik) dicatat sebagai bagian dari total belanja subsidi dengan mereklasifikasinya dari kategori pengeluaran ‘lain-lain’ di dalam APBN. Total subsidi energi Januari-April 2018, termasuk pembayaran tunggakan subsidi energi, meningkat lebih dari enam kali dibandingkan dengan tahun 2017 untuk periode yang sama.

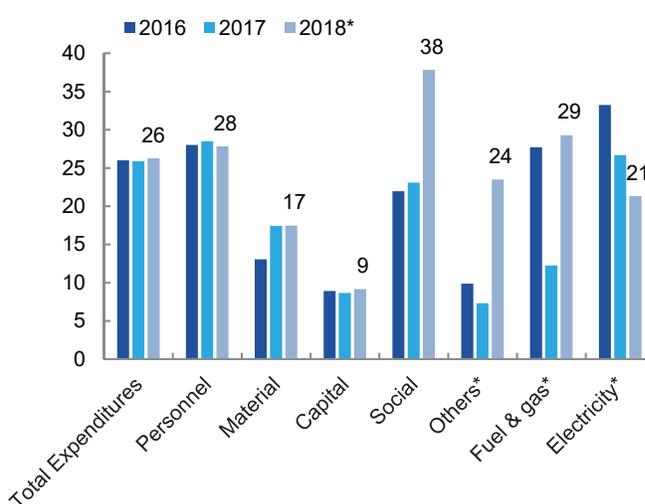
⁴⁶ Keterlambatan dalam menyelesaikan proses administrasi yang terkait dengan pengadaan dan kontrak adalah salah satu faktor utama dalam pelambatan pertumbuhan belanja modal, terutama pada mesin dan peralatan. Namun demikian, di akhir April 2018 belanja modal yang sudah dibuatkan kontraknya / sedang direncanakan akan dikucurkan sekitar 57 persen dari APBN (APBN Kita, Mei).

⁴⁷ Sejak tahun 2017, anggaran Pemerintah untuk pembayaran tunggakan telah dialokasikan dalam kategori belanja ‘lain-lain’ melalui apa yang dikenal sebagai ‘dana cadangan untuk pembayaran tunggakan subsidi’. Pada tahun 2017, pembayaran tunggakan untuk semua jenis subsidi Pemerintah adalah sebesar Rp 11,4 triliun, di mana realisasi subsidi energi sebesar Rp 5,2 triliun hanya untuk subsidi listrik. Demikian pula, pada tahun 2018, Pemerintah berencana untuk mengalokasikan total Rp30,5 triliun, yang pada bulan April telah disalurkan Rp17,6 triliun untuk total subsidi energi.

Gambar A.25: Belanja sosial dan subsidi BBM merupakan kontributor utama peningkatan belanja yang lebih tinggi (peningkatan pengeluaran Januari-April yoy, persen)



Gambar A.26: Tidak ada perubahan dalam pelaksanaan secara keseluruhan, tetapi pencairan belanja sosial dan subsidi bahan bakar lebih tinggi (pengeluaran Januari-April sebagai persen dari anggaran)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Bahan bakar minyak & gas untuk tahun 2018 bukan angka yang diterbitkan oleh APBN Kita dari Pemerintah, karena tidak termasuk pembayaran tunggakan yang ditambahkan kembali ke kategori belanja 'Lainnya' sesuai dengan klasifikasi Anggaran. * Lainnya mulai tahun 2017 dan seterusnya termasuk pembayaran tunggakan dari subsidi energi periode sebelumnya

Rasio Utang terhadap PDB meningkat dari tingkat yang rendah, tetap dapat dikelola

Total utang Pemerintah Pusat hingga bulan April 2018 mencapai Rp 4.180,6 triliun atau setara dengan 29,9 persen PDB. Tingkat ini merupakan peningkatan sekitar 14,0 persen dibandingkan tahun lalu untuk periode yang sama, terutama disebabkan karena peningkatan penerbitan bersih obligasi Pemerintah⁴⁸. Namun demikian, total utang Pemerintah Pusat masih tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan, sebesar 60 persen. Selain itu, setengah dari total utang adalah dalam mata uang lokal, mengurangi paparan risiko nilai tukar. Dengan defisit fiskal yang diperkirakan menyempit tahun ini dan di tahun 2019, tekanan ke atas terhadap rasio utang terhadap PDB, jika hal-hal lainnya tetap sama (*ceteris paribus*), diproyeksikan menurun.

7. Perkiraan (outlook) dan risiko pertumbuhan ekonomi

Perkiraan (outlook) tetap positif oleh karena adanya peningkatan permintaan dalam negeri, didorong oleh pemilu mendatang

Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan di triwulan pertama dan ada peningkatan gejala keuangan global, perkiraan perekonomian Indonesia tetap positif, tetapi lebih terukur, dengan pertumbuhan PDB diproyeksikan mencapai rata-rata 5,3 persen untuk 2018-2019 dengan bertumpu pada permintaan dalam negeri yang lebih tinggi, sebagian didorong oleh pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden mendatang (Tabel A.2). Secara khusus, pertumbuhan investasi yang tinggi tersebut sebagian disebabkan oleh kuatnya harga komoditas, ditambah dengan peningkatan belanja modal pemerintah, juga akan meningkatkan potensi perekonomian negara. Namun demikian, net ekspor akan terus membebani pertumbuhan ekonomi karena investasi tetap sarat impor, dan menurunnya pertumbuhan dan perdagangan global.

Pertumbuhan konsumsi tetap stabil tahun ini

Pertumbuhan konsumsi masyarakat diproyeksikan akan tetap stabil tahun ini, didukung oleh inflasi yang relatif rendah yang meningkatkan daya beli konsumen, tetapi terbebani oleh sentimen konsumen berpendapatan rendah, sejalan dengan depresiasi nilai Rupiah. Melanjutkan tanda-tanda awal pertumbuhan penjualan eceran (*retail sales*) yang mulai menguat tahun ini,

⁴⁸ APBN Kita, Mei

belanja pra-pemilu diperkirakan akan mengangkat pertumbuhan konsumsi masyarakat tahun depan.

Tabel A.2: Indikator perekonomian utama
(*pertumbuhan yoy, persen, kecuali dinyatakan lain*)

	Tahunan			Revisi dari IEQ sebelumnya
	2017	2018p	2019p	2018
1. Indikator perekonomian utama				
Produk Domestik Bruto (PDB)	5,1	5,2	5,3	-0,1
Pengeluaran konsumsi masyarakat	5,0	5,0	5,1	-0,1
Konsumsi pemerintah	2,1	3,0	4,5	-1,0
Pembentukan modal tetap bruto	6,2	7,5	6,5	1,5
Ekspor barang dan jasa	9,1	7,0	6,5	0,0
Impor barang dan jasa	8,1	9,5	7,5	2,5
2. Indikator perekonomian lainnya				
Indeks harga konsumen	3,8	3,5	3,7	0,0
3. Asumsi Ekonomi				
Nilai tukar (Rp/USD)	13.381	13.880	14.100	330
Harga minyak mentah Indonesia (USD/bbl)	51	63	63	5

Sumber: BPS; BI; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: Angka untuk tahun 2017 adalah hasil aktual. P singkatan dari perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan persediaan tidak disajikan dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB yang terbaru. Nilai tukar dan asumsi harga minyak mentah adalah data tahunan rata-rata. Revisi relatif terhadap proyeksi di Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia (IEQ) edisi Maret 2018

Ketahanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak perekonomian global telah meningkat karena fundamental ekonomi yang sehat dan kerangka kebijakan ekonomi makro yang kuat

Fundamental ekonomi yang sehat dan kerangka kebijakan ekonomi makro yang kuat telah berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak perekonomian global. Dibandingkan dengan *Taper Tantrum* 2013 (*Taper Tantrum* adalah istilah yang dipakai untuk merujuk pada kebijakan Bank Sentral AS (*The Fed*) untuk secara bertahap menghentikan program *quantitative easing* yang mengakibatkan naiknya imbal hasil Obligasi Negara AS (*Treasury bond yields*) di tahun 2013 – pent.), ketika negara-negara berkembang, dengan ketidakseimbangan perekonomiannya, mengalami pelarian modal yang signifikan, fundamental perekonomian Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Teutamanya, defisit neraca transaksi berjalan di Triwulan ke-1 tahun ini adalah 2,1 persen dari PDB, setengah dari 4,2 persen di Triwulan ke-2 tahun 2013. Demikian pula, pertumbuhan kredit saat ini rata-rata hanya sekitar sepertiga dari pertumbuhan yang tercatat sangat tinggi di tahun 2013 sebesar 22,2 persen, dan inflasi harga konsumen tetap rendah dan stabil, saat ini sekitar dua pertiga dari 4,8 persen yang tercatat di paruh pertama tahun 2013.

Pada saat yang sama, kerangka kebijakan ekonomi makro saat ini sehat dan kuat, memberikan ketahanan ekonomi lebih lanjut. Kebijakan moneter tetap kredibel dan transparan, yang mendukung kepercayaan investor. Sementara itu, Bank Indonesia, yang didukung oleh cadangan devisa yang tinggi yang mencapai rekor dan serangkaian *currency swap agreements* (transaksi pertukaran dua jenis valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka – pent.), telah membantu nilai Rupiah untuk menahan gejolak yang berlebihan. Kebijakan fiskal juga konservatif, dengan defisit yang terjaga dengan baik. Selain itu, konsolidasi fiskal telah ditargetkan untuk tahun 2019, tahun pemilihan umum, sebagai tanda lebih lanjut dari komitmen terhadap stabilitas perekonomian dan semakin memperkuat ruang fiskal yang tersedia untuk kebijakan stabilisasi, jika diperlukan. Empat peningkatan peringkat kredit dalam dua belas bulan terakhir semakin memperkuat perekonomian negara, manajemen fiskal, dan kelayakan kredit secara keseluruhan yang membaik.

Nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*) diproyeksikan akan memburuk

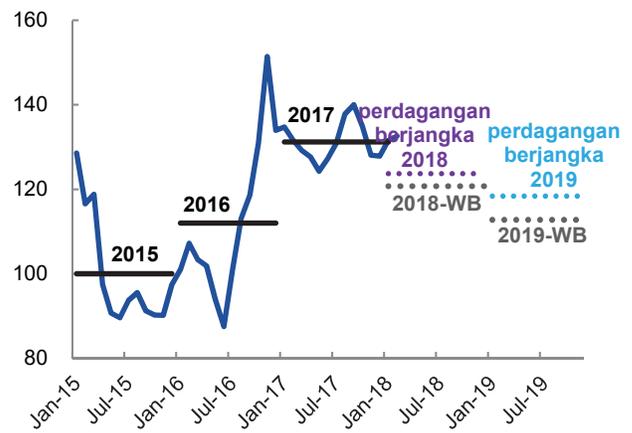
Nilai tukar perdagangan untuk tahun 2018 diproyeksikan akan lebih lemah

Perkiraan pergerakan harga batu bara, minyak, dan minyak kelapa sawit, tiga komoditas dengan bobot terbesar dalam komoditas ekspor (Tabel A.3), menyiratkan adanya pergeseran yang besar dalam nilai tukar perdagangan Indonesia (*terms-of-trade*, ToT) di tahun-tahun mendatang⁴⁹. Mengingat harga rata-rata tahun 2018 YTD untuk enam komoditas saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2017, kisaran Indeks Harga Perdagangan Tertimbang Bersih (*Net-Trade Weighted Price Index*) YTD untuk tahun 2018 saat ini lebih tinggi dari tahun 2017. Namun demikian, sejalan dengan perkiraan harga komoditas Bank Dunia (Bank Dunia, 2018a), Indeks ToT untuk tahun 2018 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 (Gambar A.27)⁵⁰. Jika harga perdagangan berjangka digunakan sebagai pengganti perkiraan Bank Dunia, nilai tukar perdagangan (ToT) yang diproyeksikan untuk tahun 2018 masih lebih lemah dibandingkan dengan tahun 2017, meskipun hanya sedikit lebih rendah saja⁵¹.

Tabel A.3: Bobot tahunan komoditas utama Indonesia dalam keranjang ekspor komoditas (persen)

	2016	2017
Minyak Mentah	(34,2)	(34,9)
Batubara	43,4	46,3
Gas Alam	16,7	15,2
Karet	8,9	11,5
Logam Dasar	13,3	10,0
Minyak Kelapa Sawit	51,9	51,9
Total	100,0	100,0

Gambar A.27: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih - historis dan perkiraan hingga tahun 2019 (indeks 2015=100)



Sumber: CEIC, proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: Bobot didefinisikan sebagai $Bobot_{i,p} = \frac{(E_{i,t}) - (I_{i,t})}{\sum(E_{N,t}) - \sum(I_{N,t})}$, di mana *i*= jenis komoditas; *t*= bulan; *N* = jumlah komoditas; *E*=nilai ekspor; *I*=nilai impor. Bobot rata-rata tahunan yang disajikan dalam tabel di atas dihitung dengan menggunakan bobot bulanan masing-masing komoditas. Minyak mentah memiliki bobot negatif karena Indonesia adalah negara pengimpor minyak bersih

Sumber: BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih dibangun di atas enam komoditas ekspor utama Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak, LNG, dan minyak kelapa sawit)

⁴⁹ Nilai tukar perdagangan (ToT) mengacu pada harga relatif impor, diukur dalam ekspor; dan didefinisikan sebagai rasio harga ekspor terhadap harga impor. Hal ini dapat diartikan sebagai jumlah barang impor yang dapat dibeli oleh satu satuan barang ekspor suatu negara

⁵⁰ Indeks Harga Perdagangan Tertimbang Bersih (*Net-Trade Weighted Price Index*) (NTI) didefinisikan sebagai: $NTI_t = \frac{Bobot_{i,p} \times Harga_{i,t}}{Harga_{i,t}}$ di mana

$Bobot_{i,p} = \frac{(E_{i,t}) - (I_{i,t})}{\sum(E_{N,t}) - \sum(I_{N,t})}$ dan *i*= jenis komoditas; *t*= bulan; *p*= siklus periode (mis. rata-rata 5 tahun); *N* = jumlah komoditas; *T*= tahun basis; *E*=nilai ekspor; *I*=nilai impor

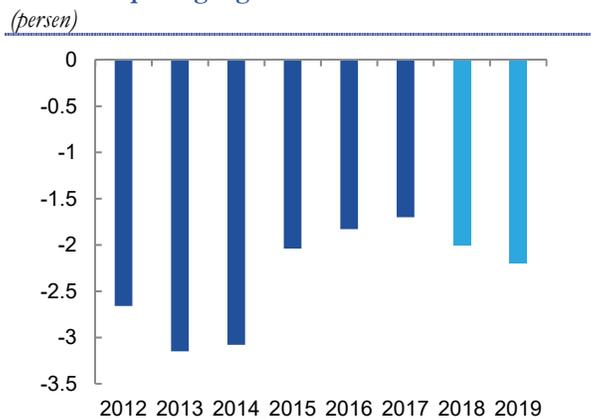
⁵¹ NTI alternatif dihitung dengan menggunakan rata-rata harga berjangka batubara (ICE, Newcastle), rata-rata dari tiga *benchmark* harga minyak, yaitu Brent, WTI, dan Dubai (ICE), dan minyak kelapa sawit (Malaysia).

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar di tahun 2018

Ke depan, impor diperkirakan akan tetap tinggi karena pertumbuhan investasi sarat impor yang kuat dalam jangka menengah. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekspor diproyeksikan akan terus menurun, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan global dan arus perdagangan internasional yang melambat, serta pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia yang melambat. Mengingat hal tersebut di atas, selain dari proyeksi memburuknya nilai tukar perdagangan (ToT) komoditas, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar menjadi 2,0 persen dari PDB pada tahun 2018 dan menjadi 2,2 persen dari PDB pada tahun 2019 (Gambar A.28).

Gambar A.28: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar di tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan melemah



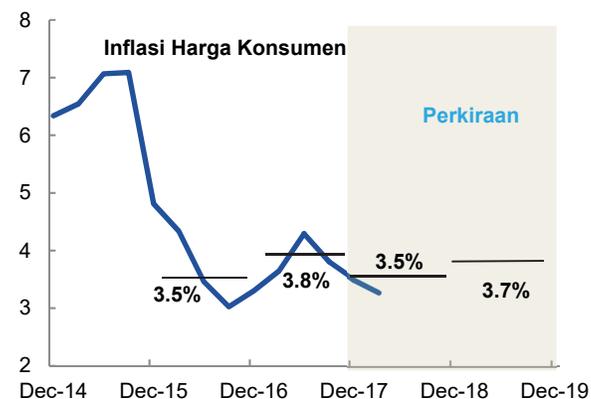
Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: 2018 dan 2019 adalah perkiraan

Inflasi harga konsumen diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran target BI

Inflasi harga konsumen tetap berada dalam kisaran target BI karena kekhawatiran seputar pasokan beras berkurang

Sementara inflasi harga bahan makanan mengalami peningkatan yang signifikan di bulan April, tekanan yang terus meningkat pada harga makanan akan berkurang dalam beberapa bulan mendatang dengan panen yang berhasil dan datangnya beras impor^{52,53}. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengimpor lebih banyak beras untuk memastikan ketersediaan beras di hari raya Idul Fitri⁵⁴. Pada saat yang sama, selama bulan Ramadhan, BI, melalui tim-tim pengendalian inflasi daerah, telah mengintensifkan kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Tim-tim tersebut telah secara aktif

Gambar A.29: Tekanan ke atas dari gejala harga makanan telah menurun karena panen yang berhasil (perubahan rata-rata tahunan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

terlibat dengan para pemuka agama Islam untuk mengimbau masyarakat agar menjaga pola konsumsi atau berbelanja selama bulan puasa. Akibatnya, peningkatan inflasi harga makanan diperkirakan akan menurun dalam beberapa bulan mendatang. Dengan demikian, inflasi IHK diproyeksikan menjadi rata-rata sebesar 3,5 persen di tahun 2018, lebih rendah dari pada tahun 2017, sehingga mendukung konsumsi masyarakat (Gambar A.29).

Perkiraan paduk (*baseline*) mengasumsikan kenaikan harga minyak mentah dan beberapa efek inflasi dari pemilihan kepala daerah tahun ini dan pemilihan presiden di tahun 2019. Risiko yang menguntungkan bagi inflasi tetap ada, terutama dari inflasi yang diakibatkan oleh depresiasi nilai Rupiah dan harga minyak yang lebih tinggi.

⁵² Netral News (2 Mei 2018).

⁵³ Indonesia Investments (2 Mei 2018).

⁵⁴ Industri Bisnis (11 Mei 2018).

*Defisit anggaran pemerintah dipersempit di tahun 2018***Defisit fiskal diproyeksikan menyempit menjadi 2,1 persen dari PDB di tahun 2018**

Konsisten dengan perkiraan ekonomi makro untuk tahun 2018, sebagai dampak harga minyak yang lebih tinggi dan reformasi pajak yang berkelanjutan⁵⁵, total penerimaan pemerintah pusat diproyeksikan meningkat sebesar 10,7 persen *yo-y* secara nominal, didorong oleh proyeksi peningkatan dalam pemungutan pajak penghasilan dan dari penerimaan negara bukan pajak terkait sumber daya alam (PNBP SDA)⁵⁶. Sementara itu, total belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat 8,4 persen dari tahun 2017 secara nominal, didorong oleh proyeksi peningkatan belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja subsidi⁵⁷. Secara keseluruhan, penyempitan defisit fiskal menjadi 2,1 persen dari PDB diproyeksikan pada tahun 2018, 0,1 poin persentase lebih rendah dari defisit yang diproyeksikan Pemerintah, dan 0,4 poin persentase lebih rendah dari defisit aktual sebesar 2,5 persen dari PDB pada tahun 2017 (Gambar A.30, Tabel A.4)⁵⁸.

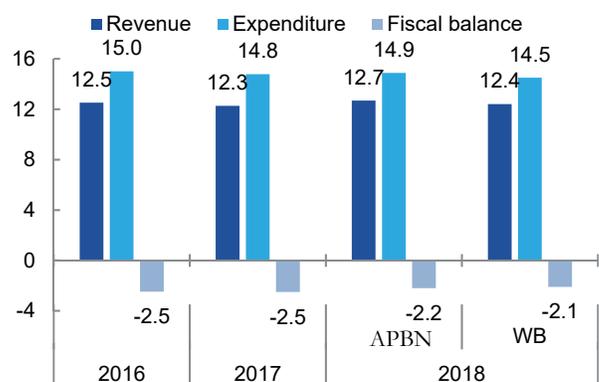
Pada perkiraan fiskal tahun 2018, risiko menguntungkan dan risiko merugikan yang serupa terjadi di tahun sebelumnya

Ketidakstabilan harga minyak global umumnya telah memunculkan risiko merugikan dan risiko menguntungkan (*downside and upside risks*) terhadap penerimaan Pemerintah. Mengingat tingginya kemungkinan kuatnya harga minyak untuk sisa tahun 2018, risiko terjadinya penurunan penerimaan yang berhubungan dengan komoditas terbilang rendah. Di sisi pengeluaran, keputusan Pemerintah saat ini untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi meningkatkan risiko fiskal, dengan subsidi energi yang lebih tinggi yang diperlukan untuk menutup pembayaran kewajiban yang ada saat ini dan pembayaran tunggakan. Jika realisasi penerimaan tetap positif, Pemerintah dapat memilih untuk meningkatkan pengeluaran melalui revisi APBN tengah tahun,⁵⁹ yang akan menghasilkan defisit fiskal yang lebih tinggi dari perkiraan saat ini. Dalam jangka menengah, untuk mempertahankan peningkatan belanja, bersama dengan peningkatan kualitas belanja yang sangat penting untuk pertumbuhan inklusif, Pemerintah harus melanjutkan reformasi kebijakan pajak yang memperluas basis pajak dan agar basis pajak yang sudah ada menjadi lebih efisien dan adil.

Risiko eksternal terhadap perkiraan (*outlook*) termasuk berlanjutnya gejala di pasar keuangan

Risiko terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi tetap cenderung ke bawah (*downside risks*). Di sisi eksternal, sementara normalisasi kebijakan moneter AS hingga saat ini telah berjalan, masih ada risiko signifikan bahwa pergerakan yang tidak terduga dalam kecepatan atau tingkat pengetatannya dapat memicu gejala lebih lanjut di pasar keuangan dan pasar modal. Oleh karena itu, peningkatan pesat dalam imbal hasil obligasi AS telah memicu kesulitan keuangan di

Gambar A.30: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,1 persen dari PDB pada tahun 2018 (persen dari PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: 2016–2017 adalah angka aktual yang sudah diperiksa

⁵⁵ Ini termasuk peningkatan penerimaan dari reformasi yang diharapkan seperti peraturan cukai tembakau yang baru dan dari reformasi administrasi penerimaan yang menargetkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

⁵⁶ Penerimaan negara bukan pajak yang berhubungan dengan sumber daya alam sebagian besar berasal dari royalti yang diterapkan untuk pertambangan dan ekstraksi dan produksi minyak dan gas. Proyeksi penerimaan dari Bank Dunia adalah 3,1 persen lebih rendah dari APBN 2018.

⁵⁷ Proyeksi pengeluaran dari Bank Dunia adalah 3,1 persen lebih rendah dari APBN 2018.

⁵⁸ Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa Pemerintah tidak melakukan revisi yang signifikan terhadap APBN pada pertengahan tahun. Alih-alih mempersempit defisit fiskal, Pemerintah malah memilih untuk meningkatkan belanja pertengahan tahun, sejalan dengan revisi peningkatan dari asumsi harga minyak di dalam APBN, terutama jika kinerja realisasi penerimaan terus meningkat.

⁵⁹ APBN mengasumsikan harga minyak mentah sebesar 48 USD/barel; dengan merevisi asumsi harga ini memberikan pembenaran bagi Revisi Anggaran.

**dan pasar modal,
dan perdagangan
global yang lebih
lesu**

negara-negara berkembang lainnya yang lebih rentan, seperti Argentina dan Turki. Gejolak lanjutan seperti itu dapat menyebabkan biaya pembiayaan meningkat lebih tajam untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada saat yang sama, dengan meningkatnya proteksionisme perdagangan, ada risiko nyata bahwa pemulihan yang sedang mulai terjadi pada perdagangan global dapat terhenti, dan membebani ekspor Indonesia serta pertumbuhannya. Peningkatan lebih lanjut dalam langkah tindakan dan sentimen proteksionisme dapat menyebabkan kontribusi negatif yang lebih besar dari sektor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**Risiko dalam negeri
termasuk
peningkatan inflasi
harga konsumen**

Di tengah ketegangan geopolitik baru yang melibatkan Iran, dan memburuknya kapasitas Venezuela untuk memproduksi minyak, harga minyak mentah siap untuk lebih meningkat dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, dengan nilai Rupiah yang terdepresiasi baik dalam nominal maupun riil, risiko yang terkait dengan inflasi impor yang lebih tinggi juga meningkat. Sementara itu, inflasi harga pangan melonjak dalam beberapa bulan terakhir ini. Jika inflasi IHK meningkat secara signifikan lebih tinggi dari yang diperkirakan, daya beli konsumen dapat terkikis, dan membebani konsumsi masyarakat. Mengingat bahwa konsumsi masyarakat merupakan sekitar 60 persen dari perekonomian negara, pertumbuhan konsumsi masyarakat yang lebih lambat dapat menjadi hambatan yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan.

Tabel A.4: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran lebih rendah daripada di APBN tahun 2018

(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2016 Aktual Audited	2017 APBN	2017 APBN Perubahan	2017 Aktual Audited	2018 APBN	2018 Bank Dunia
A. Penerimaan	1.556	1.750	1.736	1.666	1.895	1.837
(% dari PDB)	12,5	12,5	12,8	12,3	12,8	12,4
1. Penerimaan pajak	1.285	1.499	1.473	1.343	1.618	1.507
(% dari PDB)	10,4	10,9	10,8	9,9	10,9	10,2
Pajak penghasilan	666	788	784	647	855	770
Minyak & Gas	36	36	42	50	38	75
Non-Minyak & Gas	630	752	742	597	817	695
PPN/PPnBM	412	494	475	481	542	500
PBB	19	17	15	17	17	17
Cukai	144	157	153	153	155	170
Pajak perdagangan internasional	35	34	36	39	39	43
Bea masuk	32	34	33	35	36	39
Bea ekspor	3	0	3	4	3	4
Pajak lainnya	8	9	9	7	10	7
2. Penerimaan negara bukan pajak	262	250	260	311	275	329
(% dari PDB)	2,1	1,8	1,9	2,3	1,9	2,2
Penerimaan SDA	65	87	96	111	104	156
Minyak & Gas	44	64	72	82	80	133
Non-Minyak & Gas	21	23	23	29	23	23
Penerimaan negara bukan pajak lainnya	197	163	165	200	172	172
3. Hibah	9	1	3	12	1	1
B. Pengeluaran	1.860	2.080	2.133	2.007	2.221	2.152
(% dari PDB)	15,0	15,2	15,7	14,8	15,0	14,5
1. Pemerintah pusat	1.149	1.316	1.367	1.265	1.455	1.388
(% dari PDB)	9,3	9,6	10,0	9,3	9,8	9,4
Pegawai	305	345	340	313	366	333
Barang & jasa	260	270	319	291	340	355
Modal	169	221	206	208	204	185
Pembayaran bunga pinjaman	183	221	219	217	239	235
Subsidi	174	160	169	166	156	173
Energi	107	77	90	98	95	122
BBM	44	32	44	47	47	60
Listrik	63	45	45	51	48	62
Non-energi	67	83	79	69	62	51
Hibah	7	2	6	5	1	3
Sosial	50	56	58	55	81	90
Lainnya	6	41	50	9	67	14
2. Transfer ke daerah	710	710	766	742	766	764
(% dari PDB)	5,7	5,5	5,6	5,5	5,2	5,2
Keseimbangan Anggaran	-308	-308	-397	-341	-326	-316
(% dari PDB)	-2,5	-2,4	-2,9	-2,5	-2,2	-2,1
<i>Asumsi</i>						
Tingkat pertumbuhan PDB riil (%)	5,0	5,1	5,2	5,1	5,4	5,2
IHK (%)	3,5	4,0	4,3	3,6	3,5	3,5
Nilai tukar (Rp/USD)	13.300	13.300	13.400	13.384	13.400	13.880
Harga minyak mentah (USD/barrel)	51	45	48	51	48	65

Sumber: Kementerian Keuangan

B. Menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi Indonesia: Mengatasi tantangan pasca 15 tahun reformasi pendidikan⁶⁰



Potensi pertumbuhan dan kualitas hidup jangka panjang Indonesia sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya⁶¹. Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia hingga saat ini telah menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, kontribusi pendidikan yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi, dan daya saing keseluruhan yang lebih rendah. Produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah seperempat dari yang tercatat di Malaysia, dan perkiraan kontribusi pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah 1,8 poin persentase per tahun lebih rendah daripada di Vietnam. *The Global Competitiveness Index* memberi peringkat Indonesia secara keseluruhan peringkat ke-36 dari 137 negara peserta, sementara pendidikan dasar dan kesehatan berada di peringkat ke-94 dan pendidikan tinggi dan pelatihan berada di posisi ke-64. Sumber daya manusia yang rendah juga mempengaruhi kualitas hidup, karena orang yang berpendidikan dan sehat cenderung hidup lebih lama dan lebih mampu menafkahi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pada tahun 2002, Indonesia memulai serangkaian reformasi kebijakan untuk memperkuat akses dan kualitas pendidikan, keduanya adalah penentu utama pengembangan sumber daya manusia. Unsur-unsur reformasi tersebut komprehensif dan selaras dengan praktik-praktik terbaik di dunia internasional. Namun demikian, setelah lima belas tahun berjalan, hasilnya beragam. Pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat telah meningkat secara signifikan, tetapi pembelajaran siswa tetap di bawah negara-negara lain di regional sekitar, yang berakibat buruk pada daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Indonesia saat ini harus meninjau kembali reformasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, agar dapat mengembangkan sumber daya manusia secara memadai dan mencapai tujuan pertumbuhan inklusif dan pengurangan kemiskinan.

Terlepas dari unsur-unsur yang komprehensif, tantangan pelaksanaan yang signifikan telah menghambat reformasi kebijakan mencapai potensi dampak yang diharapkan. Beberapa tindakan telah diambil untuk mengatasi beberapa tantangan ini, tetapi tindakan lebih lanjut sangat diperlukan, khususnya untuk menghentikan ketimpangan hasil belajar siswa yang kian melebar dan memanfaatkan peluang yang disebabkan oleh pensiunnya sejumlah besar guru dalam dekade berikutnya. Rekomendasi utama meliputi: menetapkan dan menegakkan kriteria kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap guru yang mengajar, melengkapi mekanisme pembiayaan pendidikan melalui transfer yang targetnya ditetapkan dengan baik dan berbasis kinerja untuk sekolah dan daerah yang tertinggal, dan meluncurkan kampanye mutu pendidikan nasional untuk meningkatkan kesadaran publik dan memberikan tekanan untuk melakukan tindakan yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran bagi siswa.

⁶⁰ Laporan berfokus pada pendidikan dasar dan lanjutan

⁶¹ Sumber daya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik kesehatan yang meningkatkan kapasitas produksi dan potensi penghasilan. Bank Dunia sedang mengembangkan ukuran sumber daya manusia yang menggabungkan indikator kesehatan dan pendidikan, seperti tingkat kelangsungan hidup di bawah 5 tahun, kualitas pendidikan sekolah, tingkat kelangsungan hidup orang dewasa, dan stunting untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun.

1. Potensi pertumbuhan dan kualitas hidup Indonesia sangat tergantung pada sumber daya manusianya

Sumber daya manusia adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi

Sistem pendidikan membangun keterampilan kognitif, membekali para pekerja dengan pengetahuan yang membuat mereka lebih produktif dan memungkinkan munculnya inovasi. Dari pengetahuan baca tulis yang mendasar hingga pengetahuan teknik canggih, pengetahuan yang disampaikan di sekolah sangatlah penting untuk kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Keterampilan non-kognitif, seperti kerja sama dalam tim, kepemimpinan, dan komunikasi, juga penting untuk keberhasilan seseorang di pasar tenaga kerja dan pertumbuhan produktivitas secara keseluruhan. Meskipun keterampilan non-kognitif tidak selalu dapat diajarkan, keterampilan non-kognitif tersebut seringkali dipengaruhi oleh sekolah formal.

Baik kuantitas dan kualitas pendidikan sangat penting untuk mengakumulasi sumber daya manusia

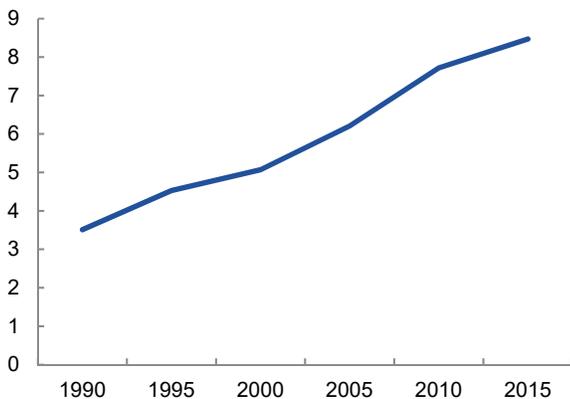
Akses terhadap sekolah adalah kondisi yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk membangun sumber daya manusia. Selain memastikan bahwa sistem pendidikan memiliki cakupan seluas mungkin (kuantitas), adalah hal yang lebih penting lagi untuk menjamin kualitas pendidikan. Hanushek dan Woessmann (2011) memperkirakan bahwa peningkatan 50 poin dalam tes *Programme for International Student Assessment (PISA)* menghasilkan peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebesar 0,93 poin persentase setiap tahun. Mengingat perbedaan nilai PISA antara Indonesia dan negara-negara yang memiliki nilai PISA yang tinggi seperti Vietnam atau Singapura adalah lebih dari 100 poin, kontribusi sumber daya manusia untuk tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia lebih rendah sekitar 2 persen dibandingkan jika Indonesia memiliki tingkat sumber daya manusia yang setara dengan negara-negara tersebut.

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam menutup kesenjangan ‘kuantitas’ di pendidikan...

Pada tahun 1950, warga Indonesia berusia 25 tahun keatas memiliki rata-rata bersekolah kurang dari 2 tahun. Sebagai hasil dari kebijakan yang agresif untuk meningkatkan pencapaian pendidikan, lama bersekolah meningkat menjadi 4 tahun pada tahun 1990, dan berlipat ganda menjadi 8 tahun pada tahun 2015 (Gambar B.1). Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tingkat lama bersekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di regional sekitar seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Gambar B.1: Peningkatan lama bersekolah di Indonesia sangat mengesankan – menjadi dua kali lipat dalam 25 tahun terakhir

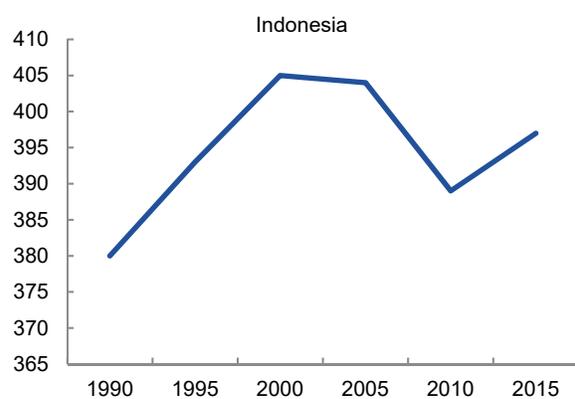
(rata-rata jumlah tahun bersekolah dari penduduk usia kerja)



Sumber: Barro dan Lee (2013), SUSENAS

Gambar B.2: Kualitas pendidikan juga meningkat meskipun terjadi hambatan pada pergantian abad (indeks harmonisasi hasil pembelajaran)

(indeks harmonisasi hasil pembelajaran)



Sumber: Altinok dkk. (2018)

Catatan: Harmonized Learning Outcome (HLO) ini dibuat untuk 163 negara, memiliki rata-rata (mean) 500 dan deviasi standar 30.

...serta membuat peningkatan kualitas yang cukup besar

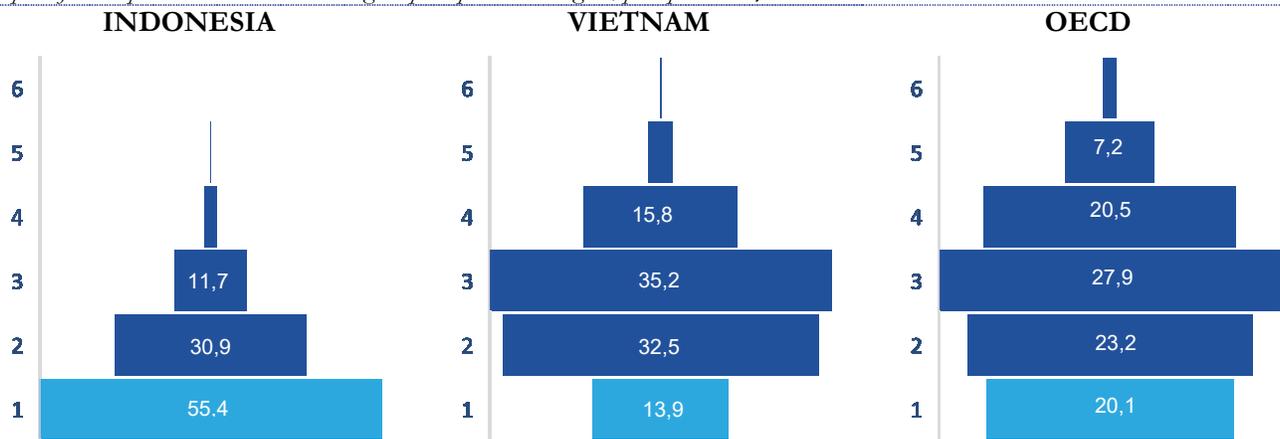
Indonesia telah menjadi salah satu peserta reguler yang selalu ikut serta dalam tes internasional untuk mengukur pembelajaran siswa selama 25 tahun terakhir. Untuk sebagian besar periode tersebut, pembelajaran siswa, yang diukur dengan *Harmonized Learning Outcomes (HLO)*⁶², menunjukkan peningkatan meskipun terjadi penurunan pada pergantian abad yang lalu. Hasil pembelajaran meningkat antara tahun 1990 dan 2000, kemudian memburuk sampai tahun 2010. Sejak tahun 2010, pembelajaran siswa telah kembali meningkat. (Gambar B.2)

Meskipun ada peningkatan, kesenjangan kualitas sangatlah besar

Menurut tes internasional, lebih dari 55 persen orang Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan buta huruf secara fungsional⁶³, jauh lebih besar daripada yang terdata di Vietnam (14 persen) dan negara-negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (20 persen) (Gambar B.3). Orang-orang Indonesia yang buta huruf secara fungsional tersebut cenderung bekerja di sektor-sektor dengan produktivitas rendah.

Gambar B.3: Kebanyakan orang Indonesia buta huruf secara fungsional, sangat berbeda dengan Vietnam dan negara-negara OECD

(proporsi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pencapaian dan negara, poin persentase)



Sumber: perkiraan Bank Dunia berdasarkan data dari PISA 2015 (OECD, 2016)

Catatan: Siswa dengan tingkat prestasi di bawah 2 dalam skala prestasi PISA dianggap buta huruf secara fungsional

Kualitas yang rendah mempengaruhi hasil tenaga kerja dari siswa yang lulus dan daya saing keseluruhan negara

Pendidikan berkualitas rendah mempengaruhi peluang kerja. Data menunjukkan bahwa 65 persen dari semua pekerjaan baru yang diciptakan antara tahun 2011 dan 2016 berada di sektor dengan produktivitas rendah. Perbandingan produktivitas, yang diukur sebagai nilai tambah per pekerja, menunjukkan bahwa produktivitas pekerja di Malaysia (USD 15.800) adalah sekitar empat kali lipat dari Indonesia (USD 3.600), dan produktivitas di Thailand (USD 5.300) adalah 1,5 kali di Indonesia⁶⁴. Ini memengaruhi tingkat daya saing Indonesia secara keseluruhan. Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 137 negara dalam *Global Competitiveness Index 2017/2018* (World Economic Forum, 2018). Dalam pilar yang terkait dengan sumber daya manusia, peringkat Indonesia bahkan lebih buruk lagi: peringkat ke-94 dalam Pendidikan dan Kesehatan Primer, dan peringkat ke-64 dalam Pendidikan Tinggi dan Pelatihan.

⁶² Indeks ini menggabungkan semua ukuran yang tersedia dari pembelajaran siswa. Lihat Altinok, Angrist dan Patrinos (2018).

⁶³ Tidak dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk dengan sukses memasuki pasar tenaga kerja. Siswa yang mendapat nilai PISA tingkat 1 dianggap buta huruf secara fungsional karena mereka dapat, misalnya, membaca teks tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut.

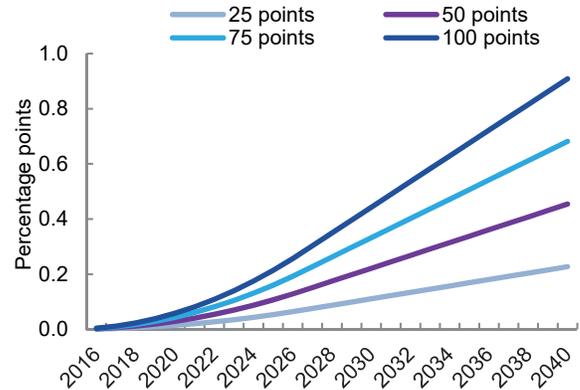
⁶⁴ Perkiraan Bank Dunia untuk tahun 2011. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan data Sakernas 2011.

Jika Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan meningkat

Jika Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sebesar 25 poin dalam hal nilai PISA dalam 12 tahun ke depan, yang setara dengan evolusi historisnya, tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang tahunan Indonesia pada tahun 2027 akan meningkat sebesar 0,08 persen dan 0,23 persen pada tahun 2040. Jika Indonesia meluncurkan program reformasi yang lebih agresif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai PISA sebanyak 100 poin, sehingga mendekati nilai rata-rata OECD dan PISA Vietnam tahun 2015, mutu pendidikan yang lebih tinggi akan menambah 0,30 persen ke pertumbuhan jangka panjang pada tahun 2027 dan 0,90 persen pada tahun 2040⁶⁵ (Gambar B.4).

Gambar B.4: Reformasi sumber daya manusia dan peningkatan hasil pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang

(tambahan poin persentase tahunan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi)



Sumber: Hanushek dan Woessmann (2011), perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Poin menunjukkan kemungkinan perbaikan pada nilai PISA saat ini.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga membutuhkan peningkatan dalam dimensi lain, seperti pemberantasan *stunting* pada anak-anak

Meskipun fokus analisis ini adalah pada pendidikan formal, Indonesia juga harus membahas dimensi lain sebelum potensi sumber daya manusia tersebut dapat direalisasikan. Lebih dari satu dari tiga anak Indonesia di bawah usia 5 tahun menderita kekurangan gizi kronis. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan di Myanmar, Filipina, dan Vietnam, dan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Gizi yang buruk dan/atau infeksi yang berulang kali diderita selama 1.000 hari pertama kehidupan adalah salah satu penyebab utamanya. *Stunting* juga dikaitkan dengan gangguan kemampuan kognitif, pencapaian pendidikan yang lebih rendah, dan menurunnya produktivitas dan potensi penghasilan di masa depan (Alderman dkk, 2006).

2. Selama 15 tahun terakhir ini, sistem pendidikan Indonesia telah mengalami transformasi besar yang memberikan hasil yang beragam

Indonesia telah mengubah kerangka hukumnya untuk meningkatkan pendidikan

Indonesia telah mengubah UUD pada tahun 2002, dan DPR telah menyetujui Undang-Undang Pendidikan pada tahun 2003, dan Undang-Undang Guru di tahun 2005. Transformasi sektor pendidikan ini bertepatan dengan proses desentralisasi yang lebih luas⁶⁶ yang juga memiliki pengaruh yang penting bagi sistem pendidikan. Tabel B.1 menyajikan implikasi utama dari Perubahan UUD tersebut.

Tabel B.1: Perubahan UUD menetapkan hak atas pendidikan untuk semua penduduk Indonesia

1.	Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2.	Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.
3.	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan and ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
4.	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5.	Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta kesejahteraan umat manusia.

⁶⁵ Analisis yang disajikan di paragraf ini mirip dengan yang dilakukan oleh Hanushek dan Woesman (2011). Analisis ini mengasumsikan kehidupan kerja rata-rata adalah 40 tahun.

⁶⁶ Undang-Undang utama mengenai proses desentralisasi adalah UU 22/1999, UU 25/1999, UU 32/2004, UU 33/2004, dan UU 23/2014.

Reformasi ini menekankan penyelesaian sembilan tahun Pendidikan dasar, dan secara resmi memperkenalkan PAUD

Reformasi ini berhasil meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi penduduk miskin

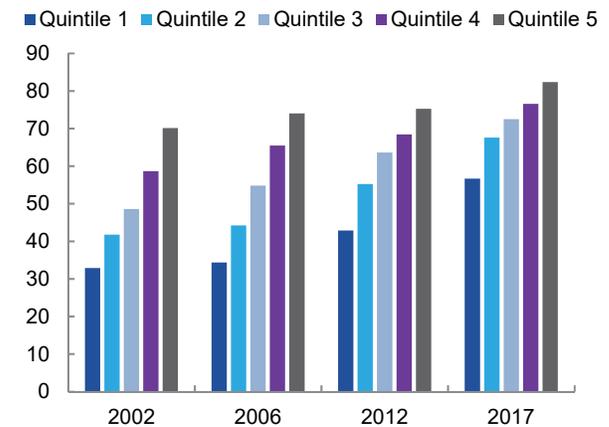
Unsur-unsur kunci dari amanat UUD yang baru ini dan menyelaraskannya dengan upaya-upaya yang sedang berlangsung pada desentralisasi nasional didefinisikan dalam UU Pendidikan tahun 2003. Undang-undang ini menekankan wajib belajar 9 tahun, menetapkan struktur pemerintahan baru untuk sektor pendidikan, dan mengamankan sistem manajemen berbasis sekolah. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimasukkan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional untuk pertama kalinya berdasarkan UU Pendidikan ini⁶⁷. Langkah-langkah ini diikuti oleh penerbitan Standar Nasional PAUD tahun 2009 (direvisi pada tahun 2014) dan Kurikulum PAUD (2014)⁶⁸.

Tambahan sumber daya keuangan untuk sektor pendidikan yang diamanatkan oleh UUD ini membiayai perluasan layanan pendidikan dan jumlah guru yang dibutuhkan untuk sekolah dan ruang kelas baru. Sumber daya tambahan yang dialokasikan ke sekolah untuk mendukung manajemen berbasis sekolah mengurangi beban keuangan pada keluarga, mendorong partisipasi sekolah, terutama dari segmen penduduk yang lebih miskin. Sumber daya ini dilengkapi dengan bantuan langsung ke siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pada tahun 2015, pencapaian sekolah telah meningkat menjadi 8 tahun pendidikan, dari 4 tahun pada tahun 1990 dan 2 tahun pada tahun 1950.

Tingkat rata-rata peningkatan antara tahun 2000 dan 2015 adalah 0,26 tahun pendidikan per tahun kronologis – lebih dari dua kali lipat di 50 tahun sebelumnya^{69,70}. Dalam hal jumlah partisipasi sekolah, jumlah siswa meningkat lebih dari 10 juta (25 persen), dan sebagian besar dalam pendidikan menengah. Antara tahun 2002 dan 2017, partisipasi sekolah di kalangan pemuda antara usia 16 hingga 18 meningkat dari 50 persen menjadi 71 persen. Peningkatan partisipasi sekolah lebih besar terjadi pada kalangan siswa di kuintil (*quintile*) penghasilan terendah, dimana tingkat partisipasinya meningkat hampir dua kali lipat dari 32 persen menjadi

Gambar B.5: Partisipasi sekolah usia 16–18 tahun meningkat untuk semua tingkat penghasilan, tetapi pertumbuhan yang lebih cepat terdapat di antara penduduk Indonesia yang lebih miskin

(tingkat partisipasi, persen)



Sumber: SUSENAS, berbagai tahun

⁶⁷ Ini diikuti dengan reformasi utama untuk memformalkan penyediaan PAUD dengan mendirikan direktorat baru yang diperuntukkan bagi anak usia dini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2001.

⁶⁸ Untuk memastikan bahwa perkembangan anak ditangani secara holistik, Peraturan Presiden untuk PAUD Holistik Integratif dikeluarkan pada tahun 2013 untuk membangun koordinasi lintas sektoral yang lebih baik dan kerjasama serta kemitraan di antara lembaga-lembaga yang relevan (termasuk kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan). PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah program di bawah Kemendikbud, sementara PAUD Holistik Integratif adalah konsep yang membutuhkan berbagai kementerian untuk mengkoordinasikan program-program mereka yang menargetkan anak-anak berusia 0-6 tahun.

⁶⁹ Tiga periode utama dapat diidentifikasi dalam upaya untuk meningkatkan pendaftaran masuk sekolah: (i) Mencapai pendidikan dasar universal. Antara tahun 1973 dan 1979, Indonesia menggandakan jumlah pendaftar untuk masuk sekolah dasar, melalui program INPRES yang sangat masif untuk pembangunan sekolah dan perekrutan guru. Selain itu, dengan diperkenalkannya Program Wajib Belajar Nasional (1984), pemerintah mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan sekolah dasar. (ii) Mencapai pendidikan dasar universal. Pada tahun 1994, pemerintah memberlakukan wajib belajar sembilan tahun, meningkatkan persyaratan minimum dari pendidikan dasar ke pendidikan dasar universal. UU Pendidikan memperkuat persyaratan wajib mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun dan memerintahkan pemerintah untuk membiayainya. (iii) Mencapai pendidikan menengah atas yang universal. Pada akhir tahun 2000an dan awal tahun 2010, Pemerintah menetapkan tujuan baru: mencapai 12 tahun pendidikan universal, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2015–2019.

⁷⁰ Antara tahun 1950 dan 2000, pencapaian sekolah meningkat dari 1,5 tahun pendidikan menjadi 5 tahun pendidikan, atau 0,1 tahun pendidikan per tahun kronologis.

57 persen. Akibatnya, kesenjangan dalam partisipasi sekolah dalam kelompok usia 16-18 tahun antara kuintil termiskin dan terkaya menurun, dari 37 menjadi 25 poin persentase (Gambar B.5).

Peningkatan yang signifikan dalam PAUD juga telah diamati sejak tahun 2005

Menyusul upaya nasional untuk membangun setidaknya satu fasilitas PAUD di setiap desa di negeri ini, pendaftaran anak-anak usia 3-6 tahun di layanan PAUD terdaftar meningkat dari 20 persen pada tahun 2005 menjadi 72 persen pada tahun 2016⁷¹. Namun, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)⁷² 2017, hanya 34 persen anak-anak usia 3-6 tahun yang bersekolah di PAUD. Kesadaran orang tua, jarak yang jauh, kualitas layanan yang rendah, dan infrastruktur serta perangkat dukungan pembelajaran yang tidak memadai mungkin mempengaruhi keputusan keluarga untuk secara aktif berpartisipasi dalam program PAUD. Kesenjangan akses juga tetap ada di seluruh kuintil sosial ekonomi. Sekitar 44 persen anak-anak dari kuintil sosial ekonomi teratas berpartisipasi di PAUD, dibandingkan dengan hanya 29 persen anak-anak di kuintil terendah.

Untuk meningkatkan kualitas, reformasi ini menciptakan mekanisme untuk meningkatkan profesionalisme guru

Pada awal reformasi, sebagian besar guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi dasar untuk mengajar dengan baik di ruang kelas. UU Guru menetapkan kompetensi yang diperlukan untuk guru, proses mengajar yang perlu dipatuhi untuk memenuhi standar pengajaran nasional, peran berbagai kementerian dan lembaga dalam mendukung guru untuk mencapai kompetensi tersebut, serta proses sertifikasi guru dan kondisi di mana para guru dapat menerima tunjangan guru (tunjangan khusus dan tunjangan profesional). Di antara perubahan besar lainnya, UU Guru menetapkan bahwa mengajar adalah profesi yang mensyaratkan gelar sarjana (S1), dan penunjukan kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis prestasi. (Chang, dkk., 2014).

Reformasi juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil pendidikan

Undang-undang Pendidikan mendorong manajemen berbasis sekolah dengan mengalihkan otoritas manajerial dan otonomi operasional ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Pemerintah pusat mempertahankan wewenang untuk: (i) merekrut dan memberhentikan guru pegawai negeri, (ii) menetapkan kurikulum nasional dan standar kompetensi, dan (iii) mengelola penilaian pembelajaran. Untuk memperkuat manajemen berbasis sekolah, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS memberikan bantuan uang untuk semua sekolah di Indonesia, atas dasar per siswa. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pendidikan dengan secara langsung membiayai operasional sekolah, memberikan bantuan keuangan kepada sekolah untuk mempertahankan siswa yang membutuhkan⁷³, dan memperkuat manajemen berbasis sekolah dan otonomi sekolah. Semua siswa pada tingkat pendidikan yang sama berhak atas jumlah BOS yang sama, meskipun ada perbedaan dalam jumlah dana BOS antara pendidikan dasar dan menengah. (Al-Samarrai, dkk., 2014).

Peran pemerintah daerah dalam pendidikan telah berubah ketika pemerintah daerah menjadi pengelola sektor pendidikan di daerah mereka

Berdasarkan reformasi desentralisasi, pemerintah daerah diberi tanggung jawab baru di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan, komunikasi, transportasi, pertanian, industri manufaktur dan perdagangan, investasi modal, pertanahan, koperasi, angkatan kerja, dan layanan infrastruktur, yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Di sektor pendidikan, tanggung jawab yang diberikan adalah sebagai berikut: pengelolaan pendidikan dan perizinan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan kurikulum, akreditasi, dan staf pengajar dan non-pengajar adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab untuk mengelola sekolah menengah atas kemudian dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Reformasi juga menciptakan mekanisme untuk

Reformasi memanfaatkan tradisi panjang ujian nasional Indonesia dan berusaha meningkatkan peran ujian untuk meningkatkan akuntabilitas. Menurut UU Pendidikan, pembelajaran harus dievaluasi dan hasilnya digunakan untuk tujuan akuntabilitas penyedia layanan pendidikan. UU

⁷¹ Kemendikbud tidak mengumpulkan data tentang pendaftaran PAUD di kalangan anak-anak yang lebih muda dari usia 3 tahun.

⁷² Survei rumah tangga secara nasional yang representatif yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

⁷³ Seperti yang diidentifikasi oleh komite sekolah.

mengukur kualitas pendidikan dan mendorong akuntabilitas

Pendidikan menetapkan bahwa evaluasi siswa harus dilakukan oleh lembaga independen secara teratur. Sistem ujian nasional yang baru diluncurkan menyusul terbitnya UU Pendidikan, yang memasukkan evaluasi pada akhir masa pembelajaran di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Di bawah sistem sebelumnya, hasil akhir sebagian ditentukan oleh nilai dari sekolah dan sebagian lagi oleh hasil ujian nasional. Namun demikian, berdasarkan sistem yang baru ini, hasil akhir para siswa, termasuk kenaikan tingkat ke jenjang pendidikan berikutnya, sepenuhnya bergantung pada nilai ujian nasional mereka. Seperti yang akan dibahas nanti, sistem yang berisiko tinggi ini menghasilkan insentif negatif untuk beberapa pemangku kepentingan, yang menyebabkan berkurangnya peran ujian nasional setelah tahun 2015.

Reformasi bersifat komprehensif tetapi menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya

Berbagai elemen reformasi yang dijelaskan di atas dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori: (i) struktur tata kelola baru untuk penyampaian layanan yang lebih baik, (ii) sumber daya tambahan untuk pendidikan dan mekanisme untuk menjangkau semua sekolah dengan memastikan sumber daya yang memadai, (iii) penguatan PAUD, (iv) peningkatan kualitas guru, dan (v) peningkatan dalam sistem penilaian. Kelima kategori ini selaras dengan praktik terbaik internasional (Kotak B.1). Meskipun demikian, dalam kasus Indonesia ada beberapa tantangan pelaksanaan yang telah membatasi dampak reformasi. Bagian B.3 menyajikan tantangan utama implementasi tersebut.

Kotak B.1: Penyeragaman reformasi kebijakan Indonesia dengan praktik-praktik terbaik internasional

Bukti dari sistem pendidikan yang berhasil menunjukkan bahwa fokus pada kombinasi dari lima domain kebijakan telah membantu berbagai negara meraih keberhasilan. Laporan terbaru, *“Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia Pacific”* (Bank Dunia, 2018), mendapati bahwa tidak ada rumusan tunggal untuk keberhasilan sistem pendidikan, tetapi sistem berkinerja tinggi yang secara konsisten mengambil tindakan dalam lima domain kebijakan: (i) Menyelaraskan lembaga-lembaga untuk menjamin terpenuhinya kondisi dasar untuk belajar, (ii) Melaksanakan belanja publik yang efektif, yang difokuskan pada kesetaraan dalam pendidikan dasar, (iii) Memastikan anak-anak siap untuk belajar di sekolah, (iv) Menyeleksi dan mendukung para guru di sepanjang karier mereka sehingga mereka dapat fokus mengajar di kelas, dan (v) Menilai siswa untuk mendiagnosis masalah pembelajaran dan menginformasikan kepada para pemangku kepentingan. Di Indonesia, reformasi pendidikan memasukkan elemen-elemen dari kelima domain kebijakan ini:

Pertama, pendekatan desentralisasi. Sektor pendidikan di negara-negara berkinerja tinggi di Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam sebagian besar terpusat, tetapi beberapa fungsi baru-baru ini didesentralisasi: kurikulum dan guru cenderung tetap berada di bawah wewenang pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah mendukung pengelolaan sekolah-sekolah. Sistem desentralisasi Indonesia memiliki struktur yang sama di mana kurikulum dan permasalahan guru tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat, sementara pengelolaan sekolah dialihkan ke sekolah, kabupaten, dan provinsi. Selain itu, reformasi kelembagaan juga dilengkapi dengan serangkaian peraturan yang dikeluarkan untuk memfasilitasi pelaksanaannya.

Kedua, sumber daya yang masuk ke sektor pendidikan meningkat secara signifikan, menjamin tingkat sumber daya minimum untuk semua sekolah. Bukti internasional menunjukkan bahwa sumber daya berhubungan dengan hasil pendidikan, tetapi yang lebih penting lagi, sistem berkinerja tinggi memiliki mekanisme untuk mendistribusikannya secara efisien untuk mendorong pembelajaran siswa. Misalnya, Chili mendistribusikan sumber daya berdasarkan per siswa dan, pada saat yang sama, memiliki mekanisme untuk menyediakan sumber daya tambahan bagi sekolah dan daerah dengan persentase yang lebih tinggi bagi siswa yang kurang beruntung. Mekanisme ini bergantung pada rencana perbaikan, dan sekolah serta daerah dievaluasi berdasarkan keberhasilan rencana perbaikan tersebut (Murnane, dkk., 2017). Di Indonesia, amanat untuk membelanjakan 20 persen dari APBN untuk pendidikan secara signifikan meningkatkan sumber daya total yang diinvestasikan dalam sektor ini; dan melalui BOS, reformasi menjamin bahwa semua sekolah menerima jumlah sumber daya minimum yang akan memungkinkan mereka untuk beroperasi dan mencapai pembelajaran siswa yang lebih baik. Selain itu, lingkungan kelembagaan dan keuangan yang baru menciptakan mekanisme dan sumber daya bagi pemerintah daerah untuk mendukung sekolah secara finansial.

Ketiga, beberapa langkah kebijakan telah diambil untuk meningkatkan kesiapan siswa. Negara-negara berkinerja tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura memiliki kebijakan untuk PAUD yang telah ditetapkan sebelum abad 21, dan yang lebih penting lagi, mereka terus meningkatkannya dalam hal kurikulum dan standar layanan. Di Indonesia, terdapat peningkatan kesadaran mengenai pentingnya intervensi PAUD, yang didukung oleh beberapa peraturan. Hasilnya, partisipasi sekolah di tingkat PAUD meningkat terutama di antara penduduk miskin, meningkatkan kesiapan siswa untuk masuk ke kelas satu, dan kurikulum telah dikembangkan, meskipun masih terdapat tantangan penting dalam hal kualitas.

Keempat, reformasi berfokus pada peningkatan tenaga guru dan peningkatan mutu mereka secara berkelanjutan. Bukti dari sistem berkinerja tinggi menunjukkan bahwa kebijakan mengenai guru yang berhasil meliputi: (i) kualitas seleksi yang tinggi dalam proses pengangkatan guru, (ii) dukungan untuk guru baru dengan mengamati praktik pengajaran di kelas dan memberikan umpan balik, (iii) dukungan bagi pekerjaan guru melalui tujuan pembelajaran yang jelas dan buku teks yang tepat, (iv) menjaga guru berpengalaman agar tetap mengajar di kelas dan memanfaatkan mereka sebagai pemimpin teknis untuk rekan-rekan guru lainnya dan peneliti, dan (v) fokus yang kuat untuk pelatihan guru mengenai praktik mengajar di kelas dan kemampuan untuk mengajar kurikulum. Misalnya, di Jepang, hanya 14 persen dari mereka yang mendaftar untuk mengajar diterima, dan dari yang diterima tersebut, hanya 30–40 persen yang akan mendapatkan pekerjaan di sekolah umum. Lebih jauh lagi, mereka yang mendapatkan pekerjaan mengajar akan dievaluasi berdasarkan pengalaman praktik mengajar, pengembangan profesional, dan masa percobaan ketika mereka mengajukan permohonan untuk menjadi guru. Beberapa elemen ini dimasukkan di Indonesia, ketika reformasi memberlakukan sertifikasi guru dalam upaya untuk memastikan tingkat minimum kualitas guru, dan mengharuskan guru untuk memiliki gelar sarjana S1.

Kelima, reformasi pendidikan memperkuat peran pengujian siswa untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk peningkatan sistem. Negara-negara berkinerja tinggi di Asia Timur memiliki tradisi menilai siswa, berpartisipasi dalam ujian secara internasional, dan menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Misalnya, Jepang menggunakan penilaian nasional dan hasil PISA untuk terus memantau reformasi pendidikan. Indonesia juga memiliki tradisi panjang pengujian yang diperkuat oleh reformasi.

Hasilnya dalam kualitas terbatas, karena nilai PISA Indonesia meningkat sementara nilai TIMSSnya menurun

Indonesia telah berpartisipasi dalam semua tes internasional utama yang dilaksanakan sejak tahun 1990, termasuk *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan PISA. Hal ini memungkinkan untuk melakukan perbandingan lintas negara dan lintas waktu dalam hasil pembelajaran. Di antara negara-negara berbeda yang berpartisipasi dalam tahun PISA yang berbeda, Indonesia mencatat kenaikan yang tertinggi dalam matematika antara tahun 2003 dan 2015⁷⁴, hasil positif yang bertepatan dengan peningkatan yang tinggi dalam partisipasi sekolah di Indonesia dengan masuknya para siswa dari kondisi sosial ekonomi rendah ke dalam sistem pendidikan (Gambar B.6). Namun demikian, nilai PISA secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan yang diperkirakan menurut tingkat penghasilan Indonesia⁷⁵. Dengan PDB per kapita sebesar USD 3.336 pada tahun 2015, nilai PISA Indonesia di bidang IPA lebih rendah dari yang diperkirakan sebesar 0.6 tahun masa sekolah⁷⁶. Sementara dalam TIMSS, nilai matematika rata-rata siswa kelas 8 Indonesia menurun 17 poin dari tahun 1999 hingga 2011⁷⁷. Ukuran yang terintegrasi, yang disajikan oleh HLO (Gambar B.2), menggabungkan nilai PISA dan TIMSS. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini menunjukkan tren yang menurun di awal abad ini, tetapi tren ini membaik setelah tahun 2010. Ini mencerminkan tantangan awal sistem pendidikan untuk mengakomodasi siswa tambahan, yang mungkin telah diatasi setelah tahun 2010.

⁷⁴ Demikian pula, Indonesia mencatat peningkatan nilai ujian antara tahun 2009 dan 2015 dan 2012 dan 2015.

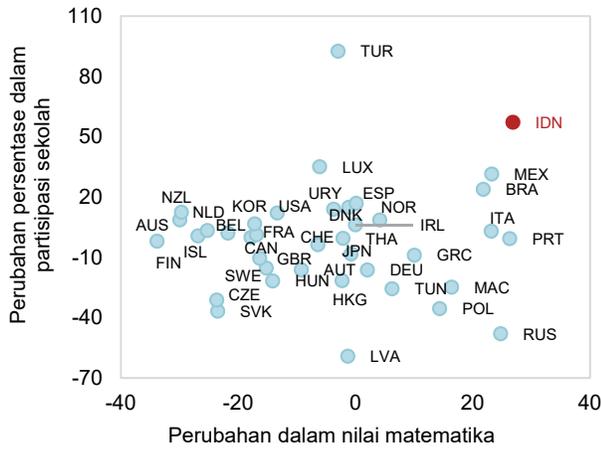
⁷⁵ Bukti internasional menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara nilai PISA dan PDB per kapita. Menurut hubungan ini, nilai Indonesia adalah 403, atau sekitar 19 poin di bawah tingkat yang diperkirakan (Bank Dunia, 2018).

⁷⁶ Dalam IPA, penurunannya adalah 29 poin untuk tahun yang sama. Untuk siswa kelas 4, Indonesia mengikuti ujian TIMSS untuk pertama kalinya pada tahun 2015 dan mencapai nilai 397 untuk matematika dan IPA. Nilai ini masih jauh lebih rendah dari rata-rata keseluruhan sampel, yaitu 500.

⁷⁷ Di antara peserta PISA tahun 2003 dan 2015, Indonesia mencatat peningkatan partisipasi sekolah yang terbesar kedua, dan Indonesia adalah satu-satunya negara yang mencatat peningkatan partisipasi sekolah dari segmen termiskin penduduknya.

Gambar B.6: Nilai PISA Indonesia meningkat dalam konteks peningkatan pesat dalam partisipasi sekolah antara tahun 2003 dan 2015

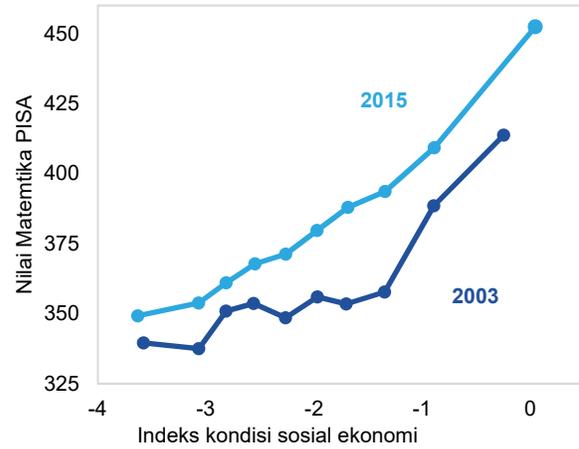
(perubahan persentase dalam partisipasi sekolah, sumbu y; perubahan dalam nilai PISA, sumbu x)



Sumber: perkiraan Bank Dunia berdasarkan nilai PISA pada tahun 2003 dan 2015 (OECD, 2004; OECD, 2016)

Gambar B.7: Nilai matematika PISA meningkat untuk semua siswa antara tahun 2003 dan 2015, tetapi peningkatan untuk siswa yang lebih miskin lebih kecil

(nilai matematika PISA, sumbu y; indeks kondisi sosial ekonomi, sumbu x)



Sumber: perkiraan Bank Dunia berdasarkan data dari PISA 2003 dan 2015 (OECD, 2004; OECD, 2016) Catatan: Indeks kondisi sosial ekonomi mengukur latar belakang ekonomi keluarga termasuk, antara lain, aset keluarga dan tingkat pendidikan

Evolusi dalam hasil ujian PISA berdasarkan status sosial ekonomi telah bervariasi

Antara tahun 2003 dan 2015, nilai PISA siswa dari rumah tangga di kelompok 50 persen terbawah dari distribusi penghasilan tetap relatif stabil, sementara nilai siswa di kelompok 50 persen penghasilan teratas mencatat peningkatan yang signifikan. Perbedaan yang berkembang ini dapat dinyatakan dalam bentuk tahun sekolah; kesenjangan setara dengan satu tahun masa sekolah di tahun 2003, yang meningkat menjadi dua tahun masa sekolah di tahun 2015 (Gambar B.7).

Menutup kesenjangan pembelajaran dengan negara-negara OECD akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi siswa miskin

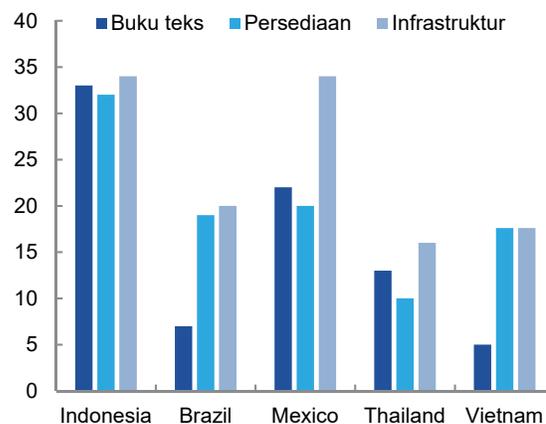
Jika Indonesia mempertahankan tingkat peningkatan dalam nilai PISA antara tahun 2003 dan 2015, akan diperlukan waktu sekitar 50 tahun untuk mencapai nilai rata-rata OECD dalam matematika, 69 tahun untuk membaca, dan 134 tahun untuk IPA. Untuk siswa dari kuartil (quartile) penghasilan yang terkaya, akan memakan waktu masing-masing 20 tahun, 33 tahun, dan 62 tahun untuk mencapai rata-rata OECD dalam matematika, membaca, dan IPA. Untuk siswa di kuartil termiskin, diperlukan waktu 136 tahun dalam matematika, 190 tahun dalam membaca, dan 484 tahun dalam IPA.

Hasil ujian PISA yang rendah menggaris-bawahi tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Di antara negara-negara peserta tes PISA, kepala sekolah Indonesia lebih cenderung mengindikasikan adanya kekurangan buku teks, perlengkapan sekolah, dan infrastruktur di sekolah mereka. Misalnya, 33 persen kepala sekolah di Indonesia mengindikasikan adanya kekurangan buku pelajaran yang tinggi. Ini adalah persentase yang lebih besar dibandingkan dengan para kepala sekolah di Meksiko (22 persen), Thailand (13 persen), Brasil (7 persen), dan Vietnam (5 persen) (Gambar B.8). Tantangan yang dihadapi dalam penyampaian layanan pendidikan juga dikonfirmasi oleh data administrasi Kemendikbud, yang menunjukkan bahwa, di antara indikator-indikator lain, hanya 25 persen ruang kelas dalam pendidikan dasar dan 40 persen ruang kelas di sekolah menengah atas yang berada dalam kondisi yang baik (Tabel B.2), dan hanya 21 persen sekolah di pendidikan dasar yang memperoleh akreditasi dengan tingkat A.

Gambar B.8: Menurut kepala sekolah, sekolah di Indonesia kekurangan banyak sumber daya yang penting

(pangsa kepala sekolah, persen)



Sumber: PISA 2015 (OECD, 2016)

Catatan: pangsa kepala sekolah yang menunjukkan “banyak” seperti yang ditanyakan pada kekurangan masukan pendidikan yang dipilih

Tabel B.2: Karakteristik sekolah menurut kondisi sosial ekonomi

	Pendidikan Dasar			Sekolah menengah atas & sekolah kejuruan		
	Kuintil Teratas	Kuintil Terbawah	Total rata-rata	Kuintil Teratas	Kuintil Terbawah	Rata-rata
Jumlah	277	124	191	499	183	368
Kelas yang kondisinya baik (%)	36%	19%	25%	52%	31%	40%
Usia guru	40	40	40	38	34	36
Guru yang memiliki gelar S1 (%)	86%	84%	86%	94%	93%	94%
Guru yang berstatus PNS (%)	43%	48%	48%	23%	15%	23%
Rasio murid-guru	19	15	17	19	14	17
Yang berhak menerima PIP	5%	85%	41%	4%	87%	41%
Ukuran kabupaten (jumlah murid)	155.521	111.966	127.728	60.924	32.238	41.293
Proporsi sekolah swasta (%)	31%	15%	17%	66%	70%	62%
Sekolah yang memiliki Akreditasi “A” (%)	35%	13%	21%	55%	14%	34%

Sumber: perkiraan Bank Dunia menggunakan DAPODIK

Catatan: Perkiraan kondisi sosial ekonomi sekolah dilakukan dengan menghitung jumlah siswa yang memenuhi syarat untuk menerima PIP

Kualitas pelayanan yang rendah sangat mempengaruhi siswa

Dalam pendidikan dasar, perbandingan sekolah yang diikuti oleh siswa kuintil terbawah dan kuintil teratas⁷⁸ menunjukkan bahwa sekolah yang diikuti oleh siswa kuintil terbawah memiliki proporsi yang lebih rendah dalam hal ruang kelas dalam kondisi baik, dan sekolah dengan akreditasi A (Tabel B.2). Perbedaan karakteristik dari sekolah yang melayani penduduk kuintil

⁷⁸ Yang diukur dengan jumlah siswa yang bersekolah yang memenuhi syarat untuk Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah bantuan tunai kepada siswa miskin.

dari segmen penduduk miskin

terbawah dan kuintil teratas meningkat ketika siswa mencapai sekolah menengah atas. Sekolah-sekolah yang diikuti oleh penduduk kuintil terbawah cenderung lebih kecil dan cenderung berada di kabupaten/kota yang lebih kecil. Bukti juga menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang lebih kecil cenderung memiliki kapasitas yang lebih rendah, dan sekolah yang lebih kecil memiliki nilai yang lebih rendah dalam ujian nasional (Cislowksi, 2018).

3. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari investasi sumber daya manusia, Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih baik dan pelaksanaan yang lebih baik

Apa yang membatasi reformasi pendidikan untuk mencapai potensinya?

Meskipun unsur-unsur utama reformasi sudah ada, beberapa bahannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Di bawah ini kami menyajikan tantangan pelaksanaan utama dari kebijakan-kebijakan yang dijelaskan di Bagian B.2.

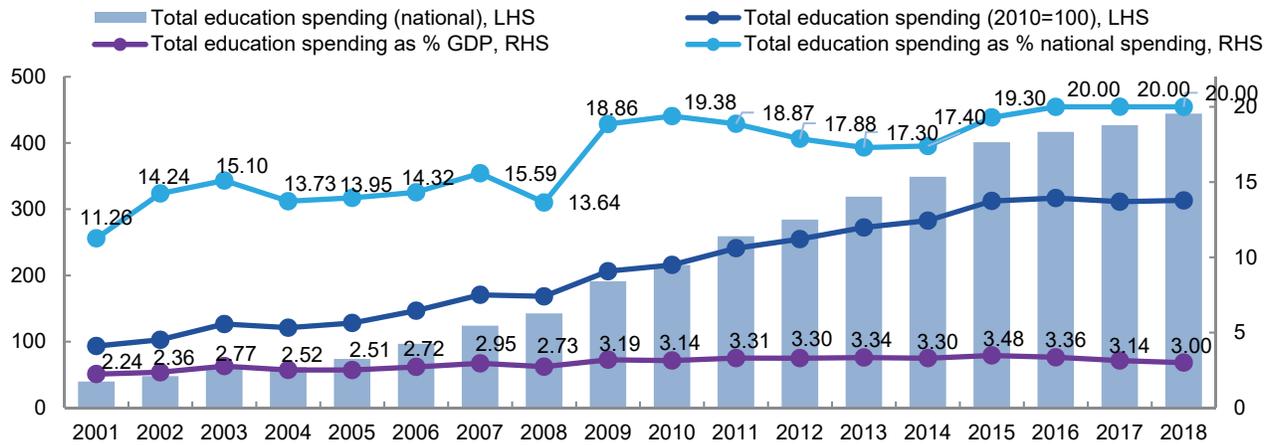
a. Sumber daya tambahan belum dapat meningkatkan kualitas pendidikan

Sumber daya keuangan yang diberikan ke sektor pendidikan telah meningkat tiga kali lipat secara riil selama 15 tahun terakhir ini

Pada tahun 2009, pendanaan untuk pendidikan mencapai 20 persen dari APBN.⁷⁹ Seiring dengan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2009, jumlah keseluruhan yang dialokasikan untuk pendidikan dalam APBN juga meningkat (Gambar B.9), dan karena APBN diperkirakan akan meningkat (IMF, 2018), anggaran pendidikan juga akan meningkat.

Gambar B.9: Sumber daya untuk pendidikan telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2001

(Rp Triliun, Seb. Kiri; persen dari PDB dan belanja, Seb. Kanan)



Sumber: Database COFIS Bank Dunia menggunakan data Kemenkeu dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN tahun-tahun yang bersangkutan

Catatan: Realisasi data belanja pendidikan tersedia hingga 2014. Data tahun 2016 dan 2017 adalah data APBN-P, tahun 2018 adalah data APBN. Realisasi data belanja mungkin belum termasuk sebagian belanja pendidikan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang dimasukkan di bawah fungsi Administrasi Umum

⁷⁹ Pemenuhan amanat ini tidak langsung terealisasi karena harus mengidentifikasi kategori pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan dan menyelaraskan anggaran secara menyeluruh di APBN.

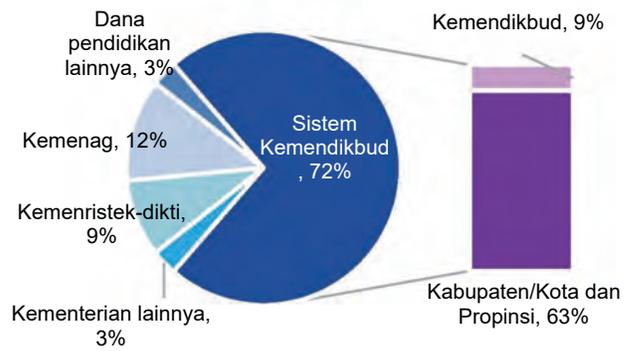
Pemerintah daerah menerima porsi terbesar anggaran pendidikan, sementara Kemendikbud hanya mengelola 9 persennya

Pendidikan dasar dan menengah umum adalah tanggung jawab bersama antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Dari Rp 319 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan umum, Kemendikbud menerima Rp 40 triliun, sedangkan sisanya, Rp 279 triliun, diterima oleh pemerintah daerah. Dari sisa anggaran tersebut, Kemenag (Kementerian Agama) mendapat alokasi sebesar Rp 52 triliun, Kemenristedikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) menerima Rp 40 triliun untuk pendidikan tersier, dan Rp 13 triliun untuk pelatihan (Gambar B.10).

Meskipun ada peningkatan, belanja pendidikan masih di bawah negara-negara lain di kawasan dalam beberapa metrik

Alokasi sebesar 20 persen dari APBN untuk pendidikan adalah salah satu yang terbesar di dunia, yang menunjukkan upaya fiskal yang besar, tetapi ada metrik lain dari pengeluaran pendidikan, yang tidak terkait dengan APBN, di mana Indonesia masih tertinggal. Sebagai contoh, dalam hal PDB, Indonesia hanya mengalokasikan 3,3 persen dari PDB, di bawah Vietnam (6,3 persen) atau Thailand (4,1 persen) (Tabel B.3). Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan pengeluaran pendidikan terendah di antara semua negara yang berpartisipasi dalam tes PISA 2015 (Gambar B.11).

Gambar B.10: Distribusi anggaran pendidikan (2018)
(proporsi dari total)



Sumber: Peraturan Presiden No. 107/2017 tentang rincian anggaran pendidikan untuk tahun 2018

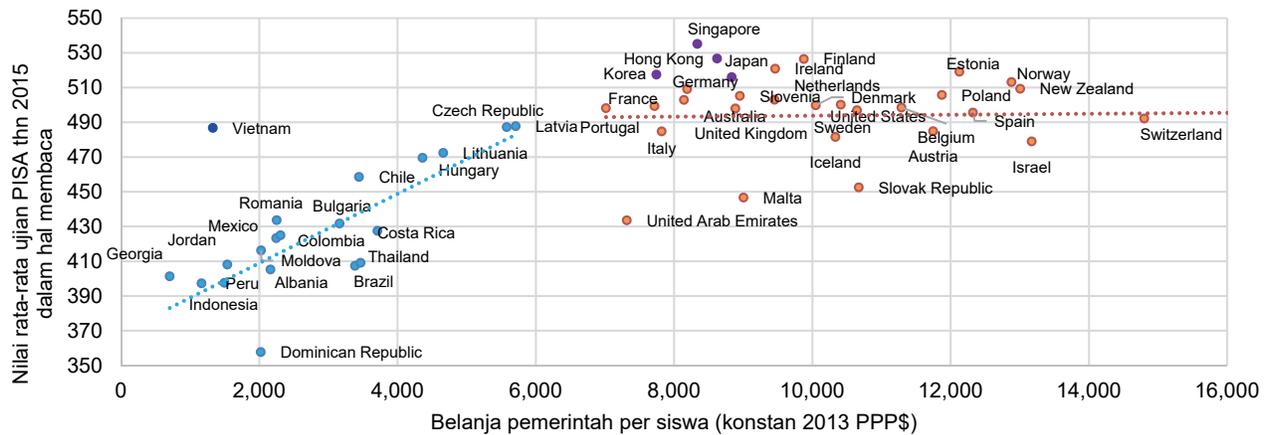
dikelola oleh kementerian lain, sebagian besar untuk

Tabel B.3: Pengeluaran Indonesia di sektor pendidikan masih di bawah negara-negara di Asia Timur

Negara	Belanja pemerintah untuk pendidikan sebagai% dari PDB				PDB p.k. (USD)
	2000	2005	2010	Yg terbaru*	
Singapura	3,6	2,9	3,1	3,0	52.889
Jepang	3,6	3,5	3,8	3,8	34.524
Rep. Korea	4,3	3,9	4,9	4,6	27.222
Tiongkok	-	2,8	3,6	3,9	8.069
Vietnam	-	-	6,3	6,3	3.968
Thailand	5,3	3,9	3,5	4,1	5.815
Malaysia	6,0	-	5,0	6,1	9.768
Indonesia	-	2,9	2,8	3,3	3.346
Filipina	3,3	2,4	2,2	2,6	2.904
Mongolia	5,6	-	4,6	4,6	3.968
PNG	-	-	-	4,8	2.268
RDR Laos	1,5	2,4	2,8	4,2	1.818
Timor-Leste	-	-	10,5	7,7	1.217
Myanmar	<1,0	-	0,7	2,0	1.161
Kamboja	1,7	-	1,9	2,7	1.159

Sumber: EdStats Bank Dunia

Gambar B.11: Indonesia adalah salah satu negara dengan belanja pendidikan terendah di antara peserta PISA



Sumber: EdStats dan PISA Bank Dunia 2015 (OECD, 2016)

Pengeluaran yang rendah untuk PAUD menandakan adanya masalah dengan alokasi anggaran di Indonesia

Meskipun bukti empiris menunjukkan bahwa PAUD berkualitas tinggi akan memberikan hasil investasi yang tinggi, dana pemerintah untuk sub-sektor ini dibatasi. Pada tahun 2017, pendanaan untuk PAUD hanya 0,12 persen dari anggaran pemerintah pusat untuk pendidikan. Sebagai langkah untuk meningkatkan sumber daya bagi PAUD, dana transfer ke daerah untuk biaya operasional layanan PAUD (BoP PAUD / Bantuan Operasional PAUD) diberlakukan pada tahun 2015. Dana transfer ini bertujuan untuk mengatasi sumber daya keuangan yang tidak mencukupi untuk kegiatan operasional PAUD. Untuk tahun 2018, sekitar Rp 4 triliun untuk program BoP ini akan ditransfer ke pemerintah daerah untuk membiayai sekitar 6,7 juta anak yang terdaftar dalam layanan PAUD terdaftar, dengan biaya per unit sebesar Rp 600.000 per siswa PAUD.

Indonesia mungkin belum memprioritaskan pengeluaran yang paling penting

Anggaran pendidikan di Indonesia telah meningkat secara dramatis selama lima belas tahun terakhir. Hal ini tidak hanya menghasilkan peningkatan yang masih terbatas dalam hal pembelajaran siswa, tetapi juga meningkatkan angka partisipasi sekolah. Selain itu, ada sektor-sektor penting dalam pendidikan, seperti PAUD, yang belum mendapat manfaat dari peningkatan anggaran tersebut dan ini mungkin memiliki dampak negatif pada kinerja pendidikan di pendidikan dasar dan pendidikan lanjutannya.

b. Untuk meningkatkan hasil pendidikan, kapasitas semua pelaku serta koordinasi di antara mereka harus ditingkatkan

Operasionalisasi struktur pemerintahan yang menerapkan sistem desentralisasi menuntut para pelaku untuk memiliki fungsi yang jelas dan kapasitas yang tinggi

Dengan adanya undang-undang pendidikan dan desentralisasi, pengelolaan pendidikan saat ini menjadi tanggung jawab bersama sekolah, komite sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Partisipasi besar dari pemerintah provinsi di sektor ini dimulai pada tahun 2014⁸⁰. Peran dan tanggung jawab komite sekolah dalam perencanaan dan pemantauan penyediaan layanan pendidikan diatur berdasarkan UU Pendidikan, sementara peran pemerintah daerah diatur berdasarkan undang-undang desentralisasi, terutama yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Reformasi pendidikan membutuhkan kapasitas implementasi yang tepat dari dua pelaku utama yang baru, komite sekolah dan pemerintah daerah, serta aturan keterlibatan yang jelas. Dalam kedua hal tersebut terdapat tantangan-tantangan yang besar, karena kapasitas yang bervariasi, dan kurang jelasnya peraturan yang ditetapkan. SPM harus memberi panduan bagi keputusan para pemangku kepentingan pendidikan, tetapi kepatuhan terhadap SPM rendah, dan bahkan lebih rendah lagi di kabupaten/kota yang lebih kecil. Kebijakan untuk mendukung dan menegakkan kepatuhan terhadap SPM saat ini tidak ada. Selain pencapaian SPM, ada bidang lain dari sistem manajemen pendidikan dengan peraturan yang

⁸⁰ UU No. 23 tahun 2014 mengalihkan tanggung jawab untuk mengelola sekolah menengah atas dari kabupaten ke provinsi.

tumpang tindih yang mungkin mengakibatkan kekurangan (pelatihan guru) atau kelebihan (jumlah sekolah) dari beberapa layanan pendidikan.

Undang-Undang Pendidikan mengamanatkan penguatan manajemen berbasis sekolah, tetapi pemilihan badan-badan utama tata kelola, yaitu komite sekolah, tidak transparan dan peraturan tidak ditetapkan secara jelas

Reformasi menciptakan mekanisme untuk peningkatan hasil sekolah dengan membawa pengelolaan sekolah lebih dekat kepada penerima manfaat, termasuk dengan meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan di sekolah⁸¹. Sebagian besar sekolah secara formal membentuk lembaga dan proses yang dipersyaratkan untuk manajemen berbasis sekolah. Meskipun demikian, partisipasi dari para pelaku yang berbeda dalam manajemen sekolah sangat bervariasi, membatasi dampak positifnya pada hasil belajar siswa. Dalam hal ini, survei sekolah yang representatif secara nasional di Indonesia mendapati bahwa tingkat partisipasi dan keterwakilan orang tua di dalam manajemen sekolah dan pengambilan keputusan sangat rendah. Kepala sekolah memiliki lebih banyak otonomi dalam sejumlah besar keputusan sekolah. Berkaitan dengan komite sekolah, survei yang sama mendapati bahwa komite sekolah ini ada di semua sekolah, tetapi pemilihan anggotanya tidak transparan (Al-Samarrai, dkk., 2014). Selain masalah transparansi, kurangnya kejelasan mengenai peraturan di komite sekolah juga telah menghambat pelaksanaan dari manajemen berbasis sekolah. Terlepas dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, masih ada kesenjangan dalam definisi peran dan fungsi komite, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam proses belajar mengajar. Pelaksanaan peraturan juga dipersulit dengan sosialisasi yang terbatas dan kurangnya pedoman teknis umum atau tindak lanjut dari Dinas pendidikan setempat yang melengkapi keputusan menteri tersebut.

Undang-undang desentralisasi mengalihkan pengelolaan pendidikan ke lebih dari 500 pemerintah daerah yang bervariasi

Di Indonesia, terdapat lebih dari 500 kabupaten/kota, dengan kondisi sosial ekonomi dan geografis serta kapasitas kelembagaan yang berbeda, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerapkan kebijakan pendidikan. Mengalihkan tanggung jawab dalam pemberian layanan pendidikan ke pemerintah daerah yang bervariasi ini memicu kekhawatiran politisasi dalam pengelolaan pendidikan. Misalnya, telah dilaporkan bahwa di beberapa daerah, proses di tingkat kabupaten/kota digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ke sekolah-sekolah dengan cara yang kurang transparan, dan dikhawatirkan adanya “skimming atau politisasi” yang mengarah pada “...penyediaan layanan yang tidak memadai dan pengurangan diskresi (keputusan berdasarkan kebijaksanaan – pent.) di tingkat sekolah” (OECD, 2015).

Pemerintah daerah menerima bagian terbesar (dan peningkatan) dari anggaran pendidikan

Pemerintah daerah menerima dana transfer pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemanfaatan umum (DAU), dan dana transfer dengan mandat untuk mendanai kegiatan khusus (DAK). Pemerintah daerah memiliki kendali atas dana DAU, meskipun mereka menggunakan sekitar 45 persen dari DAU ini untuk membayar gaji pegawai negeri sipil⁸². Dana DAK dialokasikan untuk mendanai BOS, tunjangan profesi guru (TPG), dan beberapa infrastruktur sekolah. Total dana transfer ke pemerintah daerah meningkat sebesar 25 persen secara riil antara tahun 2011 dan 2017, sementara Anggaran Pendidikan Nasional hanya meningkat sebesar 16 persen pada periode tersebut. Peningkatan terbesar dalam pendanaan diamati dalam DAK (84 persen) sementara DAU meningkat sebesar 11 persen.

Pemerintah daerah membuat anggaran mereka sendiri dengan dana yang tersedia,

DAU, DAK dan dana transfer lainnya dilengkapi dengan pendapatan asli daerah pemerintah daerah sendiri. DAU dan sumber daya lokal digunakan untuk membayar gaji guru PNS⁸³, dan biaya pendidikan daerah lainnya (termasuk guru kontrak). Pada tahun 2017, dana transfer DAU dan DAK dari APBN ke pemerintah daerah adalah sebesar Rp 253 triliun, di mana 42 persennya mewakili dana transfer yang dialokasikan untuk DAK, dan 58 persen mewakili dana DAU⁸⁴.

⁸¹ Chen (2011) menunjukkan dampak positif dari desentralisasi sekolah di Indonesia.

⁸² Perkiraan Bank Dunia berdasarkan asumsi berikut ini: Kabupaten mengalokasikan 37% dari DAU secara keseluruhan untuk pendidikan dan gaji guru tahunan sebesar Rp50 juta per tahun.

⁸³ Skala gajinya ditetapkan oleh peraturan pegawai negeri sipil.

⁸⁴ Menurut Kemenkeu, 37 persen dari DAU dialokasikan untuk pendidikan.

memutuskan berapa banyak yang dialokasikan untuk pendidikan berdasarkan prioritas mereka

Dari sumber daya DAU tersebut, sekitar 45 persennya dipergunakan untuk membayar gaji guru PNS, dan sisanya sebesar 55 persen digunakan untuk *biaya pendidikan daerah lainnya* (Tabel B.4). Tidak terdapat informasi yang lengkap mengenai jumlah sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pendidikan dari pendapatan asli daerah mereka sendiri.

Tabel B.4: Perkiraan distribusi APBN menurut ukuran provinsi
(total dalam triliun Rp)

	Pembayaran gaji PNS	DAU Biaya pendidikan daerah lainnya	DAK	TOTAL
Besar (5 provinsi)	29,6	23,5	53,8	106,9
Menengah (8 provinsi)	19,7	16,3	25,7	58,7
Kecil (21 provinsi)	19,8	41,3	26,6	87,7
Total	65,9	81,1	106,2	253,3

	Pembayaran gaji PNS	DAU Biaya pendidikan daerah lainnya	DAK	TOTAL
Besar (5 provinsi)	1,2	1,0	2,3	4,5
Menengah (8 provinsi)	1,5	1,5	2,3	5,3
Kecil (21 provinsi)	1,9	3,9	2,5	8,4
Rata-rata	1,5	1,8	2,3	5,6

Sumber APBD. Perkiraan siswa dari SUSENAS

Catatan: DAU adalah transfer pemerintah pusat untuk penggunaan umum; DAK adalah transfer dengan mandat tertentu.

Provinsi besar memiliki lebih dari 2 juta siswa. Provinsi menengah memiliki antara 1 hingga 2 juta siswa. Provinsi kecil memiliki kurang dari 1 juta siswa. Untuk perkiraan, diasumsikan bahwa 37 persen dari sumber daya DAU secara keseluruhan di tingkat provinsi dialokasikan untuk pendidikan. Informasi provinsi mencakup informasi gabungan dari data tingkat kabupaten.

Formula DAU mendukung provinsi yang lebih kecil, menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam sumber daya per siswa

Sekitar 23 persen siswa di pendidikan dasar tinggal di kabupaten/kota di provinsi-provinsi kecil, yang menerima (termasuk alokasi anggaran provinsi dan kabupaten) sekitar 41 persen dari total sumber daya nasional yang dialokasikan ke tingkat daerah. Pada tahun 2017, rata-rata sumber daya yang dianggarkan per siswa di provinsi-provinsi kecil adalah sebesar Rp 8,4 juta, sedangkan sumber daya yang dianggarkan per siswa di provinsi-provinsi besar adalah sebesar Rp 4,5 juta. Perbedaan yang lebih besar ada pada biaya pendidikan daerah lainnya; provinsi kecil menganggarkan Rp 3,9 juta per siswa, sementara provinsi besar menganggarkan Rp 1,0 juta, dengan rasio mendekati 4 banding 1.

Tidak terdapat informasi yang mencukupi dalam penggunaan sumber daya yang dikendalikan oleh pemerintah daerah

Meskipun ada peningkatan baru-baru ini dalam pengumpulan data dari pemerintah daerah oleh Kementerian Keuangan, masih ada kesenjangan informasi yang signifikan tentang penggunaan sumber daya oleh pemerintah daerah. Ada beberapa informasi yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan program sejenis BOS daerah, di antara biaya pendidikan daerah lainnya, yang disebut sebagai BOSDA, dan program-program untuk meningkatkan kualitas guru, tetapi belum ada bukti mengenai efisiensi dari program-program tersebut. Sistem monitoring yang lebih baik harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk menilai penggunaan sumber daya pada biaya pendidikan daerah lainnya. Rancangan mekanisme tersebut harus mempertimbangkan kapasitas yang rendah di banyak kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan khususnya kapasitas yang lebih rendah dari kabupaten/kota yang lebih kecil. Dibandingkan dengan DAU, terdapat lebih banyak informasi mengenai penggunaan dana DAK. Dana transfer DAK yang utama, BOS dan TPG, telah menjadi subyek penelitian yang signifikan di masa lalu, dan hasil dari penelitian tersebut, yang akan disajikan di bawah ini, menunjukkan bahwa tujuan mereka hanya sebagian saja yang telah dipenuhi.

BOS telah membantu peningkatan pendidikan dasar, tetapi beberapa faktor telah membatasi dampaknya terhadap kualitas pendidikan

Sebagai contoh, evaluasi sepuluh tahunan dari program BOS oleh Al-Samarrai, dkk. (2014) mendapati bahwa meskipun program BOS memperkecil pengeluaran rumah tangga untuk bidang pendidikan, terutama di kalangan siswa miskin, dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi di sekolah menengah pertama di antara rumah tangga miskin, penggunaan BOS tidaklah berkaitan dengan hasil pendidikan, karena banyak sekolah menggunakan dana BOS untuk mempekerjakan guru kontrak⁸⁵. Komite sekolah memiliki pengaruh yang kecil terhadap penggunaan BOS dan oleh karena itu memiliki dampak yang kecil pada mutu pendidikan. Pemerintah daerah juga menerima sedikit dukungan dalam pelaksanaan program BOS. Faktor-faktor ini telah menghambat program BOS dalam mencapai tujuannya.

Meskipun dana TPG yang dikaitkan dengan sertifikasi guru meningkatkan kesejahteraan guru, hasil evaluasi menyimpulkan bahwa dana ini tidak berdampak pada prestasi siswa

Sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen, guru yang memenuhi persyaratan minimum dan sudah disertifikasi berhak mendapat tunjangan (Tunjangan Profesi Guru, TPG). Saat ini, pemerintah membayar tunjangan profesi guru kepada 1,6 juta guru, dan total dana yang diproyeksikan untuk TPG mencapai Rp 58,5 triliun untuk tahun 2018 atau sekitar 13 persen dari total anggaran pendidikan. Saat ini terdapat 0,8 juta guru yang sudah memenuhi syarat untuk sertifikasi, dan, jika mereka disertifikasi, ini akan membutuhkan peningkatan pengeluaran TPG sebesar 50 persen. Sertifikasi guru dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi guru, dan secara bersamaan untuk meningkatkan gaji guru. Namun demikian, insentif yang tersirat dalam dua tujuan ini tidak selaras, mengakibatkan adanya gangguan politik dan ekonomi yang telah menunda proses reformasi dan, khususnya dalam beberapa tahun pertama, mengakibatkan turunnya persyaratan sertifikasi (Chang, dkk, 2014). Evaluasi program sertifikasi pada tahun 2012 (de Ree dkk., 2017) mendapati bahwa nilai siswa tidak meningkat, tetapi kesejahteraan gurulah yang meningkat, seperti yang ditunjukkan, misalnya, oleh guru yang berhenti dari pekerjaan kedua mereka. Pada tahun 2012 dan tahun 2018, prosedur sertifikasi berubah (dibahas di bawah), tetapi evaluasi dampak dari mekanisme baru ini pada pembelajaran siswa belum dilakukan.

Diperlukan adanya kerjasama lebih lanjut antara sekolah dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan dampak sumber daya dalam pendidikan

Beberapa daerah melaksanakan program pendidikan mereka yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, tetapi perlu untuk menciptakan sinergi antara program-program tersebut dan program yang dibiayai oleh DAK untuk memaksimalkan hasilnya. Data yang ada menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di kabupaten/kota dengan jumlah sumber daya yang lebih besar mengalokasikan dana BOS yang lebih sedikit untuk membayar gaji guru kontrak, menunjukkan dukungan yang mungkin diberikan oleh pemerintah daerah ke sekolah-sekolah yang lebih menyukai penggunaan dana BOS untuk membiayai kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran. Selain itu, ada semakin banyak pemerintah daerah yang meluncurkan program sejenis BOS mereka sendiri, atau BOSDA, dan pemerintah daerah terkadang menginstruksikan sekolah di wilayah mereka untuk melaksanakan perencanaan bersama sumber daya BOS dan BOSDA dalam upaya untuk memaksimalkan dampaknya. Dalam beberapa kasus, seperti di Surabaya dan DKI Jakarta, pemerintah daerah mendukung perencanaan bersama, menyediakan alat perencanaan kepada sekolah, seperti e-RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Berbasis Elektronik).

SPM dibentuk untuk memberi panduan bagi penyediaan

Undang-Undang Desentralisasi menetapkan bahwa pengelolaan pendidikan dasar adalah tanggung jawab pemerintah daerah, di bawah bimbingan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat⁸⁶. Terdapat 44 SPM, dan hubungannya dengan pembelajaran siswa dari beberapa indikator

⁸⁵ Bukti menunjukkan bahwa guru kontrak memiliki lebih sedikit penguasaan bahan dibandingkan dengan guru PNS (Gambar B.19)

⁸⁶ SPM dibentuk pertama kali oleh Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005. Di sektor pendidikan, SPM ini diperbarui oleh Permendikbud No. 23 tahun 2013. Saat ini, ada 44 SPM di sektor pendidikan, di mana 4 SPM adalah indikator di tingkat kabupaten dan 40 adalah indikator di tingkat sekolah. Beberapa SPM terhubung dengan keputusan di tingkat sekolah untuk menggunakan sumber daya, seperti keputusan mengenai penggunaan BOS (misalnya, SPM tentang penyediaan buku teks dan materi pendidikan lainnya di sekolah), atau keputusan di tingkat kabupaten mengenai anggaran kabupaten (misalnya, SPM tentang penyediaan kelas untuk setiap kelompok siswa di sekolah). SPM lainnya terkait dengan proses di tingkat sekolah (misalnya, SPM mengenai guru yang menyerahkan laporan kepada kepala sekolah tentang hasil siswa di setiap semester), atau di tingkat kabupaten (misalnya, SPM mengenai kunjungan pengawas sekolah ke sekolah).

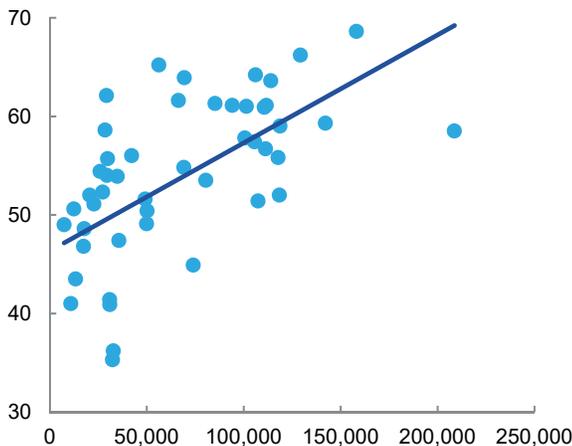
layanan pendidikan; namun demikian, dalam banyak kasus, layanan pendidikan tersebut tidak terpenuhi

belum diuji. Mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap SPM masih lemah, dengan sistem monitoring yang bergantung pada pelaporan diri. Oleh karena itu, kepatuhan keseluruhan dari SPM rendah. Undang-undang tidak menetapkan sanksi atas kegagalan untuk mencapai SPM, dan tidak memberi insentif di antara para penyedia layanan untuk memprioritaskan pencapaiannya.

Kabupaten/kota yang lebih kecil cenderung memiliki kapasitas yang rendah untuk tata kelola pendidikan

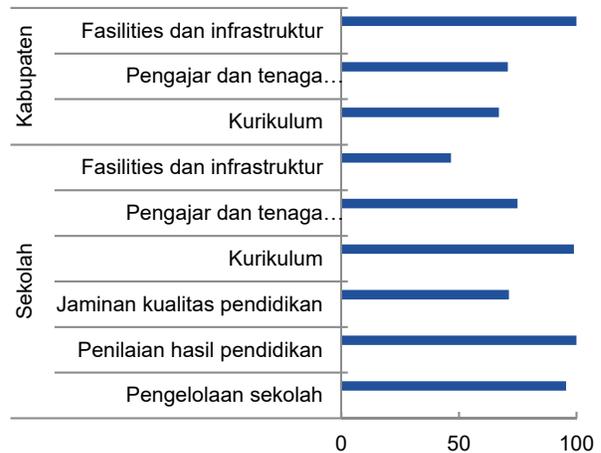
Pada tahun 2009 dan 2012, Bank Dunia melakukan survei di 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk menyelidiki perbedaan dalam kapasitas mereka untuk mengelola sistem pendidikan. Studi tersebut menyusun *Indonesian Local Education Governance Index (ILEG)*, yang mencakup beberapa bidang penting dari tata kelola pendidikan⁸⁷ (Al-Samarrai, dkk., 2013), dan menunjukkan perbedaan yang penting dalam ILEG di seluruh kabupaten/kota yang berpartisipasi, dengan beberapa kabupaten/kota mencapai nilai yang sangat rendah di semua dimensi ILEG (Gambar B.12). Faktor penentu nilai ILEG yang rendah ini antara lain adalah kondisi sosial ekonomi, dan, secara umum, jumlah anak usia sekolah. Kabupaten/kota dengan jumlah anak usia sekolah yang lebih kecil cenderung memiliki nilai ILEG yang lebih rendah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah harus berfokus terutama pada kabupaten/kota yang lebih kecil ini, terutama mengingat bahwa kabupaten/kota yang lebih kecil menerima sumber daya per kapita dan per siswa yang lebih besar (sudah dibahas di atas).

Gambar B.12: Kabupaten/kota yang lebih kecil cenderung memiliki kapasitas yang rendah untuk mengelola sistem pendidikan
(indeks tata kelola pendidikan daerah; populasi sekolah)



Sumber: Al-Samarrai, dkk (2013) dan DAPODIK
Catatan: Nilai yang mungkin untuk rentang indeks ILEG dari 0 sampai 100. Tidak ada sekolah yang mendapat nilai lebih tinggi dari 75. Nilai di bawah 45 diklasifikasikan sebagai kinerja yang rendah, 45-60 sebagai kinerja rata-rata, dan di atas 60 persen sebagai kinerja yang tinggi

Gambar B.13: Sebagian besar kabupaten/kota tidak memenuhi semua SPM, dengan kesenjangan yang lebih besar dalam SPM untuk fasilitas dan infrastruktur di tingkat sekolah, yang menandakan kondisi sekolah yang kurang baik
(persen)



Sumber: Sistem pemantauan SPM

Meskipun memiliki sumber daya yang lebih besar, kabupaten/kota yang lebih kecil

Di tingkat kabupaten/kota, SPM mendefinisikan sarana dan prasarana (untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah pertama), tenaga kependidikan, dan kurikulum. Berkenaan dengan fasilitas, semua kabupaten/kota di Indonesia memenuhi SPM yang mengamanatkan keberadaan sekolah di semua wilayah geografis. Namun demikian, hanya 70 persen kabupaten/kota yang memenuhi SPM pada tenaga kependidikan. Berkaitan dengan SPM yang terkait dengan

⁸⁷ Wilayah yang dianalisis adalah: transparansi dan akuntabilitas, standar penyediaan layanan pendidikan, pengelolaan sistem pengendalian, pengelolaan sistem informasi, dan penggunaan sumber daya secara efisien.

menghadapi lebih banyak tantangan untuk memenuhi SPM

pelaksanaan kurikulum, 67 persen kabupaten memenuhinya (Gambar B.13). Untuk SPM pada tenaga kependidikan dan kurikulum, kabupaten/kota yang berada di provinsi yang lebih kecil memiliki tingkat pencapaian SPM yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di provinsi yang lebih besar, menandakan adanya tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh kabupaten yang lebih kecil. Di tingkat sekolah, terdapat 40 SPM⁸⁸. Seperti dalam kasus SPM tingkat kabupaten/kota, tantangan pelaksanaan yang lebih besar dari SPM tingkat sekolah didapati di kabupaten/kota yang lebih kecil.

PAUD dan pendidikan menengah atas telah beroperasi tanpa adanya SPM

SPM untuk PAUD dan sekolah menengah atas baru dibuat belum lama ini⁸⁹. Meskipun telah terjadi perbaikan ini, indikator SPM untuk PAUD dan sekolah menengah atas belum cukup rinci untuk memberi panduan bagi penyediaan layanan pendidikan yang efektif pada tingkat tersebut, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai SPM yang baru ini di kabupaten/kota dan provinsi belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Seiring dengan adanya tantangan pencapaian SPM, kerangka kerja kelembagaan saat ini juga telah mengakibatkan adanya kesenjangan koordinasi di antara para pelaku dalam tata kelola pendidikan

Kurangnya koordinasi mempengaruhi proses utama di sektor pendidikan, seperti mekanisme pelatihan guru dan kendali mutu di sekolah. Pertama, pelatihan guru yang efektif, sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas guru, belum ditetapkan dengan jelas sebagai tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah. Terlepas dari adanya variasi dari hasil evaluasi dampak pelatihan guru pada kualitas guru dan pembelajaran siswa, penelitian menunjukkan bahwa pelatihan guru, jika diterapkan secara efektif, dapat secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan hasil siswa (Popova, dkk., 2016). Sayangnya, di Indonesia pelatihan guru belum secara tepat ditetapkan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah. Tanpa mandat yang jelas, pembiayaan pelatihan guru di tingkat kabupaten/kota bervariasi dan tergantung pada prioritas pemerintah daerah. Kedua, para pelaku yang berbeda mengintervensi mekanisme pengendalian kualitas pendidikan di sekolah, dengan peraturan yang tidak selaras. Untuk dapat mulai beroperasi secara formal, dan agar memenuhi syarat untuk menerima dana pemerintah, sekolah harus mendapat perizinan dari pemerintah daerah. Setelah mempunyai izin, sekolah menerima transfer BOS per siswa, dengan transfer minimum yang setara dengan pendaftaran 60 siswa, walaupun jika jumlah siswa yang sebenarnya lebih rendah. Kemudian, sekolah harus melalui proses akreditasi. Namun demikian, standar akreditasi sekolah dan SPM tidak selaras, karena jumlah sekolah yang meraih akreditasi lebih besar daripada sekolah yang mencapai standar minimum (OECD, 2015).

⁸⁸ Pada SPM di tingkat sekolah, tantangan terbesar dalam pencapaiannya terkait dengan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta jaminan kualitas. Secara rata-rata, kabupaten di provinsi yang lebih besar memiliki tingkat pencapaian SPM di tingkat sekolah yang lebih tinggi.

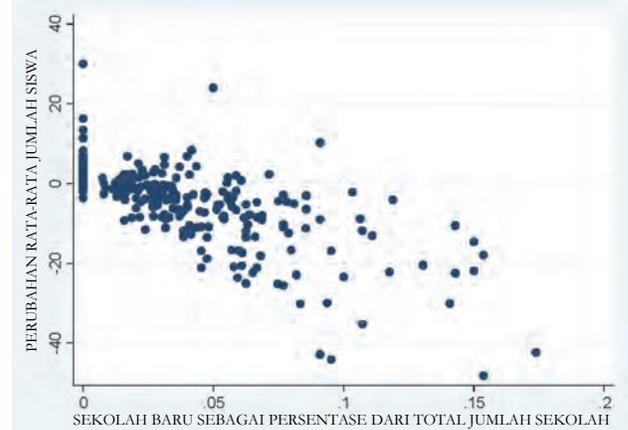
⁸⁹ Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018, yang akan dilaksanakan secara efektif pada bulan Januari 2019.

Alokasi minimum BOS berdasarkan ukuran sekolah dapat mengakibatkan insentif yang merugikan

Untuk administrator sekolah, relatif mudah untuk membuka dan memberi izin operasional sekolah-sekolah baru, dan mereka secara otomatis berhak untuk menerima sumber daya BOS. Menurut DAPODIK (Data Pokok Pendidikan/database Kemendikbud), lebih dari 1.200 sekolah dibangun di Indonesia antara tahun 2016 dan 2017. Sebagian besar adalah sekolah kecil yang berada di daerah pedesaan. Sekolah-sekolah baru dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendaftaran masuk sekolah, tetapi juga dapat mengurangi ukuran sekolah yang ada ke tingkat yang tidak optimal (Gambar B.14). Dalam beberapa

Gambar B.14: Ketika sekolah-sekolah baru bermunculan, rata-rata ukuran sekolah di kabupaten menurun

(perubahan rata-rata jumlah siswa; sekolah baru sebagai persentase dari total jumlah sekolah)



Sumber: perkiraan Bank Dunia berdasarkan DAPODIK.

tahun terakhir ini, terjadi penurunan ukuran sekolah ketika sekolah-sekolah baru bermunculan. Seiring dengan kemajuan Indonesia, mekanisme perizinan harus ditingkatkan untuk menjamin bahwa sekolah-sekolah baru dibuka karena diperlukan dan memenuhi standar minimum.

Beberapa intervensi menjanjikan peningkatan kapasitas daerah...

Selain peraturan baru tentang SPM, beberapa program telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sektor pendidikan di tingkat daerah. Untuk meningkatkan pengelolaan di tingkat sekolah, beberapa kabupaten/kota menerapkan platform berbasis web untuk meningkatkan penggunaan sumber daya BOS, dan beberapa program telah diluncurkan untuk meningkatkan kapasitas di tingkat daerah, termasuk *Basic Education Capacity* (BEC), *Minimum Service Standards Capacity Development* (MSSCD), *Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administration, and Students* (PRIORITAS), dan *Innovation for Indonesia's School Children* (INOVASI)⁹⁰.

...tetapi pemantauan yang memadai diperlukan untuk menjamin hasil yang baik

Pada tahun 2014, Kemendikbud meluncurkan DAPODIK, suatu platform berbasis web yang mengumpulkan informasi tentang guru, siswa dan karakteristik sekolah, yang memungkinkan dilakukannya pemantauan langsung terhadap pencapaian beberapa SPM. DAPODIK dapat diakses oleh sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Kemendikbud sedang mengevaluasi penambahan variabel ke dalam sistem informasi ini dan merancang strategi untuk meningkatkan akurasi untuk mendukung pengelolaan sektor tersebut. Potensi DAPODIK untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan sektor pendidikan sangat besar, terbukti ketika platform ini memungkinkan Kemendikbud untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang lebih kecil yang harus digabung dengan yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi.

Perhatian khusus harus dialokasikan ke kabupaten/kota kecil, karena secara

peningkatan efisiensi pada penggunaan dana BOS dan TPG oleh pemerintah pusat harus diselaraskan dengan tindakan komplementer oleh pemerintah daerah, terutama di kabupaten/kota dengan sumber daya terbesar untuk pendidikan. Efektivitas dan efisiensi belanja pendidikan daerah harus dipantau, terutama di kabupaten/kota yang lebih kecil, di mana

⁹⁰ Proyek Pembangunan Kapasitas Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan dukungan Bank Dunia, antara tahun 2009 dan 2012; dan Program Pembangunan Kapasitas Standar Pelayanan Minimum yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan dukungan ADB, antara tahun 2013 dan 2017. Dalam kedua program tersebut, kabupaten menerima dana hibah untuk meningkatkan kapasitas mereka. Program PRIORITAS mendapat dukungan dari USAID, dan INOVASI mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan dari Pemerintah Australia.

keseluruhan mereka mengelola sebagian besar sumber daya pendidikan

kapasitas pengelolaannya cenderung lebih rendah, untuk memastikan bahwa bagian terbesar dari anggaran pendidikan digunakan secara lebih efisien. Ini akan membutuhkan perekrutan staf yang memiliki kualifikasi dan motivasi di bidang pendidikan di daerah, bersama dengan investasi dalam pembangunan kapasitas dan dalam berbagi informasi dengan kabupaten/kota yang telah mencapai tingkat pembelajaran yang lebih tinggi.

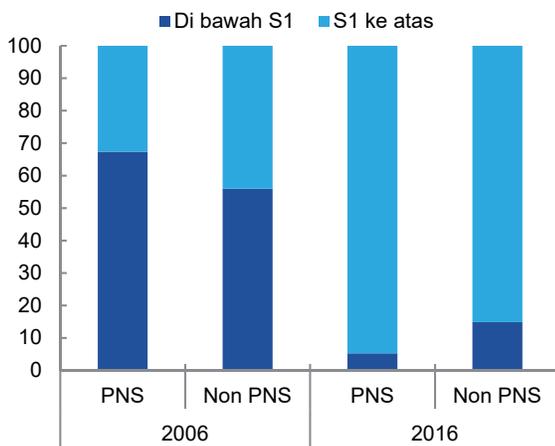
c. Tercatat adanya tantangan-tantangan utama dalam manajemen guru dan dalam pelaksanaan ujian nasional.

Peningkatan partisipasi sekolah disertai dengan peningkatan jumlah guru tetapi memiliki dampak yang terbatas pada pembelajaran siswa

Saat ini Indonesia memiliki 2,7 juta guru dalam pendidikan umum dan 0,7 juta lainnya dalam sistem pendidikan agama⁹¹. Antara tahun 2003 dan 2015, jumlah guru meningkat 30 persen, sementara jumlah siswa meningkat sebesar 25 persen, yang menyebabkan penurunan rasio siswa-guru. Karena lonjakan jumlah guru ini, dan seiring dengan peningkatan signifikan dalam belanja tunjangan guru, beban gaji guru meningkat secara signifikan selama periode tersebut. Saat ini secara keseluruhan kompensasi guru⁹² mewakili lebih dari 50 persen anggaran pendidikan umum. Namun demikian, peningkatan jumlah guru dan kompensasi mereka tidak disertai dengan peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan.

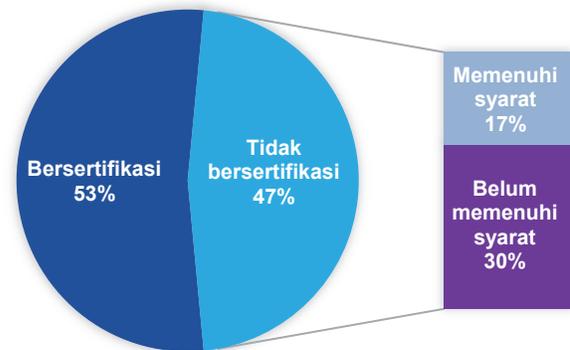
UU Guru adalah upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan berfokus pada kualitas guru. Undang-undang ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi guru, mengamankan gelar universitas dan sertifikasi guru untuk meningkatkan kompetensi guru, sebelum mereka memenuhi syarat untuk menerima TPG. Akibatnya, pangsa guru dengan gelar minimal sarjana S1 meningkat dari 37 persen pada tahun 2003 menjadi 90 persen pada tahun 2016 (Gambar B.15). Berkaitan dengan sertifikasi guru, pada tahun 2018, sekitar 50 persen guru di Indonesia telah memiliki sertifikat, 17 persen memenuhi syarat untuk sertifikasi, dan 30 persen belum memenuhi syarat untuk sertifikasi⁹³ (Gambar B.16).

Gambar B.15: Sebagian besar guru memiliki gelar sarjana (S1)
(persen)



Sumber: Sensus guru (2006) dan DAPODIK (2016)
Catatan: S1 artinya gelar sarjana strata 1. PNS dan non PNS mengacu pada status pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil.

Gambar B.16: Setengah dari guru pendidikan umum memiliki sertifikasi, dan sejumlah besar guru yang tidak memiliki sertifikasi juga memenuhi syarat untuk sertifikasi
(proporsi guru Kemendikbud, persen)



Sumber: DAPODIK (2017) dan Iskandar (segera terbit)

⁹¹ <http://jendela.data.kemdikbud.go.id/jendela/> & Statistik Pendidikan Islam tahun 2015/2016

⁹² Termasuk gaji pokok dan tunjangan.

⁹³ Guru mungkin tidak memenuhi syarat karena kualifikasi akademik yang tidak lengkap

Terlepas dari upaya profesionalisasi, bukti menunjukkan bahwa kompetensi guru masih rendah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa guru Indonesia harus meningkatkan penguasaan konten dan praktik pedagogis. Pada tahun 2015, Kemendikbud menguji semua guru sekolah, dan hasilnya menunjukkan bahwa pada skala 100 poin, nilai rata-ratanya adalah 53. Hasil tes sedikit bervariasi, terlepas dari status sertifikasi guru. Berkaitan dengan praktik guru di kelas, suatu penelitian video menemukan bahwa guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi pedagogis dasar: guru-guru Indonesia jarang mengajukan pertanyaan strategis dan terbuka yang memerlukan respon siswa yang kompleks dan spesifik yang akan menunjukkan pemahaman siswa. Studi video tersebut menunjukkan bahwa hampir 90 persen dari siswa yang diamati menanggapi pertanyaan guru hanya menggunakan satu kata – hal ini akibat dari guru yang memiliki praktik pedagogis yang lemah (Ragatz, dkk., 2015).

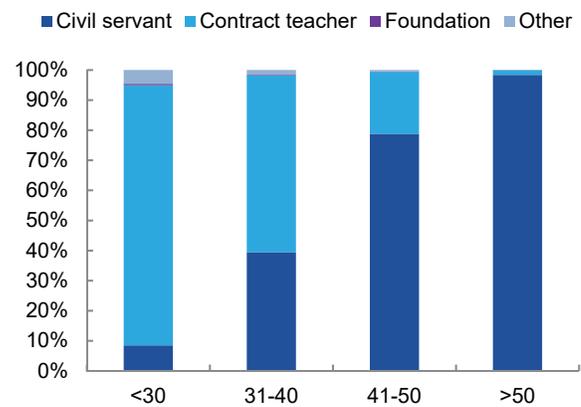
Dampak yang dituju dari UU Guru dibatasi oleh banyak faktor, termasuk faktor politik...

Faktor politik mengganggu penetapan kompetensi guru. Sejak awal penerbitan UU, ada perbedaan utama antara tujuan dari kebijakan Kemendikbud dan tujuan dari persatuan guru tentang cara mengukur kompetensi guru untuk sertifikasi. Mayoritas di DPR setuju bahwa kompetensi diukur melalui pengajuan portofolio guru⁹⁴ (dokumen pencapaian dan pengalaman kerja guru). Para guru yang portofolionya tidak disetujui harus mengambil program pelatihan selama 90 jam dan kemudian mengikuti ujian, yang kebanyakan guru lulus dari ujian ini. Akibatnya, “proses sertifikasi guru tidak terkait erat dengan kompetensi yang ditunjukkan, baik dalam konten subjek maupun keterampilan pedagogis” (Chang, dkk., 2014). Evaluasi awal dari mekanisme sertifikasi guru menunjukkan tidak ada dampak dari sertifikasi guru terhadap pembelajaran siswa (de Ree dkk., 2017).

...dan peningkatan tajam dalam perekrutan guru berdasarkan kontrak...

Moratorium (pembekuan) perekrutan PNS menyebabkan peningkatan jumlah guru kontrak (Gambar B.17). Untuk mengendalikan dampak fiskal dari peningkatan jumlah pegawai negeri pada APBN, pemerintah membatasi perekrutan pegawai negeri baru⁹⁵, termasuk guru. Dalam konteks permintaan yang tinggi untuk guru mengingat peningkatan partisipasi sekolah dan perubahan kebijakan lainnya⁹⁶, kabupaten dan sekolah menanggapi pembekuan tersebut dengan merekrut guru kontrak. Bukti yang muncul menunjukkan bahwa guru kontrak di Indonesia memiliki penguasaan kompetensi guru yang lebih rendah, yang diukur dengan uji kompetensi guru dari Kemendikbud, yang kemungkinan mencerminkan proses seleksi yang kurang ketat (Gambar B.18).

Gambar B.17: Para guru muda cenderung adalah guru kontrak, yang direkrut melalui prosedur kontrak yang non-standar (pangsa guru)



Sumber: DAPODIK

Ketika Indonesia dengan cepat meningkatkan sistem pendidikannya di tahun 1980-an dan 1990-an, sejumlah besar guru direkrut, dan sebagian besar dari jumlah guru tersebut saat ini mencapai usia pensiun. Ketika reformasi dimulai, usia rata-rata guru adalah 45 tahun dan pada tahun 2017, sejumlah besar guru sudah berusia 55 tahun atau lebih (Gambar B.19). Mengingat usia pensiun guru adalah 60 tahun, diperkirakan bahwa 50 persen guru PNS dalam sistem Kemendikbud akan

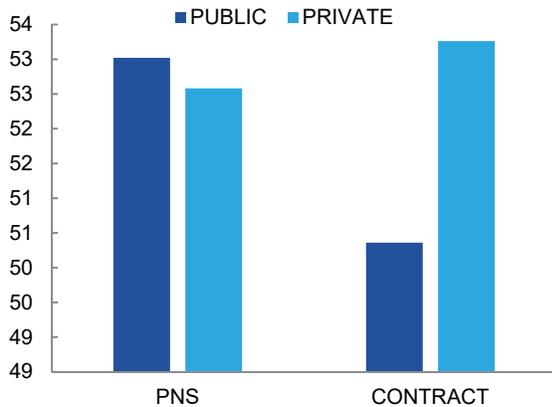
⁹⁴ Portofolio guru adalah sekumpulan dokumen / bukti yang menggambarkan pencapaian dan pengalaman kerja guru. Misalnya: ijazah sarjana guru, evaluasi kinerja dari pengawas, pengiriman jurnal ilmiah, dll.

⁹⁵ Surat Edaran MenPAN-RB No. B/2163/M

⁹⁶ Persyaratan untuk guru bersertifikat untuk mengajar 24 jam/minggu di kelas dengan minimal 20 siswa.

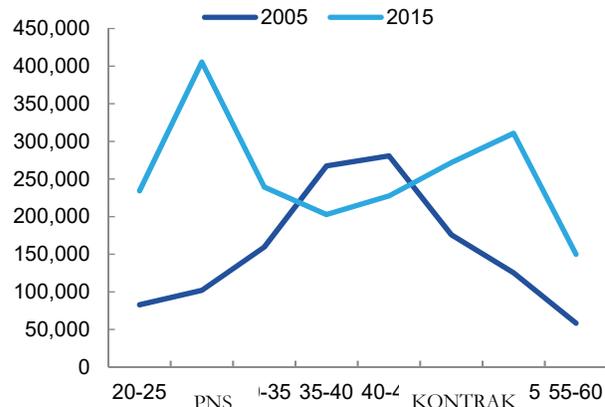
pensiun dalam 10 tahun ke depan. Mengingat adanya moratorium perekrutan, guru PNS yang pensiun digantikan oleh guru kontrak; meskipun demikian, ada tanda-tanda awal moratorium tersebut dilonggarkan untuk tahun ajaran 2018-2019 karena ada rencana untuk merekrut guru PNS dalam jangka pendek.

Gambar B.18: Pengetahuan guru secara keseluruhan rendah, tetapi pengetahuan di antara guru kontrak di sekolah umum lebih rendah lagi
(nilai dalam ujian UKG)



Sumber: Kemendikbud
Catatan: PNS adalah singkatan Pegawai Negeri Sipil

Gambar B.19: Struktur usia guru
(usia guru, sumbu x; jumlah guru, sumbu y)



Sumber: SAKERNAS 2005 dan 2015

Kapasitas operasional yang rendah untuk melakukan sertifikasi juga membatasi efektivitas Undang-Undang Guru...

Mekanisme sertifikasi pada awalnya didasarkan pada persetujuan portofolio dan pelaksanaannya relatif cepat. Mekanisme ini pada tahun 2012 diganti oleh model PLPG (Program Pendidikan dan Pelatihan Guru / pelatihan sertifikasi), yang mensyaratkan kursus pelatihan guru selama 90 jam. Pada tahun 2018, model PLPG ini digantikan oleh model PPG (Pendidikan Profesi Guru /pelatihan sertifikasi yang baru), yang mensyaratkan satu tahun pelatihan untuk guru baru, dan 6 bulan pelatihan untuk guru yang sudah ada. Prosedur yang lebih menuntut ini tidak dipenuhi oleh kapasitas yang memadai oleh lembaga untuk memberikan sertifikasi, yang mengakibatkan hanya sejumlah kecil guru yang mendapat sertifikasi, terutama dalam mata pelajaran khusus seperti pendidikan jasmani. Seiring dengan kemajuan Indonesia, dan, sejalan dengan bukti riset internasional, Indonesia harus memberlakukan mekanisme yang responsif untuk melakukan sertifikasi ulang guru.

...berikut dengan jumlah guru yang berlebihan yang menciptakan tantangan dalam melaksanakan langkah-langkah peningkatan kualitas

Indonesia memiliki rasio siswa-guru sebesar 1 guru untuk 17 siswa. Ini lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara dengan kondisi sosial ekonomi yang sama, dan rasio tersebut telah menurun sejak tahun 2005. Karena gaji guru adalah pengeluaran pendidikan yang utama, rasio siswa-guru yang rendah secara signifikan mengurangi jumlah sumber daya yang tersedia bagi faktor-faktor peningkatan kualitas lainnya. Rasio siswa-guru yang rendah di Indonesia sebagian dijelaskan oleh sejumlah besar sekolah yang berukuran kecil, dan oleh kebijakan yang tidak memadai mengenai penyebaran guru oleh sekolah dan daerah tertentu, dan peningkatan jumlah (proliferasi) guru kontrak ini terkadang oleh karena dipekerjakan karena adanya hubungan pribadi dan tidak berdasarkan dengan prestasi atau kebutuhan.

Dampak sekolah kecil terhadap rasio siswa-guru

Sekolah-sekolah yang berukuran lebih kecil di Indonesia memiliki rasio murid-guru 10 berbanding 1, sementara sekolah yang lebih besar memiliki rasio siswa-guru 27 berbanding 1. Sekolah yang lebih kecil memiliki rata-rata 11 siswa per kelas dibandingkan 34 siswa per kelas di sekolah yang lebih besar, sementara jumlah guru per kelas sama, 1,3 untuk keduanya (Tabel B.5). Banyaknya jumlah guru mengambil sumber daya dari tempat lain untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Kebijakan untuk meningkatkan rasio siswa-guru harus membatasi jumlah sekolah dengan kelas kecil, dan memberlakukan mekanisme yang inovatif untuk memaksimalkan

pemanfaatan tenaga pengajar yang ada seperti menggunakan guru yang sama untuk kelas ganda atau mata pelajaran ganda⁹⁷.

Tabel B.5: Kelas, guru, dan siswa – Pendidikan dasar menurut ukuran sekolah

Desil	Siswa	Kelas	Guru	Siswa per guru	Siswa per kelas	Guru per kelas
1	63,2	5,9	7,4	9,7	10,8	1,3
2	108,5	6	8,3	14,3	18,1	1,4
3	136,6	6,1	8,6	17,2	22,6	1,4
4	163,8	6,3	9	19,7	26,2	1,4
5	193,7	6,9	9,7	21,7	28,6	1,4
6	229	8,2	10,9	23	29	1,3
7	278,4	10,2	13,1	23,5	28,4	1,3
8	350,2	12,1	15,6	24,5	29,6	1,3
9	462,7	14,9	19,5	25,9	31,8	1,3
10	738,1	22,4	29,5	27	33,5	1,3

Sumber: Perkiraan Bank Dunia berdasarkan DAPODIK

Selain sekolah-sekolah kecil, rasio siswa-guru dipengaruhi oleh lemahnya penerapan dari pedoman pengelolaan jumlah guru

Kemendikbud mengatur jumlah minimum guru yang dibutuhkan oleh sekolah untuk setiap mata pelajaran⁹⁸. Meskipun peraturan ini telah diterapkan sejak tahun 2013, dalam praktiknya banyak kabupaten/kota yang masih berjuang untuk dapat memenuhi persyaratan peraturan ini. Beberapa kabupaten/kota kekurangan atau kelebihan pasokan guru dalam mata pelajaran tertentu, yang menyebabkan terlalu banyak atau terlalu sedikit guru di sekolah tertentu. Suatu studi yang dilaksanakan baru-baru ini mengenai Efektifitas Guru (Kesuma, dkk., Segera terbit) di 13 kabupaten/kota, mendapati bahwa hanya 3 kabupaten/kota yang berhasil mengatasi kekurangan guru dengan merekrut guru sementara berdasarkan peraturan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka merekrut guru yang memiliki kualifikasi dan kompeten. Sisa 10 kabupaten/kota lainnya mengizinkan sekolah setempat untuk mengelola kondisi tersebut menurut cara mereka sendiri. Sekolah di 10 kabupaten/kota sampel telah menanggapi dengan berbagai cara, termasuk merekrut guru non-PNS dengan menggunakan beragam proses dan kriteria seleksi, menggaji guru non-PNS tersebut menggunakan dana BOS dari pemerintah pusat dan dana dari komite sekolah, bertukar guru dengan sekolah lain, sesuai kebutuhan, menugaskan pensiunan guru dengan gaji yang kecil atau tanpa gaji, dan bahkan secara sementara merekrut orang tua murid untuk mengajar mata pelajaran seperti pelajaran agama. Praktik-praktik ini cenderung mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa.

Kemendikbud telah meluncurkan beberapa program untuk meningkatkan kualitas guru

Selain prosedur baru untuk sertifikasi, Kemendikbud telah meluncurkan beberapa inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru. Untuk memantau kualitas guru dan intervensi desain, Kemdikbud mulai menerapkan UKG (Uji Kompetensi Guru) pada tahun 2012. Kemdikbud juga mengimplementasikan PKG (Penilaian Kinerja Guru), serta PKB (Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan). Kemendikbud juga telah meningkatkan standar kompetensi sesuai dengan status karir guru (guru pemula, junior, senior, dan guru utama [*master teacher*]). Selain itu, Kemendikbud dengan dukungan Bank Dunia telah meluncurkan Kiat Guru, suatu program percontohan yang menghubungkan gaji guru dengan kinerja guru. Hasil dari program percontohan Kiat Guru pedesaan akan tersedia di pertengahan tahun 2018 (Kotak B.2).

⁹⁷ Kelas ganda dan mata pelajaran ganda adalah mekanisme alternatif untuk menyediakan layanan pendidikan. Kelas ganda mengacu pada sekolah-sekolah di mana dalam satu ruang kelas diajarkan satu atau lebih pelajaran untuk kelas yang berbeda di bawah satu guru. Mata pelajaran ganda mengacu pada satu guru yang menyampaikan mata pelajaran yang berbeda, biasanya di pendidikan menengah.

⁹⁸ Permendikbud No. 23 tahun 2013 menyatakan bahwa setiap sekolah dasar harus memiliki satu guru kelas, satu guru pendidikan jasmani, dan satu guru agama per kelompok belajar. Juga, setiap sekolah menengah pertama harus memiliki guru bersertifikat untuk Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKN.

Termasuk program untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD

Para guru PAUD juga menghadapi tantangan dalam mengakses program yang dapat meningkatkan kompetensi mengajar mereka, terutama mereka yang memiliki layanan PAUD yang berbeda dari taman kanak-kanak. Untuk mengatasi masalah ini, Kemendikbud telah meluncurkan program “Diklat Berjenjang”⁹⁹ yang memberikan pelatihan bagi para guru PAUD, terutama mereka yang berada di daerah paling miskin dan terpencil. Program percontohan *ECEC (PAUD) frontline* pada tahun 2016 dan 2017 memfasilitasi program ini dengan mendukung sistem pelatihan berbasis kabupaten dan yang berfokus pada masyarakat untuk meningkatkan akses bagi para guru PAUD untuk pelatihan yang dan program pengembangan profesional berkualitas. Selama berlangsungnya uji coba di 25 kabupaten, program ini melatih 15.000 guru komunitas dari 2.500 desa. Temuan awal dari evaluasi tahun pertama dari program tersebut menunjukkan bahwa guru yang berpartisipasi dalam program pelatihan dasar ini menunjukkan peningkatan dalam praktik mengajar mereka dalam 20 hal yang diukur dengan menggunakan Pengukuran Lingkungan Pembelajaran bagi Anak Usia Dini (*Measuring Early Learning Environment, MELE*). MELE mencakup berbagai domain, seperti: interaksi guru-anak, lingkungan inklusif, kurikulum dan program, bahasa dan literasi, berhitung/matematika, aktivitas seni dan permainan kelompok, serta permainan di dalam ruang.

Kotak B.2: KIAT Guru: Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Guru melalui Keterlibatan Masyarakat dan Tunjangan Berbasis Kinerja¹⁰⁰

KIAT Guru, yang merupakan singkatan dari Kinerja dan Akuntabilitas Guru, adalah program percontohan yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran guru, kinerja layanan, dan hasil belajar siswa di daerah terpencil di Indonesia. Di daerah-daerah terpencil, tingkat ketidakhadiran guru di sekolah adalah sebesar 19 persen, sedangkan secara nasional adalah 9 persen, dan hasil belajar siswa masih terus tertinggal dalam peringkat ujian internasional. Fitur utama KIAT Guru adalah bahwa program ini memberdayakan masyarakat, termasuk orang tua murid, untuk meminta pertanggungjawaban guru dan mengaitkan pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil (menggandakan gaji pokok) dengan kinerja layanan guru. Pelaksanaan program ini adalah dengan meminta anggota masyarakat untuk memverifikasi (i) kehadiran guru dengan menggunakan aplikasi berbasis Android, dan (ii) kinerja pemberian layanan melalui evaluasi menggunakan kartu penilaian.

Sejak uji coba yang diluncurkan pada tahun 2016, hasil pemantauannya menunjukkan bahwa ketidakhadiran guru dari kelas menurun dari 25 persen menjadi 13 persen dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemberian layanan guru, yang diukur dengan kartu penilaian, meningkat dari 56 persen menjadi 93 persen. Bank Dunia akan melakukan evaluasi dampak yang ketat pada pertengahan 2018 untuk membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol. Kemendikbud juga telah meminta dilaksanakannya proyek percontohan KIAT Guru perkotaan untuk mengidentifikasi mekanisme pembayaran TPG yang terkait dengan kinerja guru, di mana Pemerintah Indonesia membelanjakan sekitar USD 6 miliar per tahun.

Langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas guru memerlukan partisipasi aktif pemerintah daerah

Rata-rata pemerintah daerah menginvestasikan hanya sedikit saja sumber daya mereka untuk kebijakan yang terkait dengan guru. Tetapi bukti menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah menggunakan sumber dayanya untuk membiayai beasiswa bagi para guru, untuk membantu mereka mendapatkan gelar sarjana (Iskandar, segera terbit). Kabupaten lain, yang terkadang bekerja melalui gugus sekolah, memberikan program pelatihan dalam jabatan (*in-service resources*) untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahan ajar dan praktik.

Reformasi ini juga meningkatkan pentingnya dalam

Indonesia memiliki sejarah panjang penilaian siswa melalui ujian nasional. UU Pendidikan dan peraturan yang terkait¹⁰¹ menambahkan beberapa fungsi baru untuk ujian nasional ini¹⁰², termasuk pemetaan prestasi belajar, yang menjadi salah satu kriteria kelulusan, dan menyeleksi siswa untuk secara kompetitif memasuki tingkat pendidikan berikutnya. Hasil ujian nasional ini

⁹⁹ Diklat Berjenjang telah dinobatkan sebagai pemenang Penghargaan UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum, bersama dengan 2 program lainnya (Chili dan Inggris) yang dirancang untuk memberdayakan guru. <https://en.unesco.org/teachers/hamdan-prize/2018>

¹⁰⁰ Informasi lebih lanjut mengenai KIAT GURU: <http://projects.worldbank.org/P159191/?lang=en&tab=map>

¹⁰¹ Permendikbud No. 19 tahun 2005

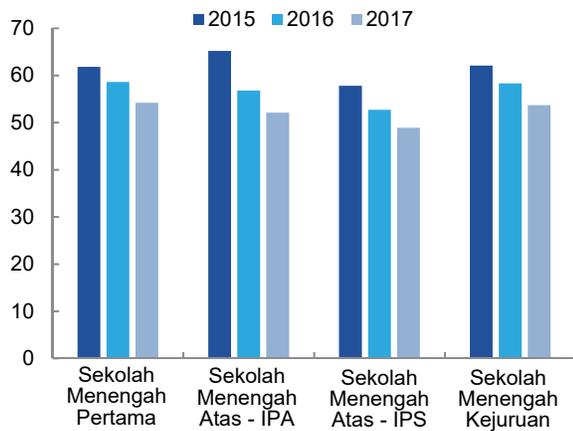
¹⁰² Uji penilaian bagi siswa di Indonesia dimulai pada 1950-an, dengan “Ujian Penghabisan”, digantikan oleh “Ujian Negara”, dan kemudian digantikan oleh “Evaluasi Belajar Tahap Tahap akhir” atau EBTANAS, dan digantikan oleh “Ujian Akhir Nasional”.

memantau kinerja siswa	juga diberikan kepada sekolah-sekolah dengan tujuan untuk mendukung peningkatan dalam pengajaran dan pembelajaran (Cislowski, 2010). Beberapa fungsi baru ini meningkatkan konsekuensi dari system penilaian.
Penggunaan ujian nasional untuk memantau kinerja siswa telah memberikan tekanan untuk memiliki kinerja yang baik pada akhir tahun sekolah	Dengan menggunakan data survei siswa di 240 sekolah dasar di 20 kabupaten/kota, Afkar, dkk. (segera terbit) mendapati adanya <i>catching-up effect</i> yang signifikan terhadap kelas 6 di sekolah dasar ketika sekolah, guru, dan siswa sedang mempersiapkan ujian nasional. Sementara sekitar 50 persen dari siswa kelas 4 tidak dapat mengurutkan angka sebanyak empat digit dari yang besar ke yang kecil, 60 persen dari siswa kelas 6 dapat menghitung volume kubus. Temuan ini menunjukkan bahwa sekitar 20 persen dari 50 persen siswa yang tidak dapat mengurutkan angka di akhir kelas 4 telah berhasil secara substansial hanya dalam waktu 2 tahun saja. <i>Catching-up effect</i> yang signifikan dalam pembelajaran di kelas 6 ini dapat menunjukkan bahwa meningkatnya tekanan terhadap sekolah, guru, dan siswa untuk memiliki kinerja yang baik pada ujian nasional dapat membantu untuk meningkatkan hasil pembelajaran.
Namun demikian, tekanan tersebut juga berkontribusi pada lebih banyak malpraktek dan kecurangan	Menurut OECD (2015), ada masalah dalam pelaksanaan Ujian Nasional, termasuk keamanan yang tidak memadai dalam pengembangan bahan ujian, pencetakan, dan distribusi kertas ujian, bocornya formulir pemeriksaan; dan perilaku menyontek oleh siswa selama ujian berlangsung, termasuk kecurangan siswa dengan bantuan guru dan pengawas ujian. PUSPENDIK (Pusat Penilaian Pendidikan), Kemendikbud, telah melakukan perhitungan, melalui teknik statistik, terhadap tingkat praktik menyontek di sekolah, dan mengidentifikasi banyak sekolah dengan peringkat yang rendah dalam Indeks Integritas ¹⁰³ .
Ujian sekolah saat ini telah menggantikan peran ujian nasional untuk menjadi kriteria kelulusan	Dalam Permendikbud yang terbaru ¹⁰⁴ , siswa dapat lulus jika mereka telah menyelesaikan kurikulum, mendapatkan kualifikasi sikap yang “baik”, dan lulus ujian sekolah. Ujian nasional tidak lagi menjadi salah satu kriteria kelulusan. Nilai minimum yang dipersyaratkan untuk lulus ujian sekolah ditetapkan oleh sekolah. Bervariasinya kriteria yang diterapkan oleh sekolah dapat memungkinkan siswa yang memiliki prestasi rendah untuk lulus dan melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya tanpa menguasai keterampilan dan kompetensi yang telah ditentukan.
Evolusi terbaru dari Ujian Nasional menunjukkan kecenderungan menurunnya nilai ujian, tetapi tingkat integritas meningkat	Hasil Ujian Nasional telah mencatat tren menurun sejak tahun 2015 (Gambar B.20). Kecenderungan yang menurun ini mungkin sebagian disebabkan oleh berkurangnya minat dari siswa, karena ujian saat ini kurang memiliki peran dalam kenaikan kelas, dan sebagian karena tindakan yang dilaksanakan oleh PUSPENDIK untuk meningkatkan integritas penilaian, melalui inisiatif seperti pemberlakuan Tes Berbasis Komputer. Hasil awal tes berbasis komputer pada tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam nilai tes di sekolah yang memiliki tingkat integritas yang rendah pada tahun 2016, sementara nilai tes di sekolah dengan tingkat integritas yang tinggi tetap relatif tidak berubah, menandakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, integritas yang rendah adalah penyebab terjadinya distorsi dalam hasil Ujian Nasional (Gambar B.21).

¹⁰³ Indeks integritas dikembangkan dengan menggunakan metode deteksi kecurangan yang telah banyak digunakan (Hanson, dkk., 1987).

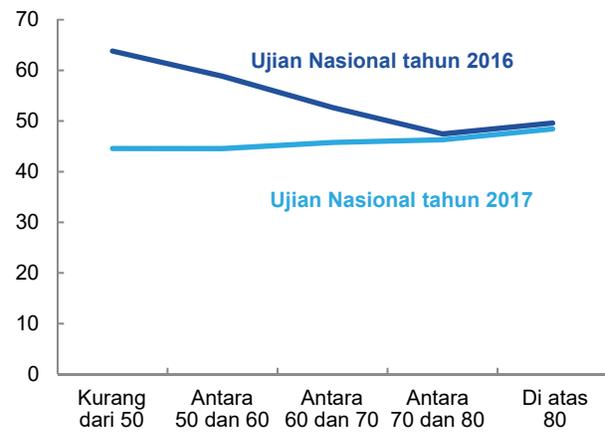
¹⁰⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2018

Gambar B.20: Nilai dalam Ujian Nasional telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, karena perubahan peraturan dan peningkatan integritas (nilai Ujian Nasional berdasarkan jenis sekolah)



Sumber: PUSPENDIK

Gambar B.21: Mekanisme peningkatan integritas yang baru mempengaruhi sejumlah sekolah yang sebelumnya memiliki tingkat integritas yang lebih rendah (nilai Ujian Nasional berdasarkan indeks integritas pada tahun 2016)



Sumber: Rahmawati, 2018

PUSPENDIK sedang meningkatkan instrumen penilaiannya untuk menilai evolusi kualitas pendidikan di Indonesia

Pada tahun 2013, PUSPENDIK meluncurkan Program Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, AKSI, (atau dalam Bahasa Inggris, *Indonesian National Assessment Program* [INAP]). INAP adalah program pemetaan yang menggambarkan keterampilan dan prestasi akademik siswa, yang dilaksanakan melalui survei nasional. INAP bertujuan untuk memantau kualitas pendidikan melalui 3 kompetensi dasar dalam matematika, IPA, dan membaca. INAP berfungsi sebagai perangkat diagnostik untuk mengidentifikasi jenis kompetensi yang harus ditingkatkan dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Tes INAP berbasis sampel dan dilakukan terhadap siswa di kelas 4, 8, dan 11. PUSPENDIK dapat memantau pelaksanaan INAP lebih dekat karena jumlah siswa dan sekolah yang berpartisipasi dalam INAP hanya sebagian kecil dari total keseluruhan siswa dan sekolah.

Sebagai kesimpulan, pelaksanaan reformasi guru telah memiliki dampak yang besar pada anggaran dengan dampak yang sangat kecil, jikapun ada, pada peningkatan sumber daya manusia. Para guru meningkatkan kredensial mereka di atas kertas dan paket gaji mereka, tetapi dampaknya terhadap pembelajaran terbatas. Banyak guru baru telah bergabung dengan sistem karena peningkatan partisipasi sekolah, dan baru-baru ini, karena adanya gelombang pensiun (dari para guru yang berusia pensiun). Karena adanya larangan untuk perekrutan, kebanyakan guru baru adalah guru kontrak, yang direkrut berdasarkan sistem yang kurang ketat. Masuknya guru baru memberi peluang untuk meningkatkan kualitas guru, tetapi hal tersebut membutuhkan adanya mekanisme monitoring dan pengendalian yang tepat.

Sehubungan dengan penilaian, reformasi meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penilaian tersebut dalam mengelola sistem pendidikan, tetapi munculnya praktik-praktik negatif mempengaruhi keandalan penilaian tersebut dan membatasi penggunaannya, sehingga sekolah hanya memiliki elemen yang sedikit untuk menilai kesiapan siswa untuk lulus. Namun demikian, Indonesia sedang mengambil langkah-langkah korektif yang penting untuk meningkatkan penilaian siswa dan penggunaannya dan menerapkan sistem penilaian yang saling melengkapi. Langkah tindakan ini, jika diterapkan dengan benar, memiliki potensi kuat untuk membantu sistem pendidikan Indonesia mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik.

Kotak B.3: Pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Tantangan yang Dihadapi

Kementerian Agama (Kemenag) mengelola pendidikan formal dan non-formal untuk siswa dari enam agama yang berbeda (Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Budha). Terdapat lebih dari 300.000 lembaga Pendidikan Islam di bawah Kemenag, sementara jumlah lembaga pendidikan untuk agama Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Budha kurang dari 1.000. Pendidikan dasar formal yang menggunakan kurikulum nasional plus pendidikan Islam tambahan sebagian besar disediakan oleh madrasah, sementara pendidikan Islam non-formal diberikan terutama oleh pesantren dan diniyah dengan kurikulum mereka sendiri, yang berfokus pada pembelajaran agama.

UU Pendidikan No. 20 tahun 2003 menetapkan madrasah sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Dari 20 persen dari jumlah yang diamanatkan oleh UU ini, Kemenag mendapat alokasi sebesar Rp 52 triliun atau 12 persen dari anggaran pendidikan nasional pada tahun 2018. Jumlah ini dimaksudkan untuk mencakup semua madrasah dan biaya pendidikan agama lainnya, termasuk biaya operasional dan biaya pegawai. Serupa dengan sistem pendidikan umum, ada tiga tingkat pendidikan madrasah: MI (Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan sekolah dasar), MTS (Madrasah Tsanawiyah atau setara dengan SMP), dan MA (Madrasah Aliyah atau setara dengan SMA). Madrasah menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan kurikulum agama. Tidak seperti Kemendikbud, di mana sekolah dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah, sistem pendidikan di Kemenag terpusat dengan penyedia layanan pendidikan, seperti madrasah, berada di bawah pengawasan langsung Kemenag.

Murid-murid madrasah mencakup 15 persen dari total angka partisipasi sekolah, dengan sebagian besar belajar di madrasah swasta. Dari 53 juta siswa yang terdaftar di dalam sistem pendidikan formal, 8 juta terdaftar di madrasah. Dari 49.000 madrasah, 92 persen adalah madrasah swasta. Madrasah swasta pada umumnya dijalankan oleh yayasan yang terkait dengan organisasi massa Islam. Meskipun dikelola dan didanai oleh yayasan, madrasah swasta memenuhi syarat untuk menerima dukungan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah, misalnya melalui BOS, TPG, atau bantuan keuangan untuk infrastruktur. Proporsi pendanaan pemerintah untuk madrasah swasta adalah antara 40 dan 75 persen. Jumlah total pendanaan pemerintah tergantung pada prioritas pemerintah daerah dan pemahaman daerah mengenai peraturan (ACDP, 2013).

Kemenag memiliki kewenangan yang terbatas atas lembaga pendidikan swasta. Penegakan peraturan pemerintah memiliki beberapa tantangan dalam konteks di mana madrasah swasta secara hukum adalah otonom. Sebagai contoh, meskipun program BOS bertujuan untuk menutup biaya operasional madrasah untuk mencapai SPM dan pada akhirnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, pada praktiknya, sangat sedikit yang diketahui tentang bagaimana madrasah swasta menggunakan dana BOS tersebut.

Kesenjangan di bidang infrastruktur, manajemen, dan tenaga kependidikan, terutama di madrasah-madrasah swasta, membatasi potensi sistem pendidikan agama. Madrasah-madrasah swasta memiliki persentase ruang kelas yang rusak yang jauh lebih tinggi (39 persen) dibandingkan dengan madrasah negeri (12 persen), dan hanya 14 persen madrasah swasta yang memiliki akreditasi 'A,' sementara lebih dari setengah madrasah negeri memiliki akreditasi 'A'. Selain itu, jumlah guru yang tidak memiliki gelar sarjana juga jauh lebih tinggi di Madrasah Ibtidaiyah (setara dengan sekolah dasar) swasta dibandingkan dengan di Madrasah Ibtidaiyah negeri (24 persen dibandingkan dengan 12 persen). Mengingat proporsi madrasah swasta yang besar tersebut, mengatasi tantangan ini berpotensi meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Distribusi guru yang tidak seimbang dan kekurangan guru pendidikan agama Islam adalah salah satu tantangan utama pendidikan Kemenag. Selain 700.000 guru madrasah, Kemenag juga mengawasi sekitar 180.000 guru PAI (Pembelajaran Agama Islam) yang mengajar pendidikan agama Islam di sekolah umum. Moratorium perekrutan guru PNS dan perubahan dari 2 hingga 4 jam pelajaran agama per minggu berdasarkan Kurikulum 2013 telah menciptakan kekurangan guru PAI yang besar. Banyak lembaga yang secara proaktif menanggapi dengan merekrut guru-guru PAI baru tanpa adanya standar dan prosedur perekrutan guru. Ini mungkin memiliki akibat yang serius pada kualitas guru yang direkrut dan akhirnya pada mutu pengajarannya.

4. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia

Indonesia telah mencapai tingkat partisipasi sekolah yang tinggi, tetapi dengan peningkatan kualitas yang tidak

Diperlukan adanya perubahan-perubahan utama dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan. Perubahan-perubahan utama ini harus selaras dengan tindakan yang sedang dilakukan dan peluang baru, seperti penggantian sejumlah besar guru yang diperkirakan akan pensiun selama beberapa tahun ke depan. Reformasi desentralisasi menjadikan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan layanan pendidikan, termasuk pemantauan keuangan, jaminan mutu, dan dukungan untuk sekolah tertinggal. Beberapa pemerintah daerah telah memainkan peranan ini

terlalu besar terlepas dari adanya investasi keuangan yang besar selama 15 tahun terakhir

dengan cukup baik, dan memiliki tingkat pembelajaran siswa yang tinggi, sementara pemerintah daerah lainnya masih berusaha keras untuk mencapainya. Beberapa kabupaten/kota lain tampaknya mengalami ketimpangan antara jumlah siswa yang tinggi dan tingkat pembelajaran siswa yang rendah. Sebagaimana dirangkum dalam Tabel B.6, Indonesia telah menerapkan beberapa tindakan yang menjanjikan untuk meningkatkan hasil reformasi, dan tindakan-tindakan ini mungkin perlu disempurnakan ketika evaluasi terhadap efektivitasnya dilakukan. Meskipun demikian, sejumlah besar tantangan pelaksanaan masih tetap ada.

Tabel B.6: Ringkasan tindakan utama yang telah dilakukan baru-baru ini

DOMAIN	TINDAKAN UTAMA	TANTANGAN YANG MASIH ADA
Institusi dan proses	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan mengenai SPM untuk PAUD dan pendidikan menengah Sistem data baru untuk pengelolaan sektor pendidikan: DAPODIK Pembangunan kapasitas di tingkat kabupaten/kota (<i>Basic Education Capacity, BEC</i> dan <i>Minimum Service Standards Capacity Development, MSSCD</i>) Perekrutan guru PNS baru¹⁰⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan yang minim mengenai strategi untuk meningkatkan hasil pendidikan dari pemerintah daerah dan sekolah. Keterbatasan kapasitas untuk menerapkan strategi untuk meningkatkan pembelajaran siswa dari pemerintah daerah dan sekolah Rendahnya kesadaran terhadap SPM oleh pemerintah daerah dan sekolah; kurangnya sanksi bagi mereka yang tidak mencapai SPM Kurangnya sosialisasi untuk SPM Pemberdayaan komite sekolah yang rendah. Seleksi guru, terutama guru kontrak, tanpa memastikan tingkat minimum pengetahuan mengenai bahan ajar dan kompetensi mengajar Seleksi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah secara konsisten tidak transparan dan tidak berdasarkan prestasi Rendahnya tingkat akreditasi sekolah, terutama di daerah-daerah tertinggal
Dana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung sekolah dalam pemanfaatan dana BOS yang lebih baik melalui e-RKAS Integrasi perencanaan program BOS-BOSDA di beberapa kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme yang sangat terbatas untuk mendukung pemerintah daerah dan sekolah yang berkinerja rendah Terbatasnya informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan belanja pendidikan oleh pemerintah daerah Kurangnya fokus pada hasil dalam perencanaan oleh pemerintah daerah dan sekolah.
Siswa siap untuk belajar	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan bagi guru PAUD Dukungan untuk PAUD melalui BoP PAUD¹⁰⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> SPM untuk tingkat pendidikan ini sedang dikembangkan dan pemerintah daerah diharapkan lebih tegas dalam pelaksanaannya. Sumber daya yang tidak memadai bagi subsektor ini dengan gaji yang terbatas untuk guru PAUD. Hanya 8,8 persen dari PAUD yang terakreditasi
Guru berkualitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi guru UKG (pengetahuan mengenai bahan ajar) dan PKG (praktik mengajar di kelas) Reformasi program untuk sertifikasi guru (PLPG dan PPG) Program percontohan untuk menghubungkan gaji guru dengan kinerja guru (KIAT GURU) 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme yang lemah untuk memantau kualitas guru baru, dalam konteks tingginya jumlah guru yang akan pensiun. UKG, PKG, dan PPG belum dievaluasi secara memadai. Ketergantungan pada sebagian besar guru kontrak, dengan kualitas yang tidak merata Distribusi guru yang tidak efisien
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> Ujian Nasional Berbasis Komputer Ujian nasional berbasis sampel dengan standar tinggi (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, atau AKSI) Partisipasi dalam tes internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran dan kepercayaan akan ukuran pembelajaran siswa yang ada. Kurangnya kriteria untuk kelulusan yang konsisten Kurangnya hubungan yang konsisten antara tingkat pembelajaran siswa serta dukungan teknis dan keuangan.

Perlu adanya tindakan segera untuk menjamin bahwa semua siswa mendapat manfaat dari reformasi,

Reformasi selama 15 tahun terakhir ini telah membawa banyak penduduk Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang beruntung untuk bersekolah, tetapi tingkat pembelajaran mereka tetap rendah. Pada saat yang sama, penduduk Indonesia yang kaya meningkatkan hasil belajar mereka dengan cepat; Dengan demikian, ketimpangan dalam pencapaian Pendidikan atau jumlah tahun bersekolah digantikan dengan ketimpangan dalam hasil belajar. Tindakan untuk

¹⁰⁵ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kepada Gubernur dan Bupati mengenai Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (untuk posisi tertentu) No. B/2631/M.PAN-RB/07/2016.

¹⁰⁶ BoP PAUD/ Bantuan Operasional PAUD adalah transfer ke daerah untuk biaya operasional layanan PAUD.

berkontribusi pada Indonesia yang lebih setara...

meningkatkan reformasi harus memprioritaskan intervensi untuk mendukung sekolah dan pemerintah daerah yang berkinerja rendah.

...dan memanfaatkan kesempatan yang langka untuk meningkatkan kualitas guru

Selama dekade berikutnya, sekitar 50 persen guru PNS akan pensiun. Kualitas dari sistem pendidikan di Indonesia dalam beberapa dekade ke depan akan bergantung pada kebijakan yang diterapkan untuk menggantikan guru yang akan pensiun tersebut. Diperlukan tindakan untuk memastikan penggantian dengan cara terbaik yang dapat dilakukan, terlepas dari mekanisme rekrutmennya.

Peningkatan di semua lima domain kebijakan utama yang dijelaskan di atas sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk memungkinkan investasi pendidikan berkontribusi secara lebih efektif terhadap prioritas pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Rekomendasi kebijakan utamanya antara lain:

- i) **Penyelarasan kelembagaan: kapasitas dan tanggung jawab harus diselaraskan untuk penyediaan layanan dalam konteks desentralisasi, yang saat ini belum dilakukan di Indonesia.** Pemerintah daerah dan sekolah harus membelanjakan sumber daya yang ada secara lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas mereka dan merekrut staf yang memiliki motivasi dan berkualitas berdasarkan kebutuhan yang ada. Ini akan memastikan tingkat pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi.

Untuk menghilangkan keseimbangan yang lemah dari penyediaan layanan, pemerintah daerah yang berkinerja rendah harus merekrut sumber daya manusia yang berkualitas, dan mengadakan dukungan teknis agar mereka mampu mengidentifikasi dan mendukung sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan. Dukungan teknis ini dapat digunakan untuk merancang rencana untuk membelanjakan DAU dengan lebih baik dan mengembangkan alat untuk membantu sekolah meningkatkan pembelajaran siswa di antara kegiatan-kegiatan penting lainnya. Selain itu, berdasarkan pengalaman dengan *Basic Education Capacity* (BEC) dan *Minimum Service Standards Capacity Development* (MSSCD), pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus diberi pelatihan mengenai strategi untuk mencapai indikator SPM, termasuk untuk tingkat PAUD dan pendidikan menengah, dan tentang bagaimana memasukkannya dalam rencana pendidikan tahunan mereka. Kemendikbud harus meningkatkan dukungannya untuk penjaminan mutu pendidikan di kabupaten/kota melalui dinas pendidikan di daerah¹⁰⁷, Kemendagri harus mengeluarkan dan menegakkan peraturan yang mendorong kabupaten/kota untuk membelanjakan sumber daya lokal untuk pembangunan kapasitas mereka sendiri dalam bidang pendidikan dan dalam pencapaian SPM. Kabupaten yang terus gagal mencapai SPM harus mendapat dukungan teknis serta sanksi keuangan, jika kinerjanya tidak meningkat.

Di tingkat sekolah, komite sekolah mensyaratkan adanya peningkatan kapasitas untuk mendukung manajemen berbasis sekolah. Sekolah umumnya memiliki komite sekolah yang dapat memainkan peranan penting dalam manajemen sekolah, tetapi banyak dari komite sekolah tersebut tidak memiliki kewenangan, kapasitas, dan sumber daya untuk membuat banyak perbedaan. Kapasitas komite sekolah harus ditingkatkan, mencakup penganggaran berbasis hasil, perencanaan operasional, dan akuntabilitas. Ini membutuhkan kesadaran yang lebih besar mengenai peran komite sekolah. Kepala sekolah harus memastikan bahwa komite sekolah melakukan pertemuan dan terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah. Kemendikbud dan dinas pendidikan harus meluncurkan kampanye komunikasi yang ditujukan kepada para kepala sekolah, guru dan masyarakat mengenai

¹⁰⁷ Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

pentingnya komite sekolah dan bagaimana komite sekolah ini harus berkontribusi pada manajemen sekolah.

Peraturan yang bertentangan dan kesenjangan harus diidentifikasi dan dihilangkan.

Ini antara lain:

- a. kurangnya kejelasan tentang tanggung jawab untuk pelatihan guru. Jika pemerintah kabupaten/kota adalah entitas yang bertanggung jawab, siapa yang harus memberikan pelatihan dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelatihan dan memastikan mutu yang tertinggi? Kantor Kepresidenan dapat membentuk komisi multisektor berjangka waktu dengan beranggotakan Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu dan KemenPAN-RB, dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kesenjangan mengenai pelatihan guru dan untuk mengusulkan perubahan yang diperlukan pada peraturan yang ada dalam jangka waktu tiga bulan. Rekomendasi dari komisi harus segera dilaksanakan.
 - b. sekolah dan madrasah saat ini dibuka berdasarkan izin dari pemerintah setempat, tetapi sumber dayanya, terutama BOS, dibayarkan dari sumber daya pusat. Harus dilakukan monitoring yang lebih efektif untuk membatasi pembukaan sekolah dan madrasah baru hanya bagi sekolah yang dibutuhkan karena adanya permintaan *dan* memiliki kapasitas kelembagaan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Pemerintah daerah, di bawah pembinaan Kemendagri, Kemendikbud dan Kemenag, harus menegakkan kriteria untuk memberi perizinan bagi sekolah.
 - c. Kemendikbud harus merevisi pembayaran minimum BOS, khususnya dalam kasus sekolah kecil baru di daerah-daerah yang sudah memiliki jumlah sekolah yang cukup. Peraturan baru tersebut harus mewajibkan agar alokasi pembayaran minimum untuk sekolah baru bergantung pada apakah sekolah-sekolah ini memenuhi permintaan tertentu yang tidak terpenuhi di daerah yang kurang terlayani, dan lokasinya tidak boleh berdekatan dengan sekolah yang sudah ada.
- ii) **Pengeluaran publik: Selain peningkatan penting dalam kapasitas pemerintah daerah untuk memantau dan mendukung sekolah dengan menggunakan DAU yang ada dan sumber daya lainnya, sekolah dan kabupaten/kota tertinggal mungkin memerlukan sumber daya tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria berbasis kinerja untuk menutup kesenjangan pencapaian yang ada.** Mekanisme transfer yang ada harus dimodifikasi untuk memastikan bahwa sumber daya tambahan ditransfer menggunakan kriteria berbasis kinerja. Kemendikbud dan Kemenkeu harus menyesuaikan peraturan untuk transfer BOS tambahan agar dilakukan dengan kriteria berbasis kinerja. Sekolah yang berpartisipasi akan menerima BOS mereka yang sudah ada saat ini, dan BOS berbasis kinerja hanya jika mereka memenuhi target tertentu yang terkait dengan pencapaian SPM dan SPN. Kemendagri harus mengeluarkan peraturan yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendukung sekolah dalam pelaksanaan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja yang terkait dengan SPM dan SPN.

Untuk mencapai tingkat efisiensi belanja yang lebih tinggi di sektor ini, penting untuk memastikan ketersediaan informasi mengenai pengeluaran anggaran di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terlepas dari pentingnya jumlah belanja pendidikan secara total, informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah menggunakan sumber daya tersebut sangat terbatas dan sulit dipahami. Ini berlaku terutama bagi Rp 81 triliun yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah daerah. Pengumpulan informasi dan analisis yang lebih baik di tingkat daerah sangatlah penting untuk menilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya pendidikan mereka. Kemenkeu harus menyelesaikan upaya berkelanjutan untuk mengumpulkan data mengenai perencanaan dan pelaksanaan pendidikan oleh kabupaten/kota dan provinsi. Dalam upaya ini,

kabupaten/kota yang lebih kecil harus diprioritaskan, karena mereka menerima jumlah sumber daya yang lebih besar per siswa dan sumber daya yang lebih besar ini tidak dapat menutup kesenjangan pencapaian.

Sinergi di tingkat manajemen yang berbeda harus dibina untuk dapat memanfaatkan sumber daya keuangan dan kelembagaan secara lebih baik.

- **Di sisi kelembagaan**, pemerintah daerah dapat mendukung pencapaian SPM oleh sekolah tidak hanya melalui pendanaan, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran mengenai SPM dan perlunya kepatuhan. pemerintah daerah harus memantau sekolah dan pembelajaran siswa lebih ketat lagi, dan memasukkan pencapaian SPM dalam pemantauan mereka, serta mendukung sekolah yang menghadapi masalah dalam mencapai SPM. Beberapa pemerintah daerah sudah melakukan hal ini dengan baik dan dapat bertindak sebagai teladan. Kemendagri harus menegakkan peraturan yang ada yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mencapai SPM dalam periode waktu tertentu, dan memberikan dukungan teknis kepada kabupaten/kota yang terus menerus memiliki tingkat pencapaian rendah atau mengharuskan kabupaten/kota untuk membelanjakan sumber daya mereka sendiri untuk mendapatkan dukungan teknis ini.
- **Di sisi keuangan**, beberapa kabupaten melaksanakan program setempat sejenis BOS dan mengaitkannya dengan program BOS pemerintah pusat untuk memaksimalkan sinergi di antara berbagai sumber pendanaan dan untuk mempercepat pencapaian SPM. Jika pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi, efisiensi program BOS dapat ditingkatkan melalui perencanaan bersama program BOS daerah dan pusat. Seperti disebutkan di atas, perencanaan harus didasarkan pada pencapaian SPM dan SPN. Harus ada mekanisme untuk memantau dan mendukung sekolah yang tidak menunjukkan kemajuan ini. Kemendikbud dan Kemendagri harus mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perencanaan bersama dari semua sumber daya sekolah.

Upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya BOS harus dievaluasi dan ditingkatkan jika hasilnya menjanjikan. DKI Jakarta dan beberapa pemerintah daerah lainnya sedang melaksanakan program percontohan e-RKAS, suatu platform berbasis web yang membantu sekolah dalam perencanaan terkait BOS dan sumber daya sekolah lainnya dengan menghubungkan pengeluaran dan kinerja. Program intervensi percontohan ini sedang dipantau dan dievaluasi untuk perbaikan. Pelajaran yang muncul dari upaya ini harus dimasukkan ke dalam peraturan mengenai BOS oleh Kemendikbud dalam waktu dekat, dan penganggaran berbasis kinerja secara elektronik harus dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk sekolah dan madrasah.

- Kesiapan untuk belajar: Peningkatan upaya pendidikan bagi anak usia dini dengan menjamin bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan anak usia dini yang bermutu tinggi.** Pemerintah harus meningkatkan cakupan PAUD yang berkualitas dengan memberikan pendanaan yang cukup bagi pendidikan anak usia dini dalam pagu anggaran sebesar 20 persen saat ini dan meningkatkan kerangka tata kelolanya. Amanat terkini dari SPM untuk pendidikan pra sekolah ini merupakan langkah maju yang penting, tetapi jika SPM tidak ditegakkan untuk memastikan tingkat kualitas minimum, anak akan belajar kurang dari yang seharusnya dan sumber daya manusia tidak akan mencapai potensinya. Kemendikbud dan Kemendagri harus memberi pelatihan bagi pemerintah daerah mengenai SPM untuk PAUD, dan Kemendagri harus mewajibkan pemerintah daerah untuk memenuhi SPM mengenai PAUD. Kemendikbud dan Kemenkeu harus meningkatkan jumlah BOP PAUD sesuai dengan peraturan SPM yang baru. Selain itu, mengingat bahwa dimasukkannya PAUD sebagai layanan dasar pada program prioritas untuk penggunaan Dana Desa baru-baru ini, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mengawasi agar pusat-pusat pelayanan PAUD baru dibuka sesuai dengan standar Kemendikbud.

- iv) **Guru: Pola pensiun selama beberapa tahun ke depan dapat mengakibatkan peningkatan luar biasa dalam kualitas guru dengan:**

Kualifikasi yang tepat. Di Indonesia, kualifikasi guru dipertimbangkan di saat guru melamar pekerjaan mengajar dan ketika mereka berpartisipasi dalam program sertifikasi. Persyaratan masuk untuk semua guru harus ditingkatkan, dan persyaratan minimum untuk guru harus ditetapkan dan ditegakkan. Untuk guru PNS, tes khusus mengenai bahan ajar oleh Kemendikbud ("SKB") harus digunakan untuk mengeluarkan kandidat berkinerja rendah dari kelompok guru yang memenuhi syarat. Kemendagri (non-PNS) dan KemenPAN-RB (PNS) harus menegakkan persyaratan gelar sarjana yang ada bersama dengan tingkat minimum pengetahuan materi mata pelajaran bagi para guru di semua wilayah untuk membantu anak-anak terhindar dari jebakan pengetahuan tingkat rendah.

Pelaksanaan awal dari mekanisme baru untuk sertifikasi guru (PPG) harus dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Kemendikbud sehingga dapat meningkatkan sumber daya yang digunakan untuk membiayai sertifikasi guru yang menghasilkan peningkatan pembelajaran siswa.

Insentif yang tepat. Guru harus diberi motivasi untuk dapat memberi kinerja yang baik. Ada upaya yang berkelanjutan untuk mengaitkan gaji guru dengan evaluasi guru, seperti yang dipromosikan oleh proyek percontohan KIAT GURU. Upaya tersebut harus dievaluasi dan ditingkatkan jika hasil evaluasinya memuaskan. Kemendikbud dan Kemenkeu harus memasukkan pelajaran positif dari proyek percontohan ini ke pembayaran TPG untuk semua guru di seluruh negeri.

- v) **Penilaian:** PUSPENDIK harus melanjutkan upaya mereka yang berhasil untuk meningkatkan integritas Ujian Nasional, terutama dengan menggunakan ujian berbasis komputer, dan untuk memperluas ruang lingkup tes diagnostik nasional (INAP juga disebut AKSI). Hasil tes diagnostik nasional tersebut harus dipublikasikan, dibagikan ke kabupaten/kota dan sekolah, dan mengacu pada ujian internasional.

Untuk meningkatkan dampak penilaian pada pembelajaran, sekolah dan pemerintah daerah juga harus dibantu untuk lebih mampu menafsirkan dan bertindak berdasarkan hasil dari sistem penilaian nasional yang ditingkatkan. Mengingat rendahnya kapasitas banyak kabupaten dan sekolah di seluruh Indonesia, PUSPENDIK harus meningkatkan mekanismenya untuk berbagi hasil penilaian. Laporan harus mudah dipahami oleh semua pelaku di dalam sistem pendidikan, dan menyajikan strategi peningkatan yang mudah dipahami dan dilaksanakan.

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional (National Education Quality Initiative) harus diluncurkan

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional harus diluncurkan. Berdasarkan upaya yang sedang berlangsung, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional harus mampu meningkatkan sistem penilaian dan meningkatkan kredibilitasnya. Program ini juga harus memasukkan data keuangan dan penggunaan sumber daya pendidikan di semua tingkatan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi di sektor ini. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional ini harus didukung oleh para pemimpin politik tingkat tinggi, untuk dapat memaksimalkan dampaknya.

Akhirnya, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia meningkat untuk semua pihak, mengatasi tantangan kritis sistem pendidikan Kemenag juga harus dipandang sebagai salah satu prioritas utama di sektor pendidikan. Meningkatkan kapasitas Kemenag untuk dapat secara efektif mengelola sejumlah besar lembaga pendidikannya di seluruh negeri merupakan langkah penting dalam memastikan lembaga-lembaga ini memberikan pendidikan bermutu. Ini termasuk memberikan bantuan teknis kepada madrasah untuk mencapai SPM dan akhirnya SPN, serta dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi guru. Sistem pemantauan kualitas harus diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dana

pemerintah, terutama yang disalurkan kepada penyedia swasta (yayasan). Sebagai langkah pertama, karena ruang lingkup INAP-AKSI diperluas, tes ini harus memasukkan keterwakilan madrasah.

Referensi

Bagian A

- Bank Indonesia. May 17, 2018. Siaran Pers. https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_204418.aspx
- Barrons. February 2, 2018. <https://www.barrons.com/articles/dow-tumbles-400-points-as-fear-drives-vix-higher-1517597151>
- Bloomberg. April 09, 2018. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-09/indonesia-seeks-to-regulate-more-fuel-prices-as-elections-loom>
- Bloomberg. April 13, 2018. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-13/moody-s-upgrades-indonesia-to-baa2-on-positive-economic-outlook>
- Bloomberg. May 17, 2018. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-17/jpmorgan-asset-sees-indonesia-india-bouncing-back-after-selloff> and
- Bloomberg. May 25, 2018. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-25/a-top-performing-fund-suddenly-gets-positive-on-indonesia-stocks>
- CNN Indonesia. October 27, 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171027122305-78-251549/sri-mulyani-ketok-palu-naikkan-cukai-rokok-2018>
- IEA. 2017. The 2017 World Energy Outlook.
- Indonesia Investments. April 24, 2018. <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/unilever-indonesia-reports-declining-sales-and-profit-in-q1-2018/item8753?>
- Indonesia Investments. May 02, 2018. <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/consumer-price-index-indonesia-inflation-at-0.10-in-april-2018/item8773?>
- Industri Bisnis. May 11, 2018. <http://industri.bisnis.com/read/20180511/12/794017/sinyal-impor-beras-tambahan-makin-kuat>
- Indonesia Ministry of Finance. 2018. *APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>. Published May, 2018
- Liputan 6. April 2, 2018. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3421449/efek-harga-pertalite-naik-masih-berlanjut-ke-inflasi-april>
- Netral News. May 02, 2018. <http://www.en.netralnews.com/news/business/read/20766/harvest.season..inflation.in.april.2018.down.to.01.percent>
- Reuters. April 24, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-rupiah-intervention/indonesia-central-bank-intervenues-with-sizeable-amount-to-defend-rupiah-idUSKBN1HV1AM>
- Reuters. May 8, 2018. <https://uk.reuters.com/article/indonesia-markets/update-1-indonesian-market-sell-off-deepens-rupiah-at-lowest-since-dec-2015-idUKL3N1SF3F6>
- Reuters. April 30, 2018. <https://www.reuters.com/article/indonesia-rupiah/update-1-indonesia-financial-industry-able-to-withstand-much-weaker-rupiah-regulators-idUSL3N1S74DU>
- The Wall Street Journal. May 7, 2018. <https://www.wsj.com/articles/indonesia-market-selloff-shows-perils-of-relying-on-foreign-funding-1525686062>
- World Bank/Bank Dunia. 2017. *Indonesia Economic Quarterly: Decentralization that Delivers*. December. Jakarta: World Bank.

- _____. 2018a. *Commodity Markets Outlook: Oil Exporters: Policies and Challenges*. April. Washington, DC: World Bank. <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.
- _____. 2018b. *Global Economic Prospects: The Turning of the Tide?* June. Washington, DC: World Bank.

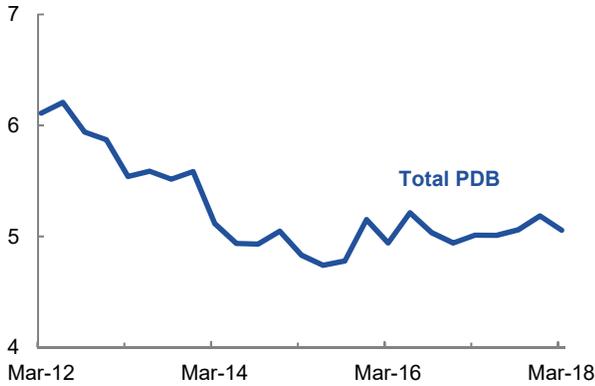
BAGIAN B

- Afkar, R., J. de Ree, and N. Khairina. Forthcoming. "Who Learns What in Basic Education? Evidence from Indonesia". Working Paper. World Bank.
- Al-Samarrai, S., T. Fasih, A. Hasan, and D. Syukriyah. 2014. *Assessing the role of the school operational grant program (BOS) in improving education outcomes in Indonesia (English)*. Jakarta: World Bank Group.
- Al-Samarrai, S. 2013. "Local Governance and Education Performance: A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts". World Bank Other Operational Studies, 16765. World Bank.
- Alderman, H. and J. Hoddinott and B. H. Kinsey. 2006. "Long Term Consequences of Early Childhood Malnutrition." *Oxford Economic Papers*. Vol. 58, Issue 3, pp. 450-474, 2006. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=916871> or <http://dx.doi.org/10.1093/oenp/gpl008>
- Altinok, N., N. Angrist and H. Patrinos. 2018. "Global Data Set on Education Quality". Policy Research Working Paper 8314. World Bank.
- Barro, R. and J-W Lee. 2013. "A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010." *Journal of Development Economics*. Vol 104, pp.184-198.
- Chang, M., S. Shaeffer, S. Al-Samarrai, A. Ragatz, J. de Ree and R. Stevenson. 2014. *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Directions in Development, No. 16355. Washington, DC: World Bank.
- Chen, D. 2011. "School-Based Management, School Decision-Making and Education Outcomes in Indonesian Primary Schools". Policy Research Working Paper, No. WPS 5809.
- Cislowski, H. 2010. "What's to be Done About the National Exam?" Paper for ESWG Meeting 1 June 2010 on the National Exams, cited in ACDP (2013).
- Cislowski, H. 2018. "Review of the System for Assessment Student Learning". mimeo.
- DAPODIK, several years
- de Ree, J., K. Muralidharan, M. Pradhan and H. Rogers. 2017. "Double for Nothing? Experimental Evidence on Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia". *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 133, Issue 2, May, Pages 993–1039.
- Hanson, B. A., D. J. Harris, and R. L. Brennan. 1987. "A Comparison of Several Statistical Methods for Examining Allegations of Copying". Research Rep. Series No. 87-15. Iowa City: American College Testing Program
- Hanushek, E. and L. Woessmann. 2011. "How Much Do Educational Outcomes Matter in OECD countries?" *Economic Policy*. Vol. 26, No. 67, pp. 427-491.
- International Monetary Fund, 2018. "Indonesia; 2017 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia". IMF Staff Country Reports 18/32, International Monetary Fund.
- Iskandar, S. Forthcoming. *A Rapid Assessment of Teacher-related Policies in Indonesia*. Mimeo. World Bank
- Kesuma, R., A. Utz, P. Bodrogini, R. Purwana. Forthcoming. Efficient Deployment of Teachers. Policy Note. World Bank.

- Murnane, R., M. R. Waldman, J. B. Willett, M. S. Bos and E. Vegas. 2017. "The Consequences of Educational Voucher Reform in Chile". NBER Working Paper No. 23550. June.
- OECD. 2004. PISA 2003 Results. Paris: OECD.
- _____. 2015. *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. OECD Publishing. Paris.
- _____. 2016. *PISA 2015 Results: Excellence and Equity in Education. Vol 1*. Paris: OECD.
- Popova, A., D. Evans, V. Arancibia. 2016. "Training Teachers on the Job: What Works and How to Measure it." Policy Research Working Paper No. 7834; WDR 2018 background paper. World Bank Group.
- PUSPENDIK. several years. Results of National Exam.
- Ragatz, A., S. Iskandar, R. Kesuma, S. Sugiarti and A. B. Ragatz. 2015. *Indonesia - A video study of teaching practices in TIMSS eighth grade mathematics classrooms: understanding what teaching practices are used, why they are used and how they relate to student learning (English)*. Washington, DC: World Bank Group.
- Rahmawati and Asriyanti. 2016. "Integrity Index of National Exam: an Effort to Gain Precise Information on Achievement of Curriculum Standards". Paper presented at IAEA (International Association for Educational Assessment).
- Rahmawati. 2018. Giving feedback to classrooms: Challenges on how to make a good assessment and how to make use of its results. Powerpoint presented at South Asia Regional Conference on Using Large Scale Assessments to Improve Teaching and Learning, India, April 2018.
- SUSENAS, several years.
- World Economic Forum. 2018. "Global Competitiveness Report 2017-2018". Available at <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>
- World Bank/Bank Dunia. 2018. *Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific*. World Bank East Asia and Pacific Regional Report. Washington, DC: World Bank.

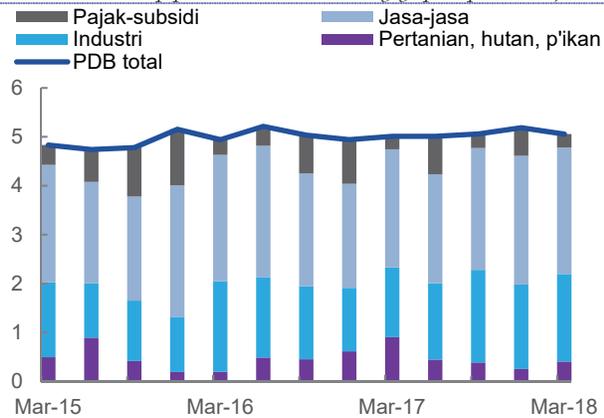
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil
(*pertumbuhan triwulanan yoy, persen*)



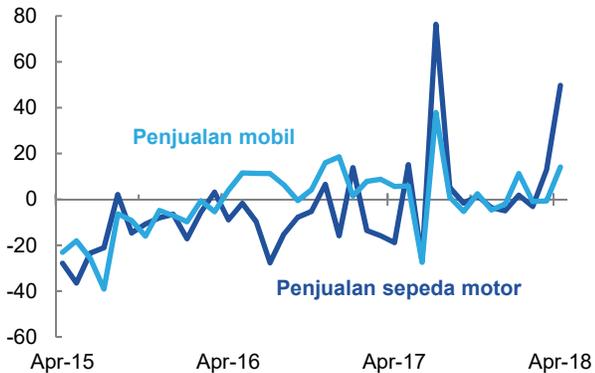
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB produksi
(*kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase*)



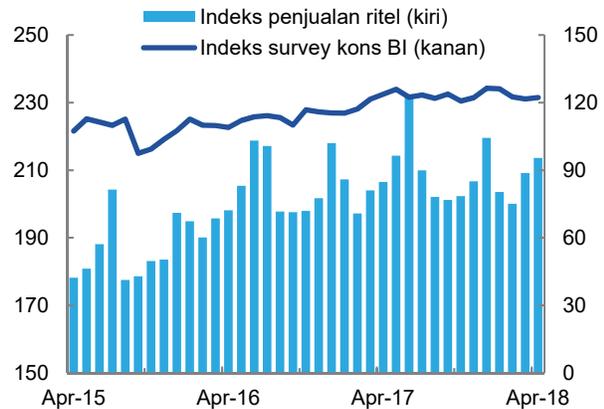
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 3: Penjualan mobil dan sepeda motor
(*pertumbuhan yoy, persen*)



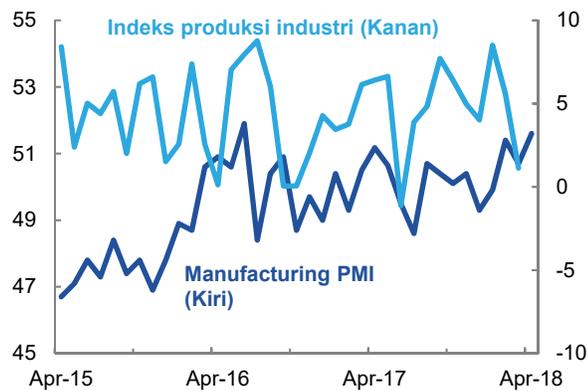
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Indikator konsumen
(*tabun dasar penjualan eceran 2010=100*)



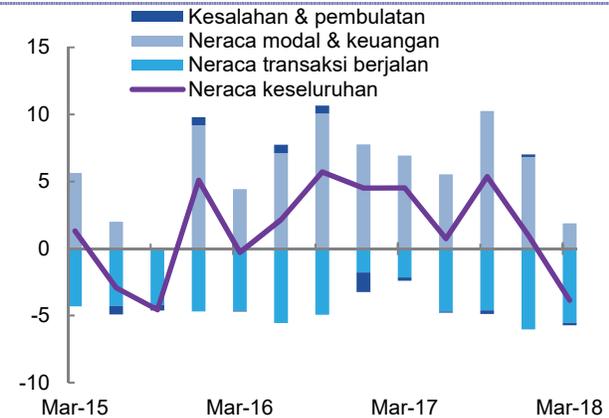
Sumber: BI

Lampiran Gambar 5: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI
(*indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen*)



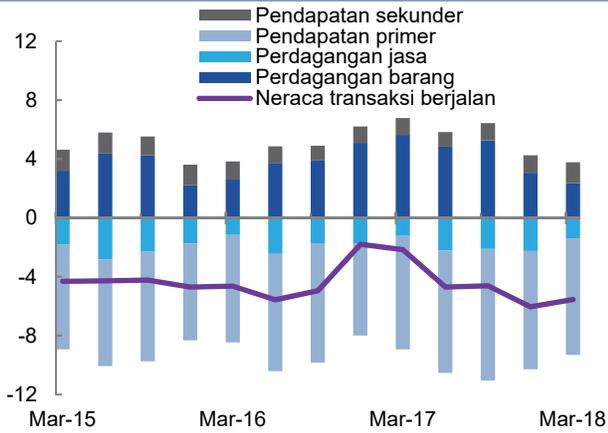
Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 6: Neraca pembayaran
(*USD miliar*)



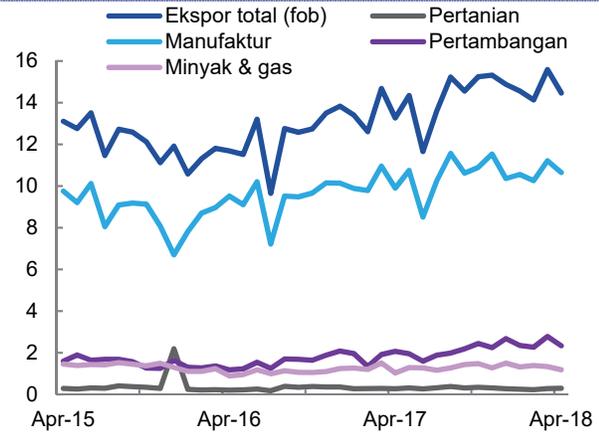
Sumber: BI

Lampiran Gambar 7: Komponen neraca berjalan
(USD miliar)



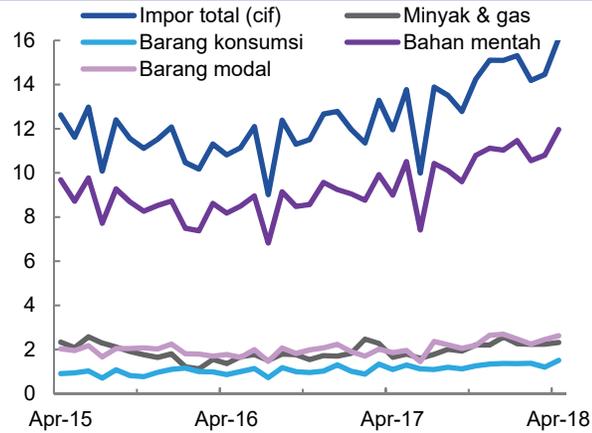
Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Ekspor barang
(USD miliar)



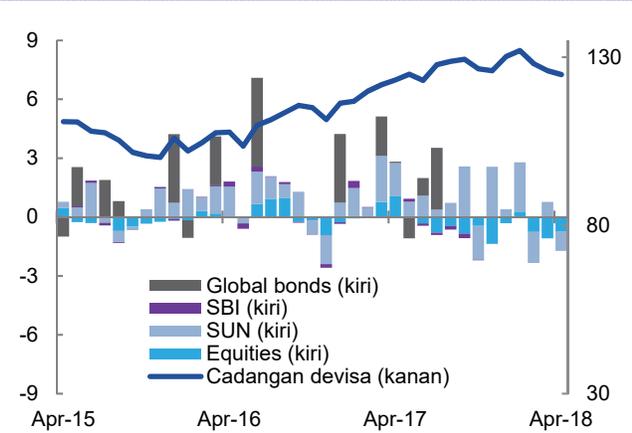
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 9: Impor barang
(USD miliar)



Sumber: BPS

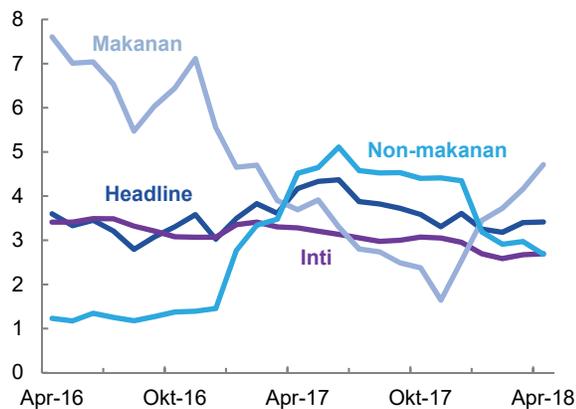
Lampiran Gambar 10: Cadangan devisa dan arus modal
(USD miliar)



Sumber: BI; Kementerian Keuangan

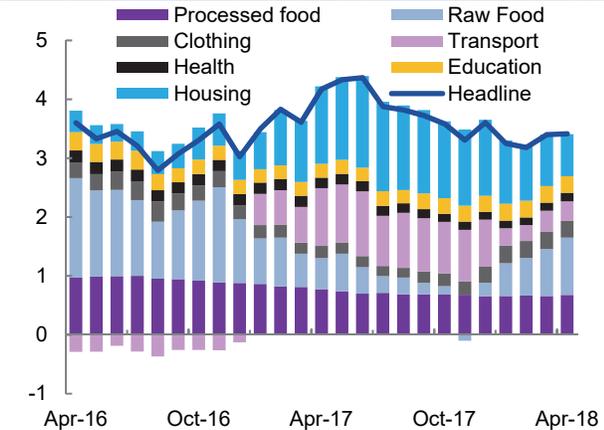
Catatan: SUN = Surat Utang Negara; SBI = Surat Berharga BI

Lampiran Gambar 11: Inflasi
(pertumbuhan yoy, persen)



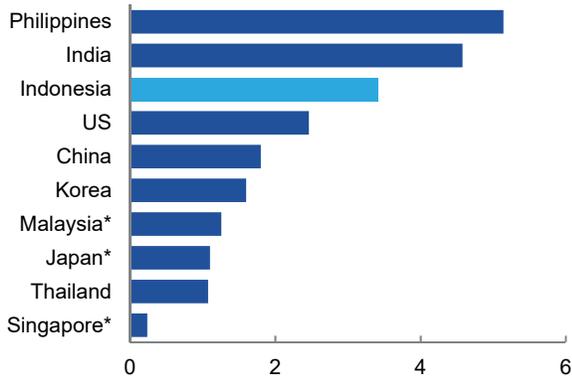
Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 12: Rincian IHK bulanan
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



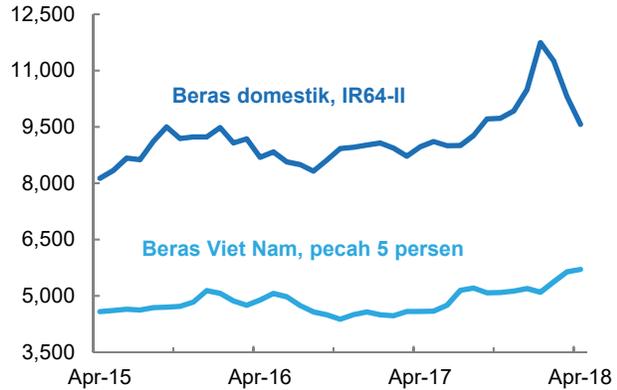
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Perbandingan inflasi beberapa negara
(pertumbuhan yoy, persen)



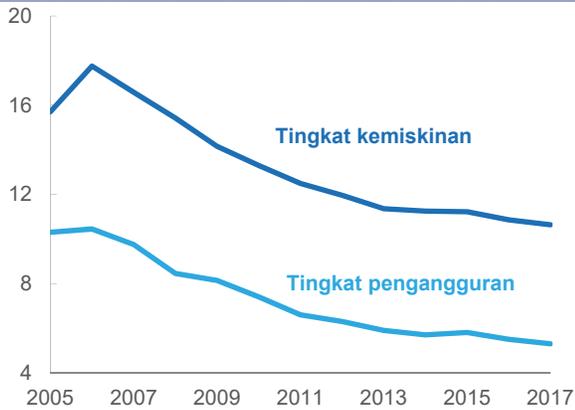
Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: data April 2018; *data Maret 2018.

Lampiran Gambar 14: Harga beras domestik dan internasional
(barga grosir, IDR per kg)



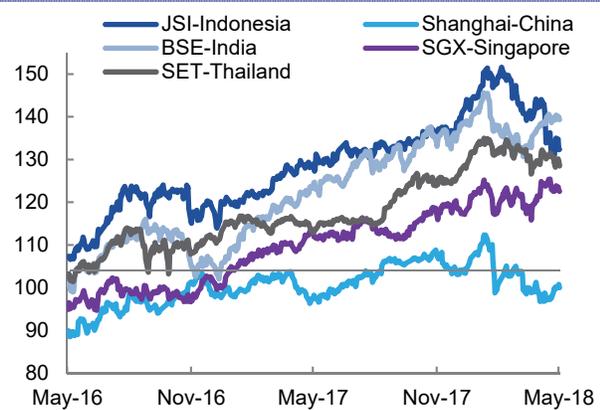
Sumber: Pusat perkulakan beras Cipinang; FAO
Catatan: “pecah 5 persen” mengacu pada kualitas penggilingan beras. 5 persen merupakan proporsi biji pecah selama proses penggilingan.

Lampiran Gambar 15: Tingkat kemiskinan dan pengangguran
(persen)



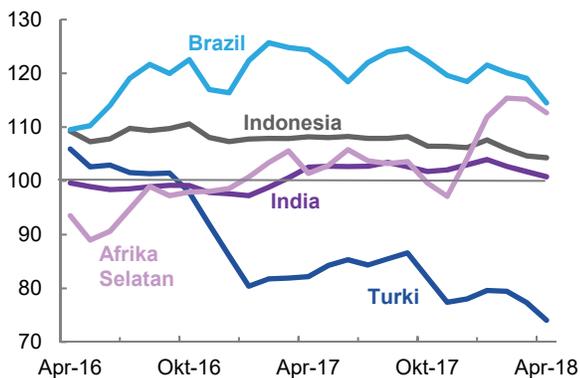
Sumber: BPS
Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional

Lampiran Gambar 16: Indeks saham regional
(indeks harian, September 1, 2015=100)



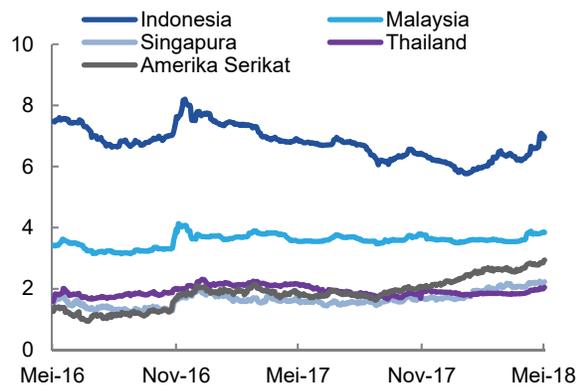
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 17: Nilai tukar dollar AS
(indeks bulanan, Agustus 2015=100)



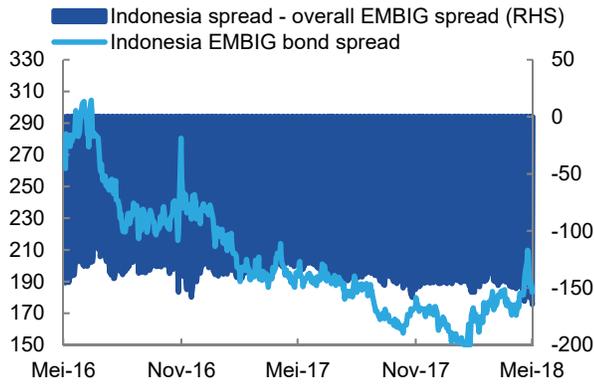
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 18: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal
(persen)



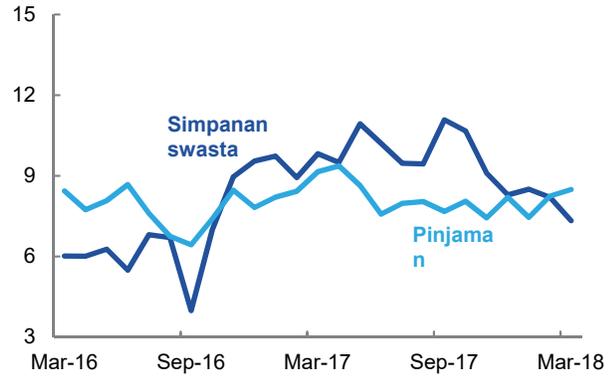
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 19: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global (basis poin)



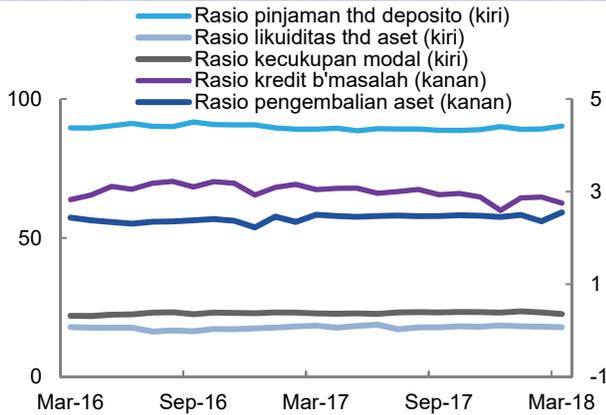
Sumber: JP Morgan

Lampiran Gambar 20: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito (pertumbuhan yoy, persen)



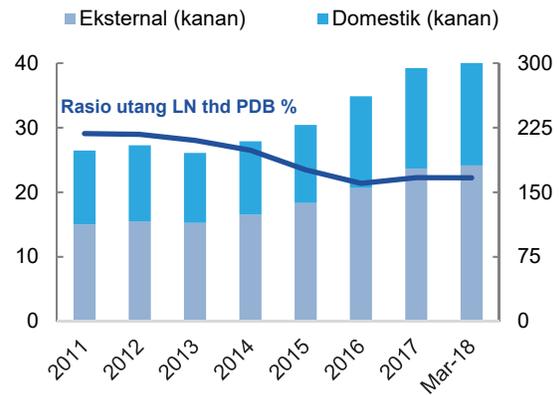
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Indikator sektor perbankan (bulanan, persen)



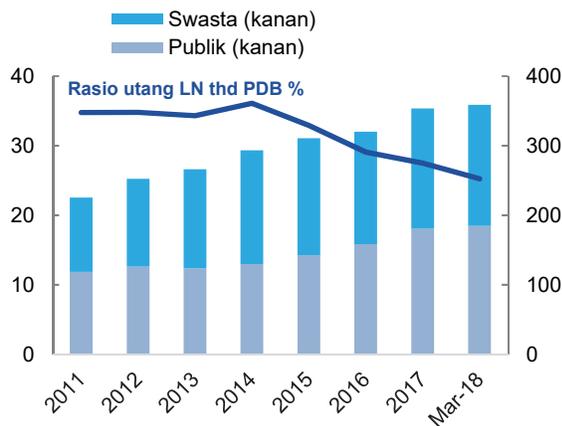
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Utang pemerintah (rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan)



Sumber: BI; Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 23: Utang luar negeri (rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah

(IDR triliun)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Realisasi						
A. Penerimaan dan hibah	1,211	1,338	1,439	1,550	1,508	1,556	1,666
1. Penerimaan pajak	874	981	1,077	1,147	1,240	1,285	1,344
2. Penerimaan non-pajak	331	352	355	399	256	262	311
B. Pengeluaran	1,295	1,491	1,651	1,777	1,807	1,864	2,007
1. Pemerintah pusat	884	1,011	1,137	1,204	1,183	1,154	1,265
2. Transfer ke pemerintah daerah	411	481	513	574	623	710	742
C. Neraca utama	9	-53	-99	-93	-142	-126	-124
D. SURPLUS / DEFISIT	-84	-153	-212	-227	-298	-308	-341
(persen dari PDB)	-1.1	-1.9	-2.3	-2.2	-2.6	-2.5	-2.5

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Neraca keseluruhan sebagai terhadap PDB menggunakan PDB yang telah direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(USD miliar)

	2014	2015	2016	2016		2017				2018
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Neraca pembayaran	1,211	1,338	1,439	1,550	1,508	1,556	1,660	1,211	1,338	1,439
<i>Persen dari PDB</i>	874	981	1,077	1,147	1,240	1,285	1,343	874	981	1,077
Neraca berjalan	331	352	355	399	256	262	310	331	352	355
<i>Persen dari PDB</i>	1,295	1,491	1,651	1,777	1,807	1,864	1,986	1,295	1,491	1,651
Neraca perdagangan	884	1,011	1,137	1,204	1,183	1,154	1,244	884	1,011	1,137
Pendapatan bersih & transfer berjalan	411	481	513	574	623	710	742	411	481	513
Neraca modal dan keuangan	9	-53	-99	-93	-142	-126	-110	9	-53	-99
<i>Persen dari PDB</i>	-84	-153	-212	-227	-298	-308	-326	-84	-153	-212
Investasi langsung	-1.1	-1.9	-2.3	-2.2	-2.6	-2.5	-2.4	-1.1	-1.9	-2.3
Investasi portfolio	1,211	1,338	1,439	1,550	1,508	1,556	1,660	1,211	1,338	1,439
Investasi lain	874	981	1,077	1,147	1,240	1,285	1,343	874	981	1,077
Kesalahan & pembulatan	331	352	355	399	256	262	310	331	352	355
Cadangan devisa*	1,295	1,491	1,651	1,777	1,807	1,864	1,986	1,295	1,491	1,651

Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Cadangan pada akhir periode.

Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Neraca nasional (% perubahan)¹									
PDB riil	4.9	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1
Investasi riil	11.4	8.5	8.9	9.1	5.0	4.4	5.0	4.5	6.2
Konsumsi riil	4.6	4.1	5.1	5.4	5.7	4.7	4.9	4.3	4.6
Swasta	3.7	4.8	5.1	5.5	5.5	5.3	4.8	5.0	5.0
Pemerintah	14.2	0.3	5.5	4.5	6.7	1.2	5.3	-0.1	2.1
Ekspor riil, barang dan jasa	30.6	15.3	14.8	1.6	4.2	1.1	-2.1	-1.6	9.1
Impor riil, barang dan jasa	26.6	17.3	15.0	8.0	1.9	2.1	-6.2	-2.4	8.1
Investasi (% PDB)	20	31	32	33	32.5	32.4	32.4	32.2	32.6
PDB nominal (USD miliar)	165	755	893	918	915	891	861	933	1,015
PDB per kapita (USD miliar)	857	3,167	3,688	3,741	3,668	3,532	3,370	3,603	3,878
Anggaran Pemerintah Pusat (% PDB)²									
Pendapatan dan hibah	20.8	14.5	15.5	15.5	15.1	14.7	13.1	12.5	12.3
Pendapatan non-pajak	9.0	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8	2.2	2.1	2.3
Pendapatan pajak	11.7	10.5	11.2	11.4	11.3	10.9	10.8	10.4	9.9
Pengeluaran	22.4	15.2	16.5	17.3	17.3	16.8	15.7	15.0	14.8
Konsumsi	4.0	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0	4.5	4.6	4.4
Modal	2.6	1.2	1.5	1.7	1.9	1.4	1.9	1.4	1.5
Bunga pinjaman	5.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Subsidi	6.3	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7	1.6	1.4	1.2
Surplus/defisit	-1.6	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-2.5	-2.5
Utang Pemerintah	97.9	24.5	23.1	23.0	24.9	24.7	27.4	28.3	29.0
Utang luar negeri pemerintah	51.4	11.1	10.2	9.9	11.2	10.2	11.9	11.3	..
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	87.1	26.8	25.2	27.5	29.1	32.9	36.1	34.3	..
Neraca pembayaran (% PDB)³									
Neraca pembayaran keseluruhan	..	4.0	1.3	0.0	-0.8	1.7	-0.1	1.3	1.1
Neraca transaksi berjalan	4.8	0.7	0.2	-2.7	-3.2	-3.1	-2.0	-1.8	-1.7
Ekspor, barang dan jasa	42.8	22.0	23.9	23.0	22.4	22.3	19.9	18.0	19.1
Impor, barang dan jasa	33.9	19.2	21.2	23.2	23.1	22.7	19.3	17.1	18.0
Transaksi berjalan	8.9	2.8	2.7	-0.2	-0.7	-0.3	0.6	0.9	1.1
Neraca transaksi keuangan	..	3.5	1.5	2.7	2.4	5.0	2.0	3.1	2.9
Penanaman modal langsung, neto	-2.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.7	1.2	1.7	2.0
Cadangan devisa bruto (USD miliar)	29.4	96	110	113	99	112	106	116	130
Moneter (% perubahan)³									
Deflator PDB ¹	20.4	8.3	7.5	3.8	5.0	5.4	4.0	2.5	4.3
Suku bunga Bank Indonesia (%)	6.3	4.8	4.3
Kredit domestik (akhir periode)	..	23.3	24.7	23.1	21.4	11.6	10.1	7.8	8.2
Nilai tukar nominal (rerata, IDR/USD)	8,392	9,087	8,776	9,384	10,460	11,879	13,392	13,307	13,384
Harga (% perubahan)¹									
Indeks Harga Konsumen (akhir periode)	9.4	7.0	3.8	3.7	8.1	8.4	3.4	3.0	3.6
Indeks Harga Konsumen (rerata)	3.7	5.1	5.3	4.0	6.4	6.4	6.4	3.5	3.8
Harga minyak mentah Indonesia (USD per barel, akhir periode) ⁴	28	79	112	113	107	60	36	51	61

Sumber: ¹ BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dengan tahun dasar 2010. ² Kementerian Keuangan dan Perhitungan staf Bank Dunia, ³ BI, ⁴ CEIC

Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kependudukan¹									
Penduduk (juta orang)	213	243	246	249	252	255	258	261	..
Pertumbuhan penduduk (%)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	..
Penduduk perkotaan (% dari total)	42	50	51	51	52	53	53.7	54	..
Rasio ketergantungan (% dari penduduk usia kerja)	55	51	51	50	50	50	49.2	49	..
Ketenagakerjaan²									
Angkatan kerja, total (juta orang)	98	117	117	120	120	122	122	125	128
Laki-laki	60	72	73	75	75	76	77	77	79
Perempuan	38	45	44	46	45	46	46	48	49
Proporsi pekerja di sektor agrikultur (%)	45	38	36	35	35	34	33	32	30
Proporsi pekerja di sektor industri (%)	17	19	21	22	20	21	22	21	22
Proporsi pekerja di sektor jasa (%)	37	42	43	43	45	45	45	47	48
Pengangguran, total (% dari jumlah angkatan kerja)	8.1	7.1	7.4	6.1	6.2	5.9	6.2	5.6	5.5
Kemiskinan dan distribusi pendapatan³									
Median konsumsi rumah tangga (000 IDR per bulan)	104	374	421	446	487	548	623	697	765
Garis kemiskinan nasional (000 IDR per bulan)	73	212	234	249	272	303	331	354	375
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional (million)	38	31	30	29	28	28	29	28	28
Tingkat kemiskinan (% populasi di bawah garis kemiskinan nasional)	19.1	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3	11.2	10.9	10.6
Urban (% dari populasi di bawah garis kemiskinan urban)	14.6	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.3	7.8	7.7
Rural (% dari populasi di bawah garis kemiskinan rural)	22.4	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2	14.2	14.1	13.9
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	11.0	10.2	9.5	9.2	9.0	9.3	9.0	8.7
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	9.5	9.7	8.8	8.6	8.6	11.1	9.8	9.3
Indeks Gini	0.30	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	..
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.1	7.0
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8	47.3	46.2	45.7
Belanja pemerintah untuk jaminan dan kesejahteraan sosial (% PDB) ⁴	..	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	..
Kesehatan dan Gizi¹									
Tenaga kesehatan (per 1.000 orang)	0.16	0.14	..	0.20
Angka kematian balita (per 1.000 anak usia dibawah 5 tahun)	52	33	32	31	29	28	27	26	..
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	22	16	16	15	15	15	14	14	..
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	41	28	27	26	25	24	23	22	..
Angka kematian ibu (estimasi model, per 100.000 kelahiran hidup)	265	165	156	148	140	133	126
Imunisasi campak (% dari anak usia dibawah 2 tahun)	76	78	80	82	81	75	75	76	..
Total pengeluaran untuk kesehatan (% dari PDB)	2.0	2.7	2.7	2.9	2.9	2.8
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% dari PDB)	0.7	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1
Pendidikan³									
Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%), APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	92	92	93	92	93	97	97	97
Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat menengah (%), APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	48	49	49	50	48	49	49	49
Angka Partisipasi Murni universitas/pendidikan tinggi (%), APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	61	60	60	61	65	66	66	79
Angka Partisipasi Murni universitas/pendidikan tinggi (%), APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	50	50	49	50	50	51	51	49
Angka Partisipasi Murni universitas/pendidikan tinggi (%), APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	16	14	15	16	18	20	21	19
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	53	50	54	54	55	56	55	53
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	92	93	93	95	95	96
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari PDB) ⁵	..	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	3.5	3.3	2.98
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari APBN) ⁵	..	20.0	20.2	20.1	20.0	19.9	20.6	20.0	20.0
Air bersih dan kesehatan lingkungan¹									
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% dari total penduduk)	78	85	85	86	86	87	87
Urban (% dari penduduk urban)	91	93	93	94	94	94	94
Rural (% dari penduduk rural)	68	76	77	77	78	79	80
Penduduk dengan akses fasilitas sanitasi (% dari total penduduk)	44	57	58	59	60	61	61
Urban (% dari penduduk urban)	64	70	71	71	72	72	72
Rural (% dari penduduk rural)	30	44	45	46	47	48	48
Lainnya¹									
Skor perbaikan pengurangan risiko bencana (skala 1-5; 5=paling baik)	3.3
Proporsi perempuan di kursi parlemen (%) ⁶	8	18	18	19	19	17	17	17	20

Sumber: ¹ World Development Indicators; ² BPS (Sakernas); ³ BPS (Susenas) dan World Bank; ⁴ Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya termasuk pendistribusian Raskin, asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan untuk warga miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta realisasi; ⁵ Kementerian Keuangan; ⁶ Inter-Parliamentary Union



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade

Supported by funding from the Australian Government
(Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the
Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis
(SEMEFPA) program.